



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH KABUPATEN WAJO

TAHUN 2019

KATA PENGANTAR



Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT, berkat Rahmat dan Inayah-NYA Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kabupaten Wajo Tahun 2019 telah selesai disusun dan dapat disajikan untuk memberikan gambaran nyata mengenai berbagai kegiatan yang telah dilakukan yang dapat diukur baik secara kualitatif maupun kuantitatif ataupun bisa diukur dari sisi efektivitas, dan efisiensi serta ekonomisnya.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) pada hakikatnya merupakan perwujudan pertanggung jawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan program dan kegiatan Tahun Anggaran 2019 yang disusun oleh setiap Organisasi Perangkat Daerah berdasarkan suatu sistem akuntabilitas yang memadai.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) sebagaimana diamanatkan dalam Inpres Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia Nomor : 239/IX/6/8/2003 merupakan dasar penyusunan pelaporan kinerja seluruh kegiatan yang telah dilaksanakan oleh setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah, sehingga Organisasi Perangkat Daerah harus menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) yang didalamnya Tahun Anggaran yang merupakan wujud pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta kewenangan pengelolaan sumber daya dan kebijakan yang telah ditetapkan. Dalam penyusunan berdasarkan permenpan dan RB Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja

Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) yang didalamnya berisi mengenai program-program utama yang dicapai selama periode satu tahun anggaran yang merupakan wujud pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta kewenangan pengelolaan sumber daya dan kebijakan yang telah ditetapkan.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) diharapkan selain dapat digunakan sebagai masukan bagi pengelolaan dan penataan kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Wajo juga dapat dimanfaatkan untuk perbaikan dan perencanaan di masa yang akan datang serta dapat dijadikan pedoman atau acuan bagi seluruh perangkat daerah Kabupaten Wajo dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya.

Tersusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini merupakan hasil kerja semua pihak yang turut serta memberikan bimbingan dan masukan sehingga penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kabupaten Wajo Tahun 2019 Tahun Anggaran 2020 ini dapat diselesaikan sesuai dengan target yang ditetapkan.

Kami berharap agar Laporan Kinerja ini dapat menjadi media pertanggung jawaban kinerja serta bahan evaluasi untuk peningkatan kinerja di masa mendatang bagi Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Wajo.

Sengkang, 03 Maret 2020



IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pemerintah Kabupaten Wajo Tahun 2019 menyajikan hasil pengukuran kinerja pencapaian sasaran yang diarahkan untuk dapat mencapai misi dan visi Pemerintah Kabupaten Wajo sesuai target kinerja yang telah menjadi komitmen Pemerintah Kabupaten Wajo.

Dalam rangka meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan yang lebih berdaya guna, berhasil guna, transparansi dan bertanggung jawab serta untuk mewujudkan *clean government* dan *good governance*, maka Akuntabilitas Instansi Pemerintah disusun dalam bentuk Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) sebagaimana diamanatkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Dengan demikian, LKjIP Kabupaten Wajo Tahun 2019 ini disusun sebagai sebuah bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan guna mewujudkan sasaran-sasaran yang ditargetkan dapat dicapai pada Tahun 2019-2024 sebagai bagian dari upaya pencapaian visi pembangunan Kabupaten Wajo **“Wajo yang Berkarakter Religius, Produktif, Unggul, Sejahtera dan Aman”**

Sebagai bahan evaluasi terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah, LKjIP tidak hanya menyajikan informasi yang berisi tentang keberhasilan-keberhasilan yang telah dicapai pada tahun 2019, tetapi juga memuat kekurangan-kekurangan yang ada sehingga dapat dirumuskan solusinya untuk perbaikan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan dimasa mendatang. Melalui analisis pengukuran kinerja yang ada di dalam LKjIP tersebut diharapkan segenap stakeholders di Pemerintah Kabupaten Wajo dapat

secara bersama-sama berperan aktif dan bekerjasama guna perbaikan penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten Wajo di tahun-tahun selanjutnya.

Secara umum, penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Wajo pada tahun 2019 dapat dikatakan **Sangat Baik/Sangat Berhasil**. Hal ini, didasarkan pada hasil pengukuran kinerja pencapaian sasaran yang dapat dicapai melalui pelaksanaan berbagai kebijakan, program dan kegiatan sebagaimana tertuang dalam Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Pemkab Wajo 2019 dan Penetapan Kinerja (PK) Pemkab Wajo 2019.

Hasil pengukuran kinerja menunjukkan bahwa dari 23 sasaran strategis dengan 41 indikator kinerja utama yang telah ditetapkan dalam RKT dan PK Pemerintah Kabupaten Wajo Tahun 2019 menunjukkan bahwa :

1. 12 (Dua Belas) indikator kinerja dengan kategori sangat Memuaskan.
2. 24 (Dua Puluh empat) indikator kinerja dengan kategori Memuaskan.
3. 3 (Tiga) indikator kinerja dengan kategori Cukup Memuaskan.
4. 2 (satu) indikator kinerja dengan kategori Kurang Memuaskan.

Jadi capaian kinerja Pemerintah Kabupaten Wajo pada tahun 2019 Sangat Baik dengan demikian masih terdapat beberapa indikator kinerja yang capaiannya belum seperti yang diharapkan yang berkategori cukup berhasil dan tidak berhasil sehingga perlu perhatian pada tahun berikutnya. Beberapa hal yang perlu juga menjadi perhatian terkait hasil pengukuran capaian kinerja Pemerintah Kabupaten Wajo Tahun 2019, antara lain:

1. Kurang adanya pemahaman dan komitmen dalam pencapaian target kinerja sasaran untuk pencapaian tujuan, misi dan visi yang telah ditetapkan didalam RPJMD. Umumnya dalam pelaksanaan program tahunan yang tertuang

didalam RKPD, penganggaran program dan kegiatan Organisasi Perangkat Daerah masih bersifat *project oriented*, belum berorientasi pada pencapaian sasaran yang telah tertuang didalam RPJMD ataupun sasaran strategis. Sehingga terdapat program-program yang kurang relevan dengan pencapaian sasaran tetap memperoleh alokasi pendanaan yang relatif besar. Oleh karena itu perlu adanya komitmen atau penegasan agar program dan kegiatan yang dilaksanakan benar-benar mengacu pada prioritas daerah.

2. Kurang pemahaman SDM aparatur dalam mensikapi perubahan aturan pengelolaan keuangan maupun penyelenggaraan pemerintahan daerah. Sehingga dalam pengusulan dan atau pelaksanaan kegiatan masih sering dijumpai adanya program pembangunan yang kurang selaras dengan sasaran strategis dan prioritas pembangunan yang merupakan kebutuhan mendasar masyarakat.

Untuk itu, kedepan perlu dilakukan beberapa perbaikan agar target kinerja dapat dicapai sesuai dengan yang ditetapkan, antara lain :

1. Perlu adanya pemahaman kepada masing-masing Organisasi Perangkat Daerah, bahwa dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pembangunan harus tetap berpedoman pada capaian kinerja yang telah tertuang didalam RPJMD. Sehingga program/kegiatan yang direncanakan dan dilaksanakan adalah program/kegiatan yang langsung mengarah pada pencapaian sasaran, tujuan, misi dan visi Kabupaten Wajo. Terhadap kegiatan-kegiatan yang sifatnya tidak secara langsung mengarah pada prioritas dalam pencapaian sasaran, misi dan visi dapat dieliminasi atau dikurangi porsi penganggarnya.

2. Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) secara penuh agar segera diterapkan dimasing-masing Organisasi Perangkat Daerah sehingga terjalin suatu keterkaitan antara perencanaan strategis, perencanaan kinerja, pengukuran kinerja dan pelaporan kinerja, sehingga perencanaan program dan kegiatan mengarah pada pencapaian sasaran, misi dan visi RPJMD.
3. Perlu segera dibangun Sistem Pengelolaan Data Kinerja yang meliputi sistem pengumpulan data kinerja dan cara pengukuran kinerja. Hal ini dimaksudkan agar ukuran kinerja yang digunakan sebagai tolok ukur pelaksanaan kegiatan dapat benar-benar dipahami oleh masing-masing Organisasi Perangkat Daerah. Untuk efektifitas perlu adanya suatu sistem pengumpulan data base secara elektronik melalui jaringan intranet maupun internet untuk validasi dan mempermudah dalam analisa kebijakan.

Semoga, Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ini dapat menjadi bahan evaluasi dalam penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Wajo. Prestasi kinerja yang berhasil diraih merupakan hasil kerja keras seluruh Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Wajo bersama dengan stakeholder yang dibingkai semangat kebersamaan dalam memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat. Berbagai kekurangan yang ada, tentunya menjadi pemacu untuk memotivasi agar lebih bersemangat dalam bekerja dan berusaha demi terwujudnya Kabupaten Wajo Yang amanah, maju dan Sejahtera.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
IKTISAR EKSEKUTIF	iii
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR TABEL	x
DAFTAR DIAGRAM	xi
BAB I	
I. PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Aparat Pemerintah	2
1.3 Kewenangan dan Tugas Pokok Serta Struktur Organisasi	3
1.4 Isu Strategis	17
1.5 Sistematika Penulisan	24
BAB II	
II. PERENCANAAN KERJA	
2.1 Visi	26
2.2 Misi	29
2.3 Tujuan dan Sasaran	31
2.4 Rencana Kerja Tahunan 2018	43
BAB III	
III. AKUNTABILITAS KINERJA	
3.1 Pengukuran Kinerja	50
3.2 Capaian Kinerja	55
3.2.1 Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun ini	55
3.2.2 Perbandingan Antara Capaian Kinerja Tahun Ini Dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir	67

3.2.3. Analisis Penyebab Keberhasilan / Kegagalan Atau Peningkatan / Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi Yang Telah Dilakukan	78
3.2.4 Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Daya	88
3.2.5 Analisis Program Yang Menunjang Keberhasilan Ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja	94
3.3 Realisasi Anggaran	105
3.3.1 Pendapatan	107
3.3.2 Belanja Tidak Langsung	109
3.3.3 Belanja Langsung	112
3.3.4 Pembiayaan Daerah	113
IV. PENUTUP	116

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Tujuan dan Sasaran RPJMD Kabupaten Wajo Pada Misi 1	32
Tabel 2.2	Tujuan dan Sasaran RPJMD Kabupaten Wajo Pada Misi 2	35
Tabel 2.3	Tujuan dan Sasaran RPJMD Kabupaten Wajo Pada Misi 3	37
Tabel 2.4	Tujuan dan Sasaran RPJMD Kabupaten Wajo Pada Misi 4	38
Tabel 2.5	Tujuan dan Sasaran RPJMD Kabupaten Wajo Pada Misi 5	40
Tabel 2.6	Tujuan dan Sasaran RPJMD Kabupaten Wajo Pada Misi 6	41
Tabel 2.7	Perjanjian Kinerja Tahun 2019 Kabupaten Wajo	47
Tabel 3.1	Skala Penilaian Pengukuran Positif	51
Tabel 3.2	Skala Penilaian Pengukuran Negatif	51
Tabel 3.3	Pencapaian IKU	52

DAFTAR DIAGRAM

Diagram 1	Capaian IKU	54
Diagram 2	Perbandingan Antara Target Pendapatan dengan Realisasi Pendapatan Pemerintah Kabupaten Wajo	108
Diagram 3	Perbandingan Antara Target Belanja Tidak Langsung dan Realisasi Belanja Tidak Langsung	110
Diagram 4	Perbandingan Antara Target Anggaran dan Realisasi Belanja	112
Diagram 5	Perbandingan Antara Target Pembiayaan dengan dan Realisasi Pembiayaan	114

BAB I PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Penyelenggaraan fungsi pemerintahan berupa fungsi pengaturan, pelayanan, pembangunan, pemberdayaan dan perlindungan dengan mengedepankan wewenang yang mengacu pada asas-asas umum pemerintahan sebagaimana amanat Undang - Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan Pasal 3 dengan tujuan menciptakan tertib penyelenggaraan administrasi pemerintahan, menciptakan kepastian hukum, mencegah penyalahgunaan wewenang, menjamin akuntabilitas badan dan/atau pejabat pemerintahan, memberikan perlindungan hukum kepada warga masyarakat dan aparatur pemerintahan, dan memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya kepada warga masyarakat.

Penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis, transparan, akuntabel, efisien dan efektif, salah satunya dapat diukur melalui penilaian dan pelaporan kinerja pemerintah daerah menjadi bagian kunci akhir dari proses penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Upaya ini juga selaras dengan tujuan perbaikan pelayanan publik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Untuk itu, pelaksanaan otonomi daerah perlu mendapatkan dorongan yang lebih besar dari berbagai elemen masyarakat, termasuk dalam pengembangan akuntabilitas melalui penyusunan dan pelaporan kinerja pemerintah daerah.

Akuntabilitas didefinisikan sebagai suatu perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik. Dalam dunia birokrasi, akuntabilitas pemerintah merupakan perwujudan kewajiban instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi instansi yang bersangkutan. Sejalan dengan hal tersebut, telah ditetapkan

TAP MPR Nomor XI/MPR/1998 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme; dan Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. Selanjutnya, sebagai kelanjutan dari produk hukum tersebut diterbitkan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Sesuai dengan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; setiap Pemerintah Daerah (Pejabat Eselon II) diminta untuk menyampaikan **Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP/LAKIP)** kepada Presiden, sebagai perwujudan kewajiban suatu Instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara periodik setiap akhir anggaran.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP/LAKIP) dibuat dalam rangka perwujudan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada setiap Instansi Pemerintah, berdasarkan suatu sistem akuntabilitas yang memadai. LKjIP/LAKIP juga berperan sebagai alat kendali, alat penilai kinerja dan alat pendorong terwujudnya *good governance*.

Mengacu kepada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014, LKjIP/LAKIP Pemerintah Daerah Kabupaten disampaikan kepada Gubernur, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan Menteri Dalam Negeri selambat-lambatnya tiga bulan setelah tahun anggaran berakhir..

1.2 APARAT PEMERINTAH

Keadaan Aparat Pemerintah dilingkungan Kabupaten untuk mendukung kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat pada Tahun 2019 berjumlah 6.206 orang yang terdiri dari :

Jumlah Pegawai Negeri Sipil berdasarkan:

a. Berdasarkan Pendidikan

S.3			S.2			S.1			D.IV			D.III			D.II			D.I			SMA			SMP			SD			TOTAL			
L	P	JML	L	P	JML	L	P	JML	L	P	JML	L	P	JML	L	P	JML	L	P	JML	L	P	JML	L	P	JML	L	P	JML	L	P	JML	TOTAL
4	3	7	325	201	526	1,520	2,319	3,839	23	78	101	121	367	488	50	207	257	6	6	12	424	475	899	38	19	57	17	3	20	6,206			

b. Berdasarkan Golongan Ruang

GOLONGAN IV								GOLONGAN III								GOLONGAN II								GOLONGAN I								TOTAL			
IV/d		IV/c		IV/b		IV/a		JUMLAH	III/d		III/c		III/b		III/a		JUMLAH	II/d		II/c		II/b		II/a		JUMLAH	I/d		I/c		I/b		I/a		JML
L	P	L	P	L	P	L	P		L	P	L	P	L	P	L	P		L	P	L	P	L	P	L	P		L	P	L	P	L	P	L	P	
1	1	20	2	512	686	337	552	2,111	347	519	356	599	266	465	179	387	3,118	56	108	141	153	64	44	145	220	931	6	2	25	7	4	1	1	46	6,206

c. Berdasarkan Jabatan

ESELON																JFU			JFT			TOTAL					
II.a			II.b			III.a			III.b			IV.a			IV.b			V.a			JUMLAH	648	718	1,367	1,163	2,489	3,652
L	P	JML	L	P	JML	L	P	JML	L	P	JML	L	P	JML	L	P	JML	L	P	JML							
1	-	1	35	3	36	40	20	60	96	47	143	349	270	619	112	69	181	10	3	13	1053	6,206					

Sumber : Data BKPSDM (Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia) Tahun 2019

1.3 KEWENANGAN DAN TUGAS POKOK SERTA STRUKTUR ORGANISASI

Organisasi perangkat daerah yang merupakan pembantu kepala daerah dan DPRD dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pada Pasal 208 sampai dengan Pasal 235, menyebutkan bahwa perangkat daerah kabupaten/kota terdiri dari sekretariat daerah, sekretariat DPRD, inspektorat, dinas, badan dan kecamatan. Pemerintah Kabupaten Wajo dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah.

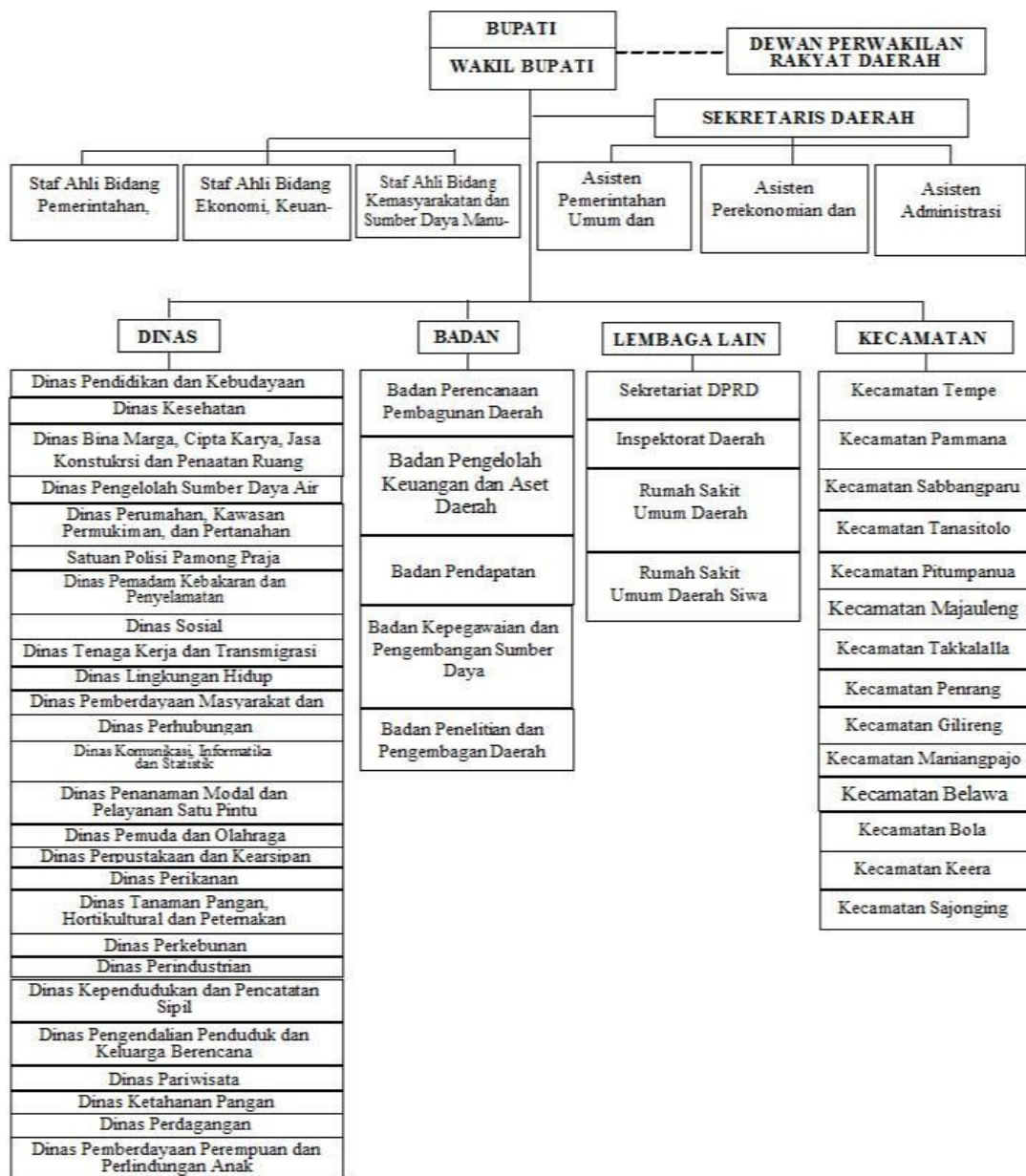
Organisasi perangkat daerah yang merupakan pembantu Kepala Daerah dan DPRD dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pada Pasal 208 sampai dengan Pasal 235, menyebutkan bahwa perangkat daerah kabupaten/kota terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat, Dinas, Badan dan Kecamatan. Pemerintah Kabupaten Wajo dengan

berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah dan Peraturan Daerah Nomor 6 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah yang isinya menetapkan organisasi perangkat daerah.

Kabupaten Wajo terdiri atas Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Inspektorat Daerah dan Dinas Daerah terdiri dari 27 dinas, serta Badan terdiri dari 7 dan 2 Rumah Sakit Umum Daerah dan 14 Kecamatan. Perangkat Daerah dimaksud bertanggung jawab kepada Kepala Daerah dan membantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan Pemerintahan.

Struktur Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Wajo dibentuk dengan Peraturan Daerah sebagai berikut.

PP NOMOR 18 TAHUN 2016 PERDA NOMOR 6 TAHUN 2016



Untuk lebih jelasnya mengenai gambaran perangkat daerah Kabupaten Wajo, dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah.

a. Sekretariat Daerah

Sekretariat Kabupaten adalah unsur staf pemerintah Kabupaten yang dipimpin oleh seorang Sekretaris Kabupaten, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati. Tugas pokok Sekretariat Kabupaten yakni membantu Bupati dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintahan, administrasi, organisasi dan tata laksana, serta memberikan pelayanan administratif kepada seluruh perangkat Kabupaten.

Sekretariat daerah dalam melaksanakan tugas dan kewajiban sebagaimana di atas, menyelenggarakan fungsi:

- Pengoordinasian penyusunan kebijakan Daerah;
- Pengoordinasian pelaksanaan tugas satuan kerja Perangkat Daerah;
- Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah;
- Pelayanan administratif dan pembinaan aparatur sipil negara pada instansi Daerah; dan
- Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

1. Sekretaris Daerah

2. Staf Ahli, yang terdiri dari:

- a. Staf ahli bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik;
- b. Staf ahli bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan;
- c. Staf ahli bidang Kemasyarakatan dan Sumber daya Manusia

3. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, yang terdiri dari:

- a). Bagian Pemerintahan
- b). Bagian Organisasi
- c). Bagian Hukum dan HAM
- d). Bagian Kesejahteraan Rakyat

4. Asisten Perekonomian dan Pembangunan, yang terdiri dari:

- a). Bagian Pembangunan.
- b). Bagian Bagian Perekonomian.
- c). Bagian Sumber Daya Alam dan Potensi Daerah
- d). Bagian Layanan Pengadaan Barang dan Jasa

b. Sekretariat DPRD, meliputi:

Sekretariat dewan perwakilan rakyat daerah yang selanjutnya disebut sekretariat DPRD merupakan unsur pelayanan terhadap DPRD. Sekretariat DPRD mempunyai tugas menyelenggarakan administrasi kesekretariatan, administrasi keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, dan menyediakan serta mengoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

Sekretariat DPRD dipimpin oleh sekretaris dewan. Sekretaris dewan secara teknis operasional berada di bawah dan bertanggung jawab kepada pimpinan DPRD dan secara administratif bertanggung jawab kepada bupati melalui sekretaris daerah.

Sekretariat DPRD dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya sebagaimana di atas, menyelenggarakan fungsi:

- Penyelenggaraan administrasi kesekretariatan DPRD kabupaten;
- Penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD kabupaten;
- Fasilitasi penyelenggaraan rapat DPRD kabupaten; dan
- Penyediaan dan pengoordinasian tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD kabupaten
 1. Sekretaris Dewan.
 2. Bagian Administrasi Kesekretariatan;
 3. Bagian Legislasi;
 4. Bagian Pengawasan dan Penganggaran.

c. Inspektorat Daerah kabupaten merupakan unsur pengawas penyelenggaraan Pemerintah Daerah, inspektorat Daerah kabupaten dipimpin oleh inspektur. Inspektur dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada bupati melalui sekretaris daerah kabupaten. Inspektorat daerah kabupaten mempunyai tugas

membantu bupati membina dan mengawasi pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan oleh Perangkat Daerah. Inspektorat Daerah kabupaten dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi:

- Perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;
- Pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja keuangan melalui audit, revidu, evaluasi;
- Pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
- Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Bupati;
- Penyusunan laporan hasil pengawasan;
- Pelaksanaan administrasi Inspektorat Kabupaten; dan
- Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

d. Dinas Daerah Kabupaten merupakan unsur pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. Dinas Daerah Kabupaten dipimpin oleh Kepala Dinas Daerah Kabupaten yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada bupati melalui sekretaris Daerah kabupaten. Dinas Daerah Kabupaten mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Kabupaten

Dinas Daerah Kabupaten dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi :

- Perumusan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- Pelaksanaan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- Pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati terkait dengan tugas dan fungsinya

Dinas Daerah, terdiri dari :

1. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang pendidikan dan bidang Kebudayaan;
2. Dinas Kesehatan merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang kesehatan;
3. Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Jasa Konstruksi dan Penataan Ruang merupakan unsur pelaksana sub urusan pemerintahan bidang Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Jasa Konstruksi dan Penataan Ruang;
4. Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air merupakan unsur pelaksana sub urusan pemerintahan bidang Pengelolaan Sumber Daya Air;
5. Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan ;
6. Satuan Polisi Pamong Praja merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang Ketentraman dan Ketertiban serta perlindungan masyarakat sub Satuan Polisi Pamong Praja;
7. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan merupakan unsur pelaksana sub urusan pemerintahan bidang Ketentraman dan Ketertiban serta perlindungan masyarakat sub Kebakaran;
8. Dinas Sosial merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang Sosial;
9. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang Tenaga Kerja dan bidang Transmigrasi;
10. Dinas Lingkungan Hidup unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang Lingkungan Hidup;
11. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
12. Dinas Perhubungan urusan pemerintahan bidang Perhubungan;
13. Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang Komunikasi, Informatika, bidang Persandian dan bidang Statistik;
14. Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;

15. Dinas Pemuda dan Olahraga unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang Pemuda dan Olahraga;
16. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan unsur pelaksana urusan Pemerintahan bidang Perpustakaan dan Arsip Daerah;
17. Dinas Perikanan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang Kelautan dan Perikanan;
18. Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan unsur pelaksana sub urusan pemerintahan bidang Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan;
20. Dinas Perkebunan merupakan unsur pelaksana sub urusan pemerintahan bidang Perkebunan;
21. Dinas Perindustrian merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang Perindustrian;
22. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil merupakan unsur Pelaksana urusan pemerintahan bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
23. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana merupakan unsur Pelaksana urusan pemerintahan bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
24. Dinas Pariwisata merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang Pariwisata;
25. Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah;
26. Dinas Ketahanan Pangan merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang Pangan;
27. Dinas Perdagangan merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang Perdagangan;
28. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak merupakan unsur Pelaksana urusan pemerintahan bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;

e. Selain unit pelaksana teknis dinas Daerah kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 pada Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, terdapat unit pelaksana teknis dinas Daerah kabupaten di bidang kesehatan berupa rumah sakit Daerah kabupaten dan pusat kesehatan masyarakat sebagai unit organisasi bersifat fungsional dan unit layanan yang bekerja secara profesional.

Rumah sakit Daerah kabupaten dipimpin oleh direktur rumah sakit Daerah Kabupaten. Rumah sakit Daerah kabupaten bersifat otonom dalam penyelenggaraan tata kelola rumah sakit dan tata kelola klinis serta menerapkan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum Daerah.

Dalam hal rumah sakit Daerah Kabupaten/Kota belum menerapkan pengelolaan keuangan badan layanan umum Daerah, pengelolaan keuangan rumah sakit Daerah kabupaten tetap bersifat otonom dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban keuangan. Rumah sakit Daerah kabupaten dalam penyelenggaraan tata kelola rumah sakit dan tata kelola klinis, dibina dan bertanggung jawab kepada dinas yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang kesehatan.

Pertanggungjawaban, dilaksanakan melalui penyampaian laporan kinerja rumah sakit kepada kepala dinas yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang kesehatan. Pembinaan tata kelola rumah sakit dan tata kelola klinis serta pertanggungjawaban, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan di bidang kesehatan.

Ketentuan lebih lanjut mengenai organisasi dan tata hubungan kerja rumah sakit Daerah kabupaten serta pengelolaan keuangan rumah sakit Daerah kabupaten diatur dalam Peraturan Presiden.

f. Badan Daerah kabupaten merupakan unsur penunjang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah kabupaten. Badan Daerah kabupaten dipimpin oleh kepala badan Daerah kabupaten yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada bupati melalui sekretaris Daerah kabupaten. Badan Daerah kabupaten mempunyai tugas membantu bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah kabupaten.

Badan Daerah kabupaten dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi:

- penyusunan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
- pelaksanaan tugas dukungan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
- pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya
- pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang Urusan Pemerintahan Daerah sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati/walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Badan Daerah, terdiri dari :

1. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah merupakan unsur penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan;
2. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah merupakan unsur penunjang urusan pemerintahan bidang sub Keuangan dan Aset;
3. Badan Pendapatan Daerah merupakan unsur penunjang urusan pemerintahan sub bidang Pendapatan Daerah;
4. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia dengan merupakan unsur penunjang urusan pemerintahan sub bidang Kepegawaian dan Diklat;

5. Badan Penelitian Dan Pengembangan Daerah dengan merupakan unsur penunjang urusan pemerintahan bidang Penelitian Dan Pengembangan;
 6. Badan Penanggulangan Bencana Daerah dengan merupakan unsur penunjang urusan pemerintahan di bidang penanggulangan bencana; dan
 7. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dengan merupakan unsur penunjang Urusan Pemerintahan di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik.
- g. Kecamatan dibentuk dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa atau sebutan lain dan kelurahan. Kecamatan dipimpin oleh camat atau sebutan lain yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada bupati melalui sekretaris Daerah kabupaten.
- Camat sebagaimana juga menyelenggarakan tugas umum pemerintahan meliputi:
- a. menyelenggarakan Urusan Pemerintahan umum
 - b. mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
 - c. mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
 - d. mengoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Bupati/Walikota;
 - e. mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
 - f. mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat kecamatan;
 - g. membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan desa atau sebutan lain dan/atau kelurahan;
 - h. melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten/kota yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintahan Daerah kabupaten/kota yang ada di kecamatan; dan

- i. melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan.

Struktur organisasi pemerintahan kecamatan dan kelurahan, meliputi :

a). Kecamatan, terdiri dari :

1. Camat.
2. Sekretariat :
 - a. Sub Bagian Umum danKepegawaian.
 - b. Sub Bagian Perencanaan, Keuangan danPelaporan.
3. Seksi TataPemerintahan.
4. Seksi Pemberdayaan Masyarakat danDesa.
5. Seksi Ketentraman dan KetertibanUmum.
6. Seksi KesejahteraanSosial
7. Seksi Perekonomian danPembangunan
8. Kelompok Jabatan

Fungsional. b). Kelurahan, terdiri

dari:

1. Lurah.
2. Sekretariat.
3. SeksiPemerintahan.
4. Seksi Pembangunan dan PemberdayaanMasyarakat.
5. Seksi Ketentraman, Ketertiban PerlindunganMasyarakat.
6. Kelompok JabatanFungsional.

Sedangkan untuk lebih lengkapnya mengenai jumlah dan nama kecamatan dan kelurahan lingkup Pemerintah Kabupaten Wajo, yaitu :

1). Kecamatan Tempe, yang terdiri dari:

1. KelurahanTempe.
2. KelurahanCempalagi.
3. KelurahanTeddaopu.
4. KelurahanSalomenraleng.
5. KelurahanAttakaE.

6. KelurahanWiringpalanaE.
 7. KelurahanLaelo.
 8. KelurahanPaduppa.
 9. KelurahanSiengkang.
 10. KelurahanLapongkoda.
 11. KelurahanPattirosompe.
 12. KelurahanWatallipuE.
 13. KelurahanMaddukelleng.
 14. KelurahanSitampaE.
 15. KelurahanBulupabbulu.
 16. KelurahanMattiroappareng.
- 2). Kecamatan Sabbangparu, yang terdiri dari:
 1. KelurahanSompe.
 2. KelurahanWallenaE.
 3. KelurahanTalotenreng.
 - 3). Kecamatan Pammana, yang terdiri dari :
 1. KelurahanCina.
 2. KelurahanPammana.
 - 4). Kecamatan Tanasitolo, yang terdiri dari:
 1. Kelurahan BaruTancung.
 2. KelurahanTancung.
 3. KelurahanPincengpute.
 4. KelurahanMappadaelo.
 - 5). Kecamatan Gilireng, yang terdiri dari:
 1. KelurahanGilireng.
 - 6). Kecamatan Majauleng, yang terdiri dari:
 1. KelurahanParia.
 2. KelurahanLimpomajang.
 3. KelurahanMacanang.
 4. KelurahanUraiyang.

- 7). Kecamatan Pitumpanua, yang terdiri dari :
 1. KelurahanBulete.
 2. KelurahanSiwa.
 3. KelurahanTobarakka.
 4. KelurahanBenteng.
- 8). Kecamatan Maniangpajo, yang terdiri dari:
 1. KelurahanAnabanua.
 2. KelurahanDualipoE.
 3. KelurahanTangkoli.
- 9). Kecamatan Sajoanging, yang terdiri dari:
 1. KelurahanAkkajeng.
 2. KelurahanAssorajang.
 3. KelurahanMinangaE
- 10). Kecamatan Keera, yang terdiri dari:
 1. KelurahanBallere.
- 11). Kecamatan Bola, yang terdiri dari:
 1. KelurahanSolo.
- 12). Kecamatan Takkalalla, yang terdiri dari:
 1. KelurahanPeneki.
 2. KelurahanBocco.
- 13). Kecamatan Penrang, yang terdiri dari:
 1. KelurahanDoping.
- 14). Kecamatan Belawa, yang terdiri dari:
 1. KelurahanBelawa.
 2. KelurahanMacero.

1.4 ISU STRATEGIS DAERAH

Isu strategis merupakan salah satu pengayaan analisis lingkungan eksternal terhadap proses perencanaan. Apabila dinamika eksternal selama 5 (lima) tahun yang akan datang, dapat diidentifikasi dengan baik, maka pemerintahan daerah diharapkan dapat mempertahankan / meningkatkan pelayanan pada masyarakat. Pemerintahan daerah yang tidak menyelaraskan diri secara sepadan atas isu strategisnya kemungkinan akan menghadapi potensi kegagalan dalam melaksanakan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang akan menjadi tanggungjawabnya atau gagal dalam melaksanakan pembangunan daerah.

Pengayaan analisis lingkungan eksternal terhadap proses perencanaan salah satunya dijawab melalui pengembangan berbagai sistem informasi pembangunan sehingga diharapkan semua informasi pembangunan dapat diakses dengan mudah oleh seluruh *stakeholder*. Namun demikian upaya-upaya untuk mencermati peluang dan ancaman yang timbul dari lingkungan eksternal perlu dilakukan secara berkesinambungan agar dapat mengambil kebijakan dan langkah-langkah antisipatif dalam menghadapi hambatan dan permasalahan pembangunan. Kesenjangan antara nilai-nilai filosofi dan kenyataan yang terjadi dimasyarakat masih cukup tinggi, sehingga perlu segera disikapi, diantisipasi agar kesenjangan tidak semakin lebar.

Isu Strategis Dinamika Internasional

Dalam penyelenggaraan pembangunan daerah, dapat ditemukan beberapa kondisi yang dapat mempengaruhi kebijakan yang akan ditempuh. Kondisi tersebut bersifat eksternal atau kondisi dari luar yang tidak dapat dikontrol sepenuhnya, namun dapat diantisipasi dampaknya ataupun dapat dioptimalkan peluang yang ditimbulkannya. Kondisi eksternal tersebut umumnya berlaku secara nasional maupun internasional dan berdampak secara langsung dan berdimensi waktu yang panjang yang akan mempengaruhi perjalanan pelaksanaan pembangunan, sehingga memerlukan perhatian khusus. Beberapa isu strategis global yang dapat mempengaruhi kebijakan pembangunan di daerah sebagai berikut.

1. Perubahan Iklim dan Bencana Alam

Masalah lingkungan hidup berkelanjutan dengan beberapa faktor yang mempengaruhinya antara lain faktor iklim, faktor temperatur, faktor curah hujan, faktor kelembaban, faktor tekanan udara dan lain-lain. Akan tetapi selain faktor dimaksud, aktivitas manusia juga mempengaruhi masalah lingkungan hidup berkelanjutan terutama perubahan iklim dan bencana alam. Hal ini dapat dilihat dari maraknya penebangan hutan secara liar yang mempengaruhi perubahan suhu dan curah hujan secara lokal. Ketika area hutan yang hilang semakin luas, maka akibat yang ditimbulkan bukan lagi lokal tapi sudah berskala regional.

Pemanfaatan dan eksploitasi sumber daya alam yang tidak diimbangi oleh upaya penanggulangan yang mengatasnamakan kesejahteraan hidup manusia tampaknya akan berdampak negatif terhadap keberlangsungan lingkungan hidup. Hal ini tidak hanya mengancam keberlangsungan lingkungan alam, tetapi juga keberlangsungan hidup manusia sendiri. Isu pemanasan global dan perubahan iklim hanyalah sebagian dari sekian banyak isu lingkungan untuk diperhatikan yang tidak hanya bersifat lokal tetapi global, demikian halnya dengan Indonesia. Di Indonesia masih menghadapi tantangan besar di mana model pembangunan ekonomi yang dikembangkan telah menggerakkan pembangunan ekonomi yang cenderung bersifat ekstraktif atau mengandalkan eksploitasi sumberdaya alam secara langsung. Bahkan ada kecenderungan besar di mana upaya mempertahankan fungsi lingkungan dan pemanfaatan sumber daya alam secara lestari masih jauh dari yang diharapkan.

Penyebab Pemanasan Global ini cukup kompleks, meliputi meningkatnya gas rumah kaca seperti CO₂ dan Metana yang berasal dari Industri, Kendaraan bermotor dan makhluk hidup penghasil metana alamiah seperti bakteri. Selain itu juga terjadinya kerusakan hutan alami akibat alih fungsi hutan menjadi pemukiman, industri, Pertanian dan fungsi lainnya. Sehingga luas hutan setiap tahunnya terus berkurang yang berakibat meningkatnya jumlah gas rumah kaca karena fungsi hutan sebagai paru-paru dunia berkurang.

Eksploitasi hutan yang dilakukan masyarakat sekitar kawasan hutan

juga tidak luput dari factor kondisi sosial ekonomi masyarakat. Oleh sebab itu, usaha untuk menghentikan perusakan hutan tidak cukup dilakukan hanya dengan menghentikan kegiatan yang sifatnya merusak saja, melainkan juga dituntut untuk melawan kecenderungan yang terjadi dengan berbagai macam usaha rehabilitasi lahan dan hutan yang telah rusak.

Dalam rangka mengantisipasi berbagai dampak negatif yang ditimbulkan, maka sangat dibutuhkan adanya suatu sistem pengelolaan dan pemberdayaan ekonomi masyarakat sekitar kawasan hutan yang efisien dan berwawasan lingkungan, yang mampu memanfaatkan potensi sumberdaya setempat secara optimal. Sehingga masyarakat memiliki kepedulian dan tanggung jawab dalam menjaga hutan tersebut.

2. Terorisme global

Aksi-aksi kekerasan terorisme internasional di berbagai belahan dunia, termasuk di Indonesia akan menjadi ancaman dan tantangan terbesar bagi pelaksanaan kebijakan politik luar negeri Indonesia di masa mendatang. Di tingkat bilateral Indonesia terus dituntut untuk meningkatkan kerjasama dengan berbagai negara seperti Australia, AS, Jepang dan negara-negara tetangga Asia Tenggara lainnya untuk meningkatkan kemampuan aparaturnegara dalam memerangi terorismeinternasional.

Masalah kejahatan yang berbentuk kejahatan trans nasional seperti penyelundupan, perdagangan narkotika, penyelundupan manusia merupakan ancaman serius bagi negara seperti Indonesia yang memiliki posisi geografis yang strategis bagi suburnya pertumbuhan jenis-jenis kejahatan lintas batas tersebut. Karena itu, sebagai negara asal maupun transit bagi operasi tindak kejahatan trans nasional, Indonesia dituntut untuk terus meningkatkan upaya-upaya dalam menekan kejahatan lintas batas tersebut melalui suatu format kerjasama dengan negara-negara tetangga secara komprehensif.

Hal yang sama juga berlaku di tingkat regional, misalnya ASEAN di mana Indonesia perlu mendorong berlanjutnya kerjasama kongkrit antar negara dalam pemberantasan terorisme internasional. Masalah terorisme tidak dapat dipisahkan dari isu radikalisme dan kemiskinan. Karena itu, penanganan isu terorisme mesti menyentuh isu-isu kesejahteraan, penciptaan kehidupan yang lebih baik dan penyelenggaraan dialog antaragama yang konstruktif. Dalam masalah kecenderungan penggunaan kekerasan dan ancamanterorisme

internasional, masyarakat internasional memang memerlukan soliditas sikap dalam memerangi tindakan yang tidak manusiawi tersebut. Namun demikian, pada saat bersamaan masyarakat dunia juga dituntut untuk menekuni kemungkinan akar permasalahan sesungguhnya yang menjadi pemicu utama menguatnya aksi-aksi kekerasan internasional dewasa ini.

3. Perdagangan Bebas

Globalisasi telah merambah hampir disemua ranah kehidupan masyarakat, baik itu bidang ekonomi, politik, ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK), budaya, pendidikan dan lain-lain. Walaupun istilah globalisasi telah menjadi suatu kosakata yang umum, tetapi suka atau tidak suka, masyarakat diseluruh pelosok dunia sekarang ini telah hidup dalam suatu habitat global, transparan, tanpa batas, saling mengait (*linkage*), dan saling ketergantungan (*interdependence*). Skenario liberalisasi melalui perjanjian perdagangan bebas memberikan dampak keseluruhan pelosok negeri. Contoh globalisasi yang nyata dirasakan saat ini seperti masuknya barang-barang impor dari China dan negara-negara ASEAN lainnya akan menyerbu sampai ke desa-desa. Indonesia sekarang ini berada didalam kondisi yang sangat terbuka dan sangat bersaing.

Dengan diberlakukannya Perdagangan Bebas banyak memberi dampak terhadap kehidupan sosial masyarakat. Dunia yang tanpa batas, keluar masuk barang yang intens serta interaksi dengan dunia luar disatu sisi memberikan dampak positif bagi perkembangan masyarakat melalui upaya peningkatan kualitas dan inovasi produk lokal. Namun disisi yang lain, pemberlakuan ini dapat menambah penderitaan sebagian besar masyarakat Indonesia yang masih berada dibawah garis kemiskinan. Mereka digiring kepada sebuah dunia dimana kekuatan pasar menjadi panglima. Hilangnya subsidi dan peranan dari negara dalam bidang ekonomi berdampak *multiplier effect* pada kemiskinan yang meningkat dan akan mengarah pada tingginya angka kriminal. Hal ini mengakibatkan kerja keras pemerintah, yakni mengerjakan dua hal sekaligus, yakni perbaikan ekonomi dan sekaligus melakukan reformasi terhadap masalah-masalah sosial.

Kondisi sosial ekonomi serta semua potensi yang ada pada masyarakat Sulawesi Selatan, diharapkan pemerintah dapat menempuh suatu kebijakan yang rasional untuk mengantar masuk dalam kancah perekonomian global.

4. Demokrasi dan HAM

Setiap tahun gelombang kesadaran eksistensi kehadiran manusia dimasyarakatnya semakin meningkat seiring dengan meningkatnya pendidikan dan informasi. Peningkatan peran di masyarakat seperti demokratisasi akan terus berlangsung dan tidak akan mungkin dapat dicegah kemajuannya. Pemerintah-pemerintah otoriter di dunia walaupun belum dapat runtuh seluruhnya diperkirakan akan mengalami perlemahan yang serius. Keberhasilan negara otoriter pada tahun-tahun sebelumnya dalam mencegah demokratisasi, seperti halnya yang terjadi di beberapa negara bekas Uni Soviet, Afrika Utara dan Asia Selatan, hanya akan menunda sebentar keberhasilannya. Saat ini gelombang demokrasi sedang melanda negara-negara di Timur Tengah dan efek domino yang ditimbulkannya menjadi permasalahan yang bermuara pada persoalan kemanusiaan. Bahkan negara-negara demokrasi maju sekalipun sedang mengalami dinamika-dinamika koreksi dalam hal demokrasi, berkaitan dengan peran negara dan masyarakat sipil.

5. Human Trafficking.

Kasus tindak pidana perdagangan orang saat ini terus terjadi, dimana negara Indonesia menjadi bagian dari praktek ini. Tindak kejahatan terhadap kemanusiaan ini terjadi sejak di daerah atau negara asal, daerah transit hingga ke daerah atau negara tujuan. Keterbatasan ekonomi, minimnya tingkat pendidikan sering kali menjadi dasar alasan kelompok ini terjerat dalam *human trafficking*. Beragam cara dipakai pelaku untuk menarik dan mengontrol korban diantaranya janji pekerjaan bergaji tinggi, hingga ancaman kekerasan. Hal tersebut banyak terjadi karena adanya masalah ketidakseimbangan hubungan negara-negara maju dengan negara-negara berkembang khususnya dalam konteks hubungan perdagangan dan ekonomi. Sebagai perbandingan bahwa Perdagangan Orang dan Penyelundupan Manusia merupakan kejahatan dengan nilai keuntungan terbesar ke-3 (tiga) setelah kejahatan Penyelundupan Senjata dan Peredaran Narkoba.

Di Indonesia praktek ini dapat terjadi dengan modus pengiriman tenaga kerja ke luar negeri, dimana 2 (dua) komponen yang saling memperkuat yakni antara kurangnya lapangan kerja yang tersedia dan rendahnya ketrampilan yang dimiliki. Sulawesi Selatan dapat mengambil peran dalam mengurangi dampak dari hal ini dengan upaya penciptaan lapangan kerja dan peningkatan keterampilan tenaga kerja.

6. Sustainable Development Goals(SDGs)

SDG merupakan kelanjutan dari apa yang sudah dibangun pada MDGs (Millenium Development Goals) untuk meneruskan dan memantapkan MDGs agar lebih berkelanjutan dan selamanya. SDGs memiliki 5 pondasi yaitu manusia, planet, kesejahteraan, perdamaian, dan kemitraan yang ingin mencapai tiga tujuan mulia di tahun 2030 berupa mengakhiri kemiskinan, mencapai kesetaraan dan mengatasi perubahan iklim. Untuk mencapai tiga tujuan mulia tersebut, disusunlah 17 Tujuan Global berikut ini:

1. Mengakhiri segala bentuk kemiskinan di manapun di seluruh penjuru dunia.
2. Mengakhiri kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan meningkatkan gizi, serta mendorong pertanian yangberkelanjutan.
3. Menjamin kehidupan yang sehat dan mendorong kesejahteraan bagi semua orang di segalaumur.
4. **Pendidikan Berkualitas.** Menjamin pemerataan pendidikan yang berkualitas dan meningkatkan kesempatan belajar untuk semua orang, menjamin pendidikan yang inklusif dan berkeadilan serta mendorong kesempatan belajar seumur hidup bagi semua orang.
5. **Kesetaraan Gender.** Mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan kaum ibu dan perempuan.
6. **Air Bersih dan Sanitasi.** Menjamin ketersediaan air bersih dan sanitasi yang berkelanjutan untuk semuaorang.
7. **Energi Bersih dan Terjangkau.** Menjamin akses terhadap sumber energi yang terjangkau, terpercaya, berkelanjutan dan modern untuk semua orang.

8. **Pertumbuhan Ekonomi dan Pekerjaan yang Layak.** Mendukung perkembangan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif, lapangan kerja yang penuh dan produktif, serta pekerjaan yang layak untuk semua orang.
9. **Industri, Inovasi dan Infrastruktur.** Membangun infrastruktur yang berkualitas, mendorong peningkatan industri yang inklusif dan berkelanjutan serta mendorong inovasi.
10. **Mengurangi Kesenjangan.** Mengurangi ketidaksetaraan baik di dalam sebuah negara maupun di antara negara-negara di dunia.
11. **Keberlanjutan Kota dan Komunitas.** Membangun kota-kota serta pemukiman yang inklusif, berkualitas, aman, berketahanan dan berkelanjutan.
12. **Konsumsi dan Produksi Bertanggung Jawab.** Menjamin keberlangsungan konsumsi dan pola produksi.
13. **Aksi Terhadap Iklim.** Bertindak cepat untuk memerangi perubahan iklim dan dampaknya.
14. **Kehidupan Bawah Laut.** Melestarikan dan menjaga keberlangsungan laut dan kehidupan sumber daya laut untuk perkembangan pembangunan yang berkelanjutan.
15. **Kehidupan di Darat.** Melindungi, mengembalikan, dan meningkatkan keberlangsungan pemakaian ekosistem darat, mengelola hutan secara berkelanjutan, mengurangi tanah tandus serta tukar guling tanah, memerangi penggurunan, menghentikan dan memulihkan degradasi tanah, serta menghentikan kerugian keanekaragaman hayati.
16. **Institusi Peradilan yang Kuat dan Kedamaian.** Meningkatkan perdamaian termasuk masyarakat untuk pembangunan berkelanjutan, menyediakan akses untuk keadilan bagi semua orang termasuk lembaga dan bertanggung jawab untuk seluruh kalangan, serta membangun institusi yang efektif, akuntabel, dan inklusif di seluruh tingkatan.
17. **Kemitraan untuk Mencapai Tujuan.** Memperkuat implementasi dan menghidupkan kembali kemitraan global untuk pembangunan yang berkelanjutan.

1.5 Sistematika Penulisan

Untuk menggambarkan kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Wajo Tahun 2019, LKjIP Kabupaten Wajo Tahun 2019 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi pengantar LKjIP Tahun 2019 berupa Keadaan Aparat Pemerintah dilingkungan Kabupaten Wajountuk mendukung kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat, kewenangan, Tugas Pokok Organisasi serta Struktur Organisasi Berdasarkan Perda Nomor 6 Tahun 2016, dan Isu-isu Strategis.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Bab ini berisi gambaran umum uraian Rencana Strategis yang menjabarkan Visi, Misi, dan Tujuan serta Sasaran-sasaran yang akan dicapai dalam konteks rencana jangka menengah, Rencana Kerja Instansi Pemerintah Daerah Tahun 2019, serta Rencana Kinerja Tahun 2019, sebagai gambaran dan acuan dalam penyusunan LKjIP Tahun 2019, yang memuat program, kegiatan, dan target capaian dalam upaya pencapaian Sasaran Strategis Instansi Pemerintah serta Perjanjian Kinerja Tahun 2019.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Bab ini berisi uraian evaluasi capaian kinerja per-sasaran dan pertujuan, analisis capaian kinerja per-sasaran dan per-tujuan, termasuk termasuk faktor pendorong keberhasilan, permasalahan, kendala utama, dan langkah strategi penanganannya serta perbandingan capaian kinerja dengan tahun sebelumnya. Selain itu disajikan pula akuntabilitas keuangan yang menggambarkan realisasi anggaran dalam mendukung pelaksanaan kegiatan tahun 2019 terkait dengan tugas pokok dan tugas-tugas strategis lainnya.

BAB IV PENUTUP

Bab ini berisi ringkasan dari tinjauan pelaksanaan kegiatan dan kinerja Sekretariat Daerah Tahun 2019 yang dirangkum ke dalam kesimpulan terhadap Akuntabilitas Kinerja serta Rencana Tindak Lanjutnya.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Data-data pendukung penjelasan hasil evaluasi dan analisis capaian kinerja perangkat daerah pada tahun 2019.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1 Visi

Berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010, Visi dalam RPJMD adalah visi kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih yang disampaikan pada waktu pemilihan kepala daerah. Pedoman utama penyusunan visi kepala daerah adalah kesesuaian dengan sasaran pokok dan arah kebijakan pembangunan Tahap Ketiga RPJPD Kabupaten Wajo tahun 2005-2025. Untuk mencapai indikator dan target dari sasaran pokok sangat bergantung pada arah kebijakan dan prioritas pembangunan.

Visi merupakan arah pembangunan atau kondisi masa depan daerah yang ingin dicapai dalam 5 (lima) tahun mendatang (*clarity of direction*). Visi juga harus menjawab permasalahan pembangunan daerah dan / atau isu strategis yang harus diselesaikan dalam jangka menengah serta sejalan dengan visi dan arah pembangunan jangka panjang daerah. Adapun visi RPJPD Kabupaten Wajo tahun 2005 – 2025 sebagaimana tertuang dalam 9 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 8 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Wajo Tahun 2005-2025, adalah :

“Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat Wajo dengan Jiwa Kemandirian dan Pemerintah yang Demokratis Bernafaskan Keagamaan”

Melihat pada visi RPJPD Kabupaten Wajo di atas, dengan mempertimbangkan arah pembangunan jangka panjang daerah, kondisi, permasalahan dan tantangan pembangunan yang dihadapi serta isu-isu strategis baik global, nasional, regional dan daerah, maka visi RPJMD Kabupaten Wajo Tahun 2014 - 2019, yaitu:

“Wajo yang Berkarakter Religius, Produktif, Unggul, Sejahtera dan Aman”

Berdasarkan rumusan visi RPJMD Kabupaten Wajo 2014-2019, terdapat 4 (empat) pokok visi yakni berkarakter religius, produktif, unggul, sejahtera dan aman. Penjelasan dari setiap pokok visi tersebut, sebagai berikut.

Berkarakter religius adalah kondisi masyarakat bersama aparat pemerintah daerah lima tahun ke depan yang memiliki sikap dan perilaku berbasis kearifan budaya lokal Wajo yang senantiasa dinafasi oleh kehidupan keagamaan yang kuat. Kearifan budaya lokal dimaksud adalah nilai sosial-budaya yang dianut masyarakat secara turun temurun dan perlu terus diaktualkan yakni nilai *sipakatau* (saling memanusiaikan), *sipakalebbi* (saling menghargai) dan *sipakaingeng* (saling mengingatkan). Karakter religius sebagai modal dasar pengembangan sumberdaya manusia Kabupaten Wajo ini dapat berkembang jika kualitas pendidikan dan kesehatan masyarakat cukup tinggi dan merata pada seluruh wilayah sehingga sejalan dengan pandangan leluhur orang Wajo bahwa *maccapa na warani, malempu na magetteng* (hanya dengan kecerdasan seseorang akan berani, lurus dan teguh pendirian).

Produktif adalah kondisi masyarakat yang memanasifestasikan etos kerja *yassiwajori* dan akhirnya menumbuhkan sikap kemandirian. Produktif dalam pengertian lebih luas adalah jiwa, sikap dan perilaku yang senantiasa berorientasi pada efisiensi dan efektifitas sehingga pendapatan masyarakat meningkat dan perekonomian daerah tumbuh secara konsisten melampaui pertumbuhan ekonomi rata-rata Provinsi Sulawesi Selatan.

Unggul adalah kondisi dimana produk/komoditas unggulan berkembang dengan daya saing yang tinggi pada pusat-pusat pertumbuhan ekonomi berbasis masyarakat, baik pada sektor pertanian maupun

industri kreatif. Pusat-pusat pertumbuhan ekonomi ini secara kewilayahan berinterkoneksi satu sama lain dengan dukungan infrastruktur transportasi dan perhubungan, irigasi dan sumberdaya air, serta kondisi lingkungan hidup pada wilayah perkotaan, pesisir, sungai dan danau yang terjaga kelestarian fungsifungsinya. Keunggulan ini dapat dicapai bila manusia Wajo cerdas dan sehat (*macca na paulle*) sehingga daya saing daerah juga tinggi.

Sejahtera

adalah taraf hidup masyarakat yang berada di atas pemenuhan kebutuhan dasar baik dilihat dari kemakmuran ekonomi maupun kesejahteraan sosial dengan senantiasa mendapatkan rakhmat (*pammase*) dari Allah SWT. Ini ditandai dengan pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan merata, kemiskinan yang terus berkurang, pendapatan masyarakat yang terus meningkat.

Aman

adalah suatu tatanan kehidupan yang diharapkan senantiasa tercipta dari pembinaan ketertiban masyarakat, terbukanya ruang kehidupan politik dan pemerintah yang demokratis, terjalinnya kemitraan yang harmonis antara DPRD dan Pemerintah Daerah serta berperannya semua stakeholder dalam setiap proses penentuan kebijakan pembangunan daerah. Rasa aman dan tenteram ini senantiasa dibangun dengan prinsip kehidupan dalam tatanan kearifan lokal budaya Wajo : *Maradeka to Wajoe Taro Pasoro Gaukna, Naisseng Alena, Ade'na Na Popuang.*

2.2 Misi

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya pokok yang hendak dijalankan untuk mewujudkan visi. Misi disusun dalam rangka mengimplementasikan langkah-langkah yang akan dilakukan dalam mewujudkan visi yang telah dipaparkan di atas. Rumusan misi merupakan penggambaran visi yang ingin dicapai dan menguraikan upaya-upaya apa yang harus dilakukan. Rumusan misi disusun untuk memberikan kerangka bagi tujuan dan sasaran serta arah kebijakan yang ingin dicapai dan menentukan jalan yang akan ditempuh untuk mencapai visi.

Rumusan misi disusun dengan memperhatikan faktor-faktor lingkungan strategis, baik eksternal dan internal yang mempengaruhi serta kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan yang ada dalam pembangunan daerah. Misi disusun untuk memperjelas jalan atau langkah yang akan dilakukan dalam rangka mencapai perwujudan visi. Olehnya itu, maka rumusan misi RPJMD Kabupaten Wajo 2014 - 2019 dapat dipaparkan seperti berikut.

Misi 1 : Mengembangkan kualitas SDM yang sehat, cerdas dan berkarakter religius untuk mampu bersaing secara regional dan nasional.

Misi ini mencakup upaya-upaya pokok terkait pengembangan kehidupan beragama, pembangunan kebudayaan, pembangunan pendidikan, pembangunan kesehatan, penguatan daya saing tenaga kerja, pembinaan pemuda dan olah raga, pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan, dan pembinaan kesejahteraan keluarga.

Misi 2 : Meningkatkan akselerasi pembangunan infrastruktur dalam mendukung pengembangan pusat-pusat produksi pertanian dan pemasaran komoditas unggulan untuk percepatan kesejahteraan masyarakat.

Misi ini mencakup upaya-upaya pokok dalam peningkatan infrastruktur wilayah khususnya transportasi dan perhubungan, infrastruktur pembangunan irigasi dan sumberdaya air, serta infrastruktur pemukiman dan lingkungan hidup, peningkatan produksi pertanian dan perkebunan, pengembangan agribisnis dan

agroindustri, pengembangan peternakan dan perikanan, dan pengembangan industri kreatif.

Misi 3 : Menciptakan kondisi yang kondusif untuk pertumbuhan ekonomi berbasis masyarakat sehingga dapat mendorong peningkatan pendapatan rakyat dan daerah.

Misi ini mencakup upaya-upaya pokok dalam peningkatan pendapatan daerah, perbaikan investasi, pengembangan perdagangan, pengembangan koperasi dan UKM, pengembangan industri kreatif dan kerajinan rakyat, pengelolaan energi dan sumberdaya mineral, pengembangan pariwisata, pengelolaan lingkungan hidup.

Misi 4 : Mengembangkan sistem perencanaan yang partisipatif untuk mendukung kebijakan pembangunan berorientasi lingkungan hidup berbasis pedesaan dan perkotaan.

Misi ini mencakup upaya-upaya pokok dalam perbaikan sistem perencanaan pembangunan daerah, pengawasan pelaksanaan pembangunan dan pemerintahan, perbaikan sistem administrasi keuangan daerah, pemberdayaan masyarakat dan penguatan pemerintahan desa.

Misi 5 : Meningkatkan kualitas tatanan kehidupan yang religius, demokratis dan berkeadilan untuk menciptakan kehidupan masyarakat yang aman dan tenteram.

Misi ini mencakup upaya-upaya pokok dalam pemeliharaan ketertiban, ketenteraman dan kenyamanan dalam masyarakat, pembinaan organisasi sosial kemasyarakatan, pembinaan kehidupan politik dan demokrasi; penguatan kesatuan bangsa; penanganan konflik sosial; dan peningkatan kapasitas penanganan bencana.

Misi 6 : Meningkatkan kapasitas aparat dan kapabilitas kelembagaan pemerintah daerah dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik untuk melaksanakan pelayanan publik yang berkualitas.

Misi ini mencakup upaya-upaya pokok dalam pembinaan pemerintahan umum dan pemerintahan desa, peningkatan kompetensi dan kesejahteraan aparat pemerintahan daerah, peningkatan kapasitas kelembagaan DPRD, pengembangan sistem pelayanan publik satu atap, penataan keorganisasi dan kelembagaan SKPD.

2.3 Tujuan dan Sasaran

Tujuan dan sasaran adalah tahap perumusan sasaran strategis yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam Perubahan RPJMD Kabupaten Wajo 2014 - 2019 yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan arsitektur kinerja pembangunan daerah secara keseluruhan. Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi dengan menjawab isu strategis daerah dan permasalahan pembangunan daerah. Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan.

Rumusan tujuan dan sasaran merupakan dasar dalam menyusun pilihan-pilihan strategi pembangunan dan sarana untuk mengevaluasi pilihan tersebut. Selaras dengan penggunaan paradigma penganggaran berbasis kinerja, maka perencanaan pembangunan daerah pun menggunakan prinsip yang sama. Pengembangan rencana pembangunan daerah lebih ditekankan pada target kinerja, baik pada dampak, hasil, maupun keluaran dari suatu kegiatan, program, dan sasaran.

Berdasarkan visi, misi dan isu-isu strategis yang ada, maka ditetapkan tujuan dan sasaran yang hendak dicapai dalam kurun waktu 5 tahun adalah, sebagai berikut.

Tabel 2.1

Tujuan dan Sasaran RPJMD Kabupaten Wajo Pada Misi 1 (Pertama)

**Misi 1 : Mengembangkan kualitas sumber daya manusia yang sehat, cerdas dan berkarakter religius
untuk mampu bersaing secara regional dan nasional**

Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD	Target Kinerja Sasaran					Target Kinerja pada Akhir Periode RPJMD	
				2015	2016	2017	2018	2019		
Tujuan 1 : Meningkatkan keterpenuhan sarana ibadah										
1.	Meningkatnya keterpenuhan sarana ibadah	Tempat Ibadah berkualitas baik	Persentase	Persen						Persen
Tujuan 2 : Meningkatkan akses dan kualitas pendidikan										
2.	Meningkatnya indeks pendidikan	Rata-rata Lama Sekolah	Tahun	6,33 Tahun						Tahun
		Harapan Lama Sekolah	Tahun	12,51 Tahun						Tahun
		Angka Melek Huruf	Persentase	96,43 Persen						Persen
Tujuan 3 : Meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat										
3.	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Persentase kepesertaan JKN	Persentase	Persen						Persen

Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD	Target Kinerja Sasaran					Target Kinerja pada Akhir Periode RPJMD	
				2015	2016	2017	2018	2019		
	Angka Usia Harapan Hidup	Tahun	70,4 Tahun						Tahun	
Tujuan 4 : Memperkuat ketahanan budaya daerah										
4.	Meningkatnya kelestarian budaya lokal asli	Jumlah Situs Cagar Budaya yang ditetapkan sebagai Cagar Budaya Nasional	Jumlah	2 Cagar Budaya	0	0	0	1	0	2 Cagar Budaya
Tujuan 5 : Meningkatkan daya saing tenaga kerja										
5.	Meningkatnya kesempatan kerja	Tingkat pengangguran Terbuka	Persentase	3,72 Persen	5,39					5,25 Persen
Tujuan 6 : Meningkatkan prestasi keolahragaan										
6.	Meningkatnya prestasi keolahragaan	Jumlah cabang olahraga yang mendapatkan prestasi	Cabang Olah raga	Cabang Olah Raga						10 Cabang Olah Raga
Tujuan 7 : Meningkatkan kesetaraan gender, perlindungan anak dan kesejahteraan keluarga										
7.	Meningkatnya kesetaraan gender	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Skala							92 Persen
		Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	Skala							62 Persen

Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD	Target Kinerja Sasaran					Target Kinerja pada Akhir Periode RPJMD			
				2015	2016	2017	2018	2019				
Tujuan 8 : Meningkatkan tertib administrasi kependudukan dan pencatatan sipil												
8.	Meningkatnya tertib administrasi kependudukan dan catatan sipil	Penerapan KTP Nasional berbasis NIK	Persentase	69,26	Persen	71	76	80	85	90	90	Persen
		Persentase Kepemilikan Akta Nikah	Persentase		Persen							Persen
		Persentase Kepemilikan Akta Kelahiran	Persentase	10,79	Persen	20	35	50	60	75	75	Persen

Tabel 2.2
Tujuan dan Sasaran RPJMD Kabupaten Wajo Pada Misi 2 (Kedua)

Misi 2 : Meningkatkan akselerasi pembangunan infrastuktur dalam mendukung pengembangan pusat-pusat produksi pertanian dan pemasaran komoditas unggulan untuk percepatan kesejahteraan masyarakat

Sasaran (S)	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD	Target Kinerja Sasaran					Target Kinerja pada Akhir Periode RPJMD	
				2015	2016	2017	2018	2019		
Tujuan 9 : Meningkatkan kapasitas dan jangkauan sarana dan prasarana transportasi										
9. Meningkatnya kualitas infrastruktur jalan dan jembatan	Proporsi panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik	Persentase	51 Persen	53	56	60	63	66	66 Persen	
	Proporsi jumlah jembatan kabupaten dalam kondisi baik	Persentase	22,73 Persen						33,75 Persen	
Tujuan 10 : Meningkatkan kapasitas sarana dan prasarana perhubungan										
10. Meningkatnya kapasitas perhubungan	Kualitas pelabuhan Laut dan terminal kondisi baik	Unit	Unit						5 Unit	
	Rasio jumlah kendaraan dan panjang jalan	Persentase	Persen						Persen	
Tujuan 11 : Meningkatkan kapasitas jaringan irigasi										
11. Meningkatnya cakupan dan efektivitas layanan irigasi	Cakupan layanan irigasi	Persentase	27,86 Persen	28,50	30	32	34	35	35 Persen	
Tujuan 12 : Meningkatkan kualitas perumahan dan permukiman										

Sasaran (S)	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD	Target Kinerja Sasaran					Target Kinerja pada Akhir Periode RPJMD	
				2015	2016	2017	2018	2019		
12. Meningkatnya kualitas perumahan layak huni dan penataan permukiman kumuh	Lingkungan permukiman kumuh	Persentase	3,47 Persen	1,98	0,62	0,24	0,11	0,11	0,11 Persen	
	Rumah tangga bersanitasi	Persentase	86 Persen	88	91	93	96	98	98 Persen	
	Rasio rumah layak huni	Persentase	79,04 Persen	78,61	78,18	77,76	77,35	76,94	76,94 Persen	
Tujuan 13 : Meningkatkan kelestarian hutan dan lahan kritis serta kesejahteraan masyarakat di sekitar hutan										
13. Meningkatnya produksi telur ulat sutra dan kokon dengan didukung ketersediaan daun murbei dan tanaman konservasi	Persentase jumlah produksi Kain sutera hasil Alat Tenun Bukan Mesin (ATBM)	Persentase	75,58 Persen							100 Persen
	Jumlah produktifitas kokon	Kg	18 Kg	23	25	30	36	45	36 ton	
Tujuan 14 : Mengembangkan kawasan terpadu										
14. Meningkatnya pengembangan kawasan terpadu	Jumlah kawasan terpadu yang dibina dan dikembangkan	Kawasan	0 Kawasan	0	0	0	1	0	1 Kawasan	

Tabel 2.3
Tujuan dan Sasaran RPJMD Kabupaten Wajo Pada Misi 3 (Ketiga)

Misi 3 : Menciptakan kondisi yang kondusif untuk pertumbuhan ekonomi berbasis masyarakat sehingga dapat mendorong peningkatan pendapatan rakyat dan daerah

Sasaran (S)	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD	Target Kinerja Sasaran					Target Kinerja pada Akhir Periode RPJMD		
				2015	2016	2017	2018	2019			
Tujuan 15 : Meningkatkan daya saing perekonomian daerah dan ketahanan pangan daerah											
15. Meningkatnya daya saing ekonomi daerah	Nilai Ekspor	Milyar Rp	252,1 Milyar Rp	232,6	214,6	197,9	182,7	168,5	168,5	Milyar Rp	
	Nilai PDRB	Milyar Rp	Milyar Rp							Milyar Rp	
	Lama Tinggal Wisatawan	Hari	Hari							4	Hari
		Domestik	208,333 Domestik							216,668	Domestik
16. Meningkatnya ketahanan pangan daerah	Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	Persentase	72.3 Persen	76,9	81,5	86,1	90,8	94,4	90.8	Persen	
Tujuan 16 : Menurunkan tingkat kemiskinan daerah dan penanganan PMKS											
17. Menurunnya tingkat kemiskinan dan penanganan PMKS	Tingkat kemiskinan	Persentase	8,17 Persen							Persen	
	Penanganan PMKS	Persentase	88 Persen	90	90	95	95	100	100	Persen	
Tujuan 17 : Mengendalikan pertumbuhan penduduk											
18. Terkendalinya laju pertumbuhan penduduk	Rata - rata laju	Persentase	0.84 Persen							Persen	

	pertumbuhan penduduk								
	Rasio akseptor KB	Persentase	67,75 Persen	68,80	69,85	70,90	71,95	72,68	72,68 Persen

Tabel 2.4

Tujuan dan Sasaran RPJMD Kabupaten Wajo Pada Misi 4 (Empat)

Misi 4 : Mengembangkan sistem perencanaan yang partisipatif untuk mendukung kebijakan pembangunan berorientasi lingkungan hidup berbasis perdesaan dan perkotaan

Sasaran (S)	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD	Target Kinerja Sasaran					Target Kinerja pada Akhir Periode RPJMD	
				2015	2016	2017	2018	2019		
Tujuan 18 : Meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan daerah										
19.	Meningkatnya kesesuaian antar dokumen perencanaan	Persentase program RPJMD yang terakomodir dalam RKPD	Persentase	80 Persen	80	85	90	95	95	95 Persen
Tujuan 19 : Meningkatkan keberdayaan masyarakat										
20.	Meningkatnya keberdayaan desa	Jumlah Desa Mandiri	Jumlah	1 Desa	1	1	1	1	0	4 Desa
Tujuan 20 : Meningkatkan kualitas lingkungan hidup										

21.	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup yang berkelanjutan	Indeks Lingkungan Hidup	Skala	16,74						
		Ruang Terbuka Hijau	Persentase	0,49 Persen	0,50	0,51	0,52	0,53	0,54	0,54 Persen

Tabel 2.5
Tujuan dan Sasaran RPJMD Kabupaten Wajo Pada Misi 5 (Kelima)

Misi 5 : Meningkatkan kualitas tatanan kehidupan yang religius, demokratis dan berkeadilan untuk menciptakan kehidupan masyarakat yang aman dan tenteram

Sasaran (S)	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD	Target Kinerja Sasaran					Target Kinerja pada Akhir Periode RPJMD		
				2015	2016	2017	2018	2019			
Tujuan 21 : Meningkatkan kehidupan masyarakat yang aman dan tenteram											
22.	Meningkatnya ketertiban, ketenteraman, keamanan dan kenyamanan dalam masyarakat	Penyelesaian K3	Persentase	100 Persen	100	100	100	100	100	100	100 Persen
Tujuan 22 : Meningkatkan kerukunan hidup masyarakat											
23.	Meningkatnya kerukunan hidup bermasyarakat	Jumlah konflik SARA	Kasus	0 Kasus	0	0	0	0	0	0	Kasus

Tabel 2.6

Tujuan dan Sasaran RPJMD Kabupaten Wajo Pada Misi 6 (Keenam)

Misi 6 : Meningkatkan kapasitas aparat dan kapabilitas kelembagaan pemerintah daerah dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik untuk melaksanakan pelayanan publik yang berkualitas

Sasaran (S)	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD	Target Kinerja Sasaran					Target Kinerja pada Akhir Periode RPJMD	
				2015	2016	2017	2018	2019		
Tujuan 23 : Meningkatkan kompetensi sumber daya manusia aparatur dan kapasitas kelembagaan pemerintahan daerah										
24. Meningkatnya kompetensi sumber daya manusia aparatur dan kapasitas kelembagaan pemerintah daerah	Rasio lulusan S1/S2/S3	Persentase	4,78 Persen	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05 Persen
	Kapasitas kelembagaan pemerintah daerah yang baik	Kategori	48 OPD							OPD
Tujuan 24 : Mewujudkan sistem pelayanan publik yang memuaskan										
25. Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Rata-rata Indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan dasar	Kategori	B	B	B	B	B	B	B	B
Tujuan 25 : Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan bebas KKN										
26. Meningkatnya akuntabilitas	Opini BPK	Opini BPK	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP

Sasaran (S)	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD	Target Kinerja Sasaran					Target Kinerja pada Akhir Periode RPJMD
				2015	2016	2017	2018	2019	
kinerja dan keuangan daerah	terhadap laporan keuangan daerah								
	Nilai evaluasi AKIP	Kategori	CC	CC	CC	C	C	C	
	Nilai LPPD	Kategori	Sedang	Sedang	Sedang	Sedang	Sedang	Sedang	

2.4 Rencana Kerja Tahunan 2018

Rencana kerja tahun 2018 Kabupaten Wajo merupakan proses penyusunan rencana kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rencana strategik, yang akan dilaksanakan oleh Bagian-Bagian melalui berbagai kegiatan tahunan. Di dalam rencana kinerja ditetapkan rencana capaian kinerja tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan. Penyusunan rencana kinerja dilakukan seiring dengan agenda penyusunan dan kebijakan anggaran, serta merupakan komitmen bagi instansi untuk mencapainya dalam tahun tertentu.

Sebagaimana yang telah diuraikan mengenai tujuan dan sasaran Instansi Pemerintah Kabupaten Wajo yang telah dirumuskan dan ditetapkan didalam RPJMD 2014 - 2019 meliputi 25 Tujuan dan 26 Sasaran dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. **Sasaran Pertama**, Meningkatnya keterpenuhan sarana ibadah, program dan kegiatan ini dilaksanakan oleh **Bagian Kesra Sekretariat Daerah Kabupaten Wajo**, dengan Indikator kinerja :
 1. Tempat Ibadah berkualitas baik dengan target 623 Unit.
2. **Sasaran Kedua**, Meningkatnya indek pendidikan program dan kegiatan ini dilaksanakan oleh **Kerjasama Kementrian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dengan Badan Pusat Statistik**, dengan Indikator kinerja :
 1. Rata-Rata Lama Sekolah dengan Target 7,9 Tahun.
 2. Angka Melek huruf dengan target 92.30%
3. **Sasaran Ketiga**, Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat, program dan kegiatan ini dilaksanakan oleh **Kerjasama Kementrian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dengan Badan Pusat Statistik**, dengan Indikator kinerja :
 1. Presentase kepesertaan JKN dengan target 100%
 2. Angka Usia Harapan Hidup dengan target 67,05% per Tahun
4. **Sasaran Keempat**, Meningkatnya kesempatan kerja, program dan kegiatan ini dilaksanakan oleh **Badan Pusat Statistik**, dengan Indikator kinerja :

1. Tingkat Pengangguran Terbuka dengan target 5.27 %
5. **Sasaran Kelima**, Meningkatnya prestasi keolahragaan, program dan kegiatan ini dilaksanakan oleh **Dinas Pemuda dan Olahraga**, dengan Indikator kinerja :
 1. Jumlah cabang olahraga yang mendapatkan prestasi dengan target 10 Cabang Olahraga.
6. **Sasaran Keenam**, Meningkatnya kesetaraan gender, program dan kegiatan ini dilaksanakan oleh **Kerjasama Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dengan Badan Pusat Statistik**, dengan Indikator kinerja :
 1. Indeks Pembagunan Gender (IPG) dengan target 92%.
 2. Indeks Pemberdayaan Gender (IGD) dengan target 62 %
7. **Sasaran Ketujuh**, Meningkatnya tertib administrasi kependudukan dan catatan sipil, program dan kegiatan ini dilaksanakan oleh **Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil**, dengan Indikator kinerja :
 1. Penerapan KTP Nasional berbasis NIK dengan target 90 %
 2. Presentase Kepemilikan AKta Kelahiran dengan target 75 %
8. **Sasaran Kedelapan**, Meningkatnya kualitas infrastruktur jalanan dan jembatan, program dan kegiatan ini dilaksanakan oleh **Dinas Bina Bina Marga, Cipta Karya, Jasa Konstruksi dan Penataan Ruang**, dengan Indikator kinerja :
 1. Proporsi panjang jalan kabupaten dalam konsisi baik dengan target 66 %
 2. Proporsi jumlah jembatan kabupaten dalam kondisi baik dengan target 33.75 %
9. **Sasaran Kesembilan**, Meningkatnya kapasitas perhubungan program dan kegiatan ini dilaksanakan oleh **Dinas Perhubungan**, dengan Indikator kinerja :
 1. Kualitas pelabuhan Laut dan terminal kondisi baik dengan target 5 Unit
 2. Rasio jumlah kendaraan dan panjang jalan dengan target 0.00071 %

- 10. Sasaran Kesepuluh,** Meningkatnya cakupan dan efektivitas layanan irigasi, program dan kegiatan ini dilaksanakan oleh **Dinas Pengelola Sumber Daya Air**, dengan Indikator kinerja :
1. Cakupan layanan irigasi dengan target 10 %
- 11. Sasaran Kesebelas,** Meningkatnya kualitas perumahan layak huni dan penataan permukiman kumuh, program dan kegiatan ini dilaksanakan oleh **Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan**, dengan Indikator kinerja :
1. Lingkungan permukiman kumuh dengan target 5.53 %
 2. Rumah tangga bersanitasi dengan target 98 %
 3. Rasio rumah layak huni target 76,94 %
- 12. Sasaran Keduabelas,** Meningkatnya produksi telur ulat sutra dan kokon dengan didukung ketersediaan daun murbei dan tanaman konservasi, program dan kegiatan ini dilaksanakan oleh **Dinas Perindustrian dan Dinas Perkebunan**, dengan Indikator kinerja :
1. Presentase jumlah produksi Kain sutera hasil Alat Tenun Kunak Mesin (ATBM) dengan target 100 %
 2. Jumlah produktifitas kokon dengan target 36 Ton
- 13. Sasaran Ketigabelas,** Meningkatnya daya saing ekonomi daerah, program dan kegiatan ini dilaksanakan oleh **Badan Pusan Statistik dan Dinas Pariwisata**, dengan Indikator kinerja :
1. Nilai Ekspor dengan target Rp. 5730,80 Milyar,-
 2. Nilai PDRB (Pendapatan Domestik Regional Bruto) dengan target Rp 19.695.225,-
 3. Lama Tinggal Wisatawan dengan target 4 Hari
 4. Jumlah Kunjungan Wisatawan dengan target 72.782 Orang
- 14. Sasaran Keempatbelas,** Meningkatnya ketahanan pangan daerah, program dan kegiatan ini dilaksanakan oleh **Dinas Ketahanan Pangan**, dengan Indikator kinerja :
1. Skor Pola Pangan Harapan (PPH) dengan target 90.8 %
- 15. Sasaran Kelimabelas,** Menurunnya tingkat kemiskinan dan penanganan Pangan Masalah Kesejahteraan Sosial, program dan kegiatan ini dilaksanakan oleh **Dinas Sosial**, dengan Indikator kinerja :

1. Tingkat Kemiskinan dengan target 7.38 %
 2. Penanganan Masalah Kesejahteraan Sosial dengan target 100%
- 16. Sasaran Keenambelas,** Terkendalinya laju pertumbuhan penduduk, program dan kegiatan ini dilaksanakan oleh **Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana**, dengan Indikator kinerja :
1. Rata-rata laju pertumbuhan penduduk dengan target 0.84 %
 2. Rasio akseptor KB dengan target 76,10 %
- 17. Sasaran Ketujuhbelas,** Meningkatnya kesesuaian antar dokumen perencanaan, program dan kegiatan ini dilaksanakan oleh **Badan Perencanaan Pembangunan Daerah**, dengan Indikator kinerja :
1. Presentase program RPJMD yang terakomodir dalam RKPD dengan target 100 %
- 18. Sasaran Kedelapanbelas,** Meningkatnya kualitas lingkungan hidup yang berkelanjutan, program dan kegiatan ini dilaksanakan oleh **Dinas Lingkungan Hidup**, dengan Indikator kinerja :
1. Indeks Lingkungan Hidup dengan target 80.22 %
 2. Ruang Terbuka Hijau dengan target 19.27 %
- 19. Sasaran Kesembilanbelas,** Meningkatnya ketertiban, ketentraman, keamanan dan kenyamanan dalam masyarakat, program dan kegiatan ini dilaksanakan oleh **Satuan Polisi Pamong Praja**, dengan Indikator kinerja :
1. Penyelesaian K3 dengan target 96 %
- 20. Sasaran Keduapuluh,** Meningkatnya kerukunan hidup, program dan kegiatan ini dilaksanakan oleh **Badan Kesatuan Bangsa dan Politik**, dengan Indikator kinerja :
1. Jumlah Konflik SARA dengan target 0 konflik
- 21. Sasaran Keduapuluh satu,** Meningkatnya kompetensi sumber daya manusia aparatur dan kapasitas kelembagaan pemerintah daerah, program dan kegiatan ini dilaksanakan oleh **Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi dan Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Wajo**, dengan Indikator kinerja :

1. Rasio Lulusan S1/S2/S3 dengan target 0.05 %
2. Kapasitas kelembagaan pemerintah daerah yang baik dengan target 53 Organisasi Perangkat Daerah

22. Sasaran Keduapuluh dua, Meningkatnya kualitas pelayanan publik, program dan kegiatan ini dilaksanakan oleh **Dinas Penanaman Modal & Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Badan Pengelola**, dengan Indikator kinerja :

1. Rata-rata indeks Kepuasan masyarakat terhadap pelayanan dasar dengan target nilai "B"

23. Sasaran Kedua puluh enam, Meningkatnya Akuntabilitas kinerja dan Keuangan Daerah, program dan kegiatan ini dilaksanakan oleh **Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, dan Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Wajo**, dengan Indikator kinerja :

1. Opini BPK terhadap laporan keuangan daerah dengan target "WTP"
2. Nilai Evaluasi AKIP dengan target "C"
3. Nilai LPPD dengan target "Sedang"

Tabel 2.7
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019 KABUPATEN WAJO

SASARAN		N O	INDIKATOR KINERJA	TARGET TAHUN 2018	
1	Meningkatnya keterpenuhan sarana ibadah	1	Tempat Ibadah berkualitas baik	623	Unit
2	Meningkatnya indeks pendidikan	2	Rata-rata Lama Sekolah	7.90	%
		3	Angka Melek Huruf	99.30	%
3	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	4	Persentase Kepesertaan JKN	100	%
		5	Angka Usia Harapan Hidup	66.71	Tahun
4	Meningkatnya kesempatan kerja	6	Tingkat pengangguran Terbuka	5.27	%
5	Meningkatnya prestasi keolahragaan	7	Jumlah cabang olahraga yang mendapatkan prestasi	10-	Cabang Olahraga

6	Meningkatnya kesetaraan gender	8	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	92	%
		9	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	62	%
7	Meningkatnya tertib administrasi kependudukan dan catatan sipil	10	Penerapan KTP Nasional berbasis NIK	90	%
		11	Persentase Kepemilikan Akta Kelahiran	75	%
8	Meningkatnya kualitas infrastruktur jalan dan jembatan	12	Proporsi panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik	66	%
		13	Proporsi jumlah jembatan kabupaten dalam kondisi baik	33.75	%
9	Meningkatnya kapasitas perhubungan	14	Kualitas pelabuhan Laut dan terminal kondisi baik	5	Unit
		15	Rasio jumlah kendaraan dan panjang jalan	0.0071	%
10	Meningkatnya cakupan dan efektivitas layanan irigasi	16	Cakupan layanan irigasi	10	%
11	Meningkatnya kualitas perumahan layak huni dan penataan permukiman kumuh	17	Lingkungan permukiman kumuh	5.53	%
		18	Rumah tangga bersanitasi	98	%
		19	Rasio rumah layak huni	76.94	%
12	Meningkatnya produksi telur ulat sutera dan kokon dengan didukung ketersediaan daun murbei dan tanaman konservasi	20	Persentase jumlah produksi Kain sutera hasil Alat Tenun Bukan Mesin (ATBM)	100	%
		21	Jumlah produktifitas kokon	6 ³	Ton
13	Meningkatnya daya saing ekonomi daerah	22	Nilai Ekspor	5730.80	Milyar Rupiah
		23	Nilai PDRB (Pendapatan Domestik Regional Bruto)	19.695.225	Juta Rupiah
		24	Lama Tinggal Wisatawan	4	Hari
14	Meningkatnya ketahanan pangan daerah	25	Jumlah Kunjungan Wisatawan	72,782	Orang
		26	Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	90.8	%
15	Menurunnya tingkat kemiskinan dan penanganan PMKS	27	Tingkat kemiskinan	7.38	%
		28	Penanganan PMKS	100	%
16	Terkendalnya laju pertumbuhan penduduk	29	Rata - rata laju pertumbuhan penduduk	0.84	%
		30	Rasio akseptor KB	76.10	%

17	Meningkatnya kesesuaian antar dokumen perencanaan	31	Persentase program RPJMD yang terakomodir dalam RKPD	100	%
18	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup yang berkelanjutan	32	Indeks Lingkungan Hidup	80.22	%
		33	Ruang Terbuka Hijau	19.27	%
19	Meningkatnya ketertiban, ketenteraman, keamanan dan kenyamanan dalam masyarakat	34	Penyelesaian K3	100	%
20	Meningkatnya kerukunan hidup bermasyarakat	35	Jumlah konflik SARA	0	konflik
21	Meningkatnya kompetensi sumber daya manusia aparatur dan kapasitas kelembagaan pemerintah daerah	36	Rasio lulusan S1/S2/S3	0.05	%
		37	Kapasitas kelembagaan pemerintah daerah yang baik	53	OPD
22	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	38	Rata-rata Indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan dasar		B
23	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan daerah	39	Opini BPK terhadap laporan keuangan daerah		WTP
		40	Nilai evaluasi AKIP		C
		41	Nilai LPPD		Sedang

Sumber: Bappeda Kabupaten Wajo Tahun 2019

BAB III

PERENCANAAN KINERJA

3.1 PENGUKURAN KINERJA

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas/pemberi amanah.

Pemerintah Kabupaten Wajo selaku pengemban amanah masyarakat Kabupaten Wajo melaksanakan kewajiban berakuntabilitas melalui penyajian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Wajo yang dibuat sesuai dengan ketentuan yang terkandung dalam Perpres Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan tersebut diatas memberikan gambaran mengenai tingkat pencapaian Sasaran dan Program/Kegiatan, baik keberhasilan-keberhasilan kinerja yang telah dicapai maupun kegagalan pada tahun 2019.

Pengukuran tingkat capaian kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2019, dilakukan dengan cara membandingkan antara target kinerja sasaran dengan realisasi kinerja sasaran pada masing-masing indikator kinerja sasaran yang dicapai. Selanjutnya berdasarkan selisih Kinerja tersebut dilakukan evaluasi guna mendapatkan strategi yang tepat untuk peningkatan Kinerja dimasa yang akan datang. Skala pengukuran kinerja dipergunakan dalam memberikan penilaian tingkat capaian Kinerja setiap sasaran, dengan menggunakan skala pengukuran 4 (empat) kategori sebagai berikut :

Terdapat dua jenis skala penilaian pengukuran :

- a. Bilamana Indikator Sasaran mempunyai makna progres positif, maka skala yang digunakan sebagai berikut :

Tabel 3.1

Skor	Rentang Capaian	Kategori Capaian
4	Lebih dari 100%	Sangat Memuaskan
3	75% sampai 100%	Memuaskan
2	55% sampai 75%	Cukup Memuaskan
1	Kurang dari 55%	Kurang Memuaskan

- b. Bilamana Indikator Sasaran mempunyai makna progres negatif, maka skala yang digunakan sebagai berikut :

Tabel 3.2

Skor	Rentang Capaian	Kategori Capaian
1	Lebih dari 100%	Kurang Memuaskan
2	75% sampai 100%	Cukup Memuaskan
3	55% sampai 75%	Memuaskan
4	Kurang dari 55%	Sangat Memuaskan

Untuk mengukur keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang akan digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja, maka dalam laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Wajo Tahun 2019 ini akan dijelaskan capain indikator kinerja utama (IKU) yang mendukung pencapaian kinerja sasaran dalam RPJMD Kabupaten Wajo. Pencapaian kinerja IKU (Indikator Kinerja Utama) Pemerintah Daerah Kabupaten Wajo secara ringkas digambarkan sebagai berikut:

Tabel 3.3

**Pencapaian IKU (Indikator Kinerja Utama)
Kabupaten Wajo Tahun 2019**

SASARAN		NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET TAHUN 2019	REALISASI TAHUN 2019	CAPAIAN TAHUN 2019	NILAI
1	Meningkatnya keterpenuhan sarana ibadah	1	Tempat Ibadah berkualitas baik	623 Unit	623 Unit	99,84 %	Memuaskan
2	Meningkatnya indeks pendidikan	2	Rata-rata Lama Sekolah	7,90 %	7,90 %	100 %	Memuaskan
		3	Angka Melek Huruf	99,30 %	99,87 %	101 %	Sangat Memuaskan
3	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	4	Persentase kepesertaan JKN	100 %	100 %	100 %	Memuaskan
		5	Angka Usia Harapan Hidup	66,71 Tahun	66,52 %	99,72 %	Memuaskan
4	Meningkatnya kesempatan kerja	6	Tingkat pengangguran Terbuka	5,27 %	3,79 %	72,19 %	Cukup Memuaskan
5	Meningkatnya prestasi keolahragaan	7	Jumlah cabang olahraga yang mendapatkan prestasi	10 Cabang Olah raga	10 Cabang Olah Raga	100 %	Memuaskan
6	Meningkatnya kesetaraan gender	8	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	92 %	90,04 %	97,87 %	Memuaskan
		9	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	62 %	61,07 %	98,50 %	Memuaskan
7	Meningkatnya tertib administrasi kependudukan dan catatan sipil	10	Penerapan KTP Nasional berbasis NIK	90 %	98,69 %	109,95 %	Sangat Memuaskan
		11	Persentase Kepemilikan Akta Kelahiran	75 %	93,99 %	125,32 %	Sangat Memuaskan
8	Meningkatnya kualitas infrastruktur jalan dan jembatan	12	Proporsi panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik	66 %	36,22 %	59,87 %	Cukup Memuaskan
		13	Proporsi jumlah jembatan kabupaten dalam kondisi baik	33,75 %	36,22 %	107,31 %	Sangat Memuaskan
9	Meningkatnya kapasitas perhubungan	14	Kualitas pelabuhan Laut dan terminal kondisi baik	5 Unit	5 Unit	100 %	Memuaskan
		15	Rasio jumlah kendaraan dan panjang jalan	0,0071 %	0,0067 %	94,37 %	Memuaskan
10	Meningkatnya cakupan dan efektivitas layanan irigasi	16	Cakupan layanan irigasi	10 %	10 %	100 %	Memuaskan
11	Meningkatnya kualitas perumahan layak huni dan penataan permukiman kumuh	17	Lingkungan permukiman kumuh	5,53 %	5,40 %	97,65 %	Memuaskan
		18	Rumah tangga bersanitasi	98 %	10 %	102 %	Sangat Memuaskan
		19	Rasio rumah layak huni	76,84 %	95,54 %	124,17 %	Sangat Memuaskan

12	Meningkatnya produksi telur ulat sutra dan kokon dengan didukung ketersediaan daun murbei dan tanaman konservasi	20	Persentase jumlah produksi Kain sutera hasil Alat Tenun Bukan Mesin (ATBM)	100 %	0 10 %	100 %	Memuaskan
		21	Jumlah produktifitas kokon	36 Ton	2,1 Ton	5,83 %	Kurang Memuaskan
13	Meningkatnya daya saing ekonomi daerah	22	Nilai Ekspor	5730,80 Milyar Rupiah	6914,60 milyar Rupiah	120,65 %	Sangat Memuaskan
		23	Nilai PDRB (Pendapatan Domestik Regional Bruto)	19.695.225 Juta Rupiah	19.838.810 Juta Rupiah	100,73 %	Sangat Memuaskan
		24	Lama Tinggal Wisatawan	4 Hari	3 Hari	75 %	Memuaskan
		25	Jumlah Kunjungan Wisatawan	72.782 Orang	72.784 Orang	100 %	Memuaskan
14	Meningkatnya ketahanan pangan daerah	26	Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	90,8 %	3 90, %	99,44 %	Memuaskan
15	Menurunnya tingkat kemiskinan dan penanganan PMKS	27	Tingkat kemiskinan	7,38 %	0 7,5 %	101,62 %	Kurang Memuaskan
		28	Penanganan PMKS	100 %	0 3 %	30 %	Cukup Memuaskan
16	Terkendalinya laju pertumbuhan penduduk	29	Rata - rata laju pertumbuhan penduduk	0,84 %	0,24 %	28,57 %	Sangat Memuaskan
		30	Rasio akseptor KB	76.10 %	73.66 %	96.79 %	Memuaskan
17	Meningkatnya kesesuaian antar dokumen perencanaan	31	Persentase program RPJMD yang terakomodir dalam RKPD	100 %	100 %	100 %	Memuaskan
18	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup yang berkelanjutan	32	Indeks Lingkungan Hidup	80.22 %	80.88 %	100.82 %	Sangat Memuaskan
		33	Ruang Terbuka Hijau	19.27 %	20.01 %	103,84 %	Sangat Memuaskan
19	Meningkatnya ketertiban, ketenteraman, keamanan dan kenyamanan dalam masyarakat	34	Penyelesaian K3	96 %	96 %	100 %	Memuaskan
20	Meningkatnya kerukunan hidup bermasyarakat	35	Jumlah konflik SARA	0 konflik	0 konflik	100 %	Memuaskan
21	Meningkatnya kompetensi sumber daya manusia aparatur dan kapasitas kelembagaan pemerintah daerah	36	Rasio lulusan S1/S2/S3	0,05 %	70,45 %	140,900 %	Sangat Memuaskan
		37	Kapasitas kelembagaan pemerintah daerah yang baik	53 OPD	3 5 OPD	100 %	Memuaskan
22	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	38	Rata-rata Indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan dasar	B	B	100 %	Memuaskan
23	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan daerah	39	Opini BPK terhadap laporan keuangan daerah	WTP	WTP	100 %	Memuaskan
		40	Nilai evaluasi AKIP	C	CC	100 %	Memuaskan

	41	Nilai LPPD	Sedang	Sangat Tinggi	100 %	Memuaskan
--	----	------------	--------	---------------	-------	-----------

*Keterangan Tabel : Indikator Kinerja nomor 27, 28, dan 29 merupakan indikator sasaran yang mempunyai makna progres negatif (lihat Tabel 3.2)

Keterangan Warna :

- = Sangat Memuaskan (lebih dari 100%)
- = Memuaskan (75% sampai 100%)
- = Cukup Memuaskan (55% sampai 75%)
- = Kurang Memuaskan (Kurang dari 55%)

Diagram 1 Capaian IKU (Indikator Kinerja Utama)

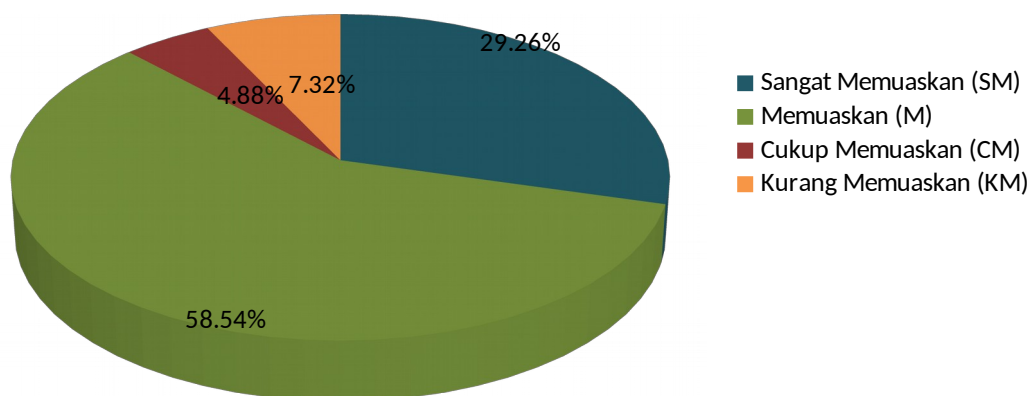


Diagram 1 Capaian IKU

Indikator Kinerja Utama (IKU) yang mendukung sasaran strategis dalam RPJMD Kabupaten Wajo Tahun **2014-2019** sebanyak **41 (empat puluh satu)** indikator, dan dari jumlah tersebut dapat dibagi berdasarkan kriteria sebagai berikut:

- **Sangat Memuaskan (lebih dari 100 persen) sebanyak 12 indikator**
- **Memuaskan (capaian di antara 75 persen-100 persen) sebanyak 24 indikator**

- Cukup memuaskan (capaian di atas 60 persen-90 persen) sebanyak 3 indikator
- Kurang memuaskan (capaian kurang dari 55 persen) sebanyak 2 indikator

Dari 41 IKU di atas, kinerja yang dicapai menunjukkan bahwa **29,26%** telah memenuhi kriteria sangat memuaskan, **58,54%** telah memenuhi kriteria memuaskan, **7,32%** termasuk kriteria cukup memuaskan, **4,88%** masuk kriteria kurang memuaskan. Analisis keberhasilan dan kegagalan pencapaian IKU Kabupaten Wajo Tahun 2019 akan dijelaskan pada analisis capaian kinerja sasaran strategis di bawah.

3.2. Capaian Kinerja

Dari hasil pengukuran dan evaluasi kinerja Secara umum Pemerintah Kabupaten Wajo tahun 2019 dapat dikemukakan bahwa sebagian besar sasaran-sasaran strategis yang telah ditargetkan dapat dicapai, namun demikian masih terdapat sasaran strategis yang belum mencapai target yang diharapkan tahun 2019 dengan berbagai kendala. Rincian analisis capaian masing-masing sasaran strategis dapat diuraikan sebagai berikut:

3.2.1 Perbandingan Antara Target Dan Realisasi Kinerja Tahun Ini

Sasaran 1

Analisis pencapaian **Sasaran 1: Meningkatnya Keterpenuhan Sarana Ibadah**, dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 3.4 Meningkatnya Keterpenuhan Sarana Ibadah

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahun 2019	Realisasi Tahun 2019	Capaian (%)
Meningkatnya Keterpenuhan Sarana Ibadah	Tempat Ibadah berkualitas baik	Unit	623	622	99,84
Rata-rata capaian					99,84

Dari indikator kinerja yang mendukung sasaran strategis ini, indikator kinerja sasaran mencapai target. secara umum rata-rata pencapaian sasaran

Meningkatnya Keterpenuhan Sarana Ibadah ini telah berhasil memenuhi target yaitu dengan rata – rata capaian **99,84%**. (Lampiran 2).

Sasaran 2

Analisis pencapaian **Sasaran 2 :Meningkatnya Indeks Pendidikan**, dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 3.5 Meningkatnya Indeks Pendidikan

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahun 2019	Realisasi Tahun 2019	Capaian (%)
Meningkatnya Indeks Pendidikan	Rata - rata lama sekolah	Tahun	7,90	7,90	100
	Angka melek huruf	%	99,30	99,87	101
Rata-rata capaian					100,05

Dari indikator kinerja yang mendukung sasaran strategis ini, indikator kinerja sasaran mencapai target.secara umum rata-rata pencapaian sasaran **Meningkatnya Indeks Pendidikan** ini telah berhasil memenuhi target yaitu dengan rata – rata capaian **100,05 %**. (Lampiran 3)

Sasaran 3

Analisis pencapaian **Sasaran 3 :Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat**, dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 3.6 Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahun 2019	Realisasi Tahun 2019	Capaian (%)
Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Persentase kepesertaan JKN	%	100	100	100
	Angka Usia Harapan Hidup	%	67,05	66,79	99,61
Rata-rata capaian					99,805

Dari indikator kinerja yang mendukung sasaran strategis ini, indikator kinerja sasaran mencapai target.secara umum rata-rata pencapaian sasaran **Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat** ini telah berhasil memenuhitarget yaitu dengan rata – rata capaian **99,805%**. (Lampiran 4)

Sasaran 4

Analisis pencapaian **Sasaran 4:Meningkatnya kesempatan kerja**, dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 3.6 Meningkatnya kesempatan kerja,

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahun 2019	Realisasi Tahun 2019	Capaian (%)
Meningkatnya kesempatan kerja	Tingkat pengangguran Terbuka	%	5,27	3,79	72,19
Rata-rata capaian					72,19

Dari indikator kinerja yang mendukung sasaran strategis ini, indikator kinerja sasaran mencapai target.secara umum rata-rata pencapaian sasaran **Meningkatnya kesempatan kerja** ini belummenuhi target yaitu dengan rata – rata capaian **72,19%**. (Lampiran 5)

Sasaran 5

Analisis pencapaian **Sasaran 5:Meningkatnya prestasi keolahragaan**, dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 3.7 Meningkatnya prestasi keolahragaan

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahun 2019	Realisasi Tahun 2019	Capaian (%)
Meningkatnya prestasi keolahragaan	Jumlah cabang olahraga yang mendapatkan prestasi	Cabang Olahraga	10	10	100
Rata-rata capaian					100

Dari indikator kinerja yang mendukung sasaran strategis ini, indikator kinerja sasaran mencapai target.secara umum rata-rata pencapaian sasaran **Meningkatnya prestasi keolahragaan** ini telah memenuhi target yaitu dengan rata – rata capaian **100%**. (Lampiran 6)

Sasaran 6

Analisis pencapaian **Sasaran 6:Meningkatnya kesetaraan gender** , dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 3.8 Meningkatnya kesetaraan gender

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahun 2019	Realisasi Tahun 2019	Capaian (%)
Meningkatnya kesetaraan gender	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	%	92	90,04	97,87
	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	%	62	61,07	98,50
Rata-rata capaian					98,19

Dari indikator kinerja yang mendukung sasaran strategis ini, indikator kinerja sasaran mencapai target. secara umum rata-rata pencapaian sasaran **Meningkatnya kesetaraan gender** ini telah berhasil memenuhi target yaitu dengan rata – rata capaian **98,19%**. (Lampiran 7)

Sasaran 7

Analisis pencapaian **Sasaran 7: Meningkatkan tertib administrasi kependudukan dan catatan sipil**, dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 3.9 Meningkatkan tertib administrasi kependudukan dan catatan sipil

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahun 2019	Realisasi Tahun 2019	Capaian (%)
Meningkatnya tertib administrasi kependudukan dan catatan sipil	Penerapan KTP Nasional berbasis NIK	%	90	98,69	109,95
	Persentase Kepemilikan Akta Kelahiran	%	75	93,99	125,32
Rata-rata capaian					117,635

Dari indikator kinerja yang mendukung sasaran strategis ini, indikator kinerja sasaran mencapai target secara umum rata-rata pencapaian sasaran **Meningkatnya tertib administrasi kependudukan dan catatan sipil** ini telah berhasil memenuhi target yaitu dengan rata – rata capaian **117,635 %** (Lampiran8)

Sasaran 8

Analisis pencapaian **Sasaran 8: Meningkatkan kualitas infrastruktur jalan dan jembatan**, dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel Tabel 3.10 Meningkatkan kualitas infrastruktur jalan dan jembatan

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahun 2019	Realisasi Tahun 2019	Capaian (%)
Meningkatnya kualitas infrastruktur jalan dan jembatan	Proporsi panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik	%	66	36,22	59,87
	Proporsi jumlah jembatan kabupaten dalam kondisi baik	%	33,75	36,22	107,31
Rata-rata capaian					83,59

Dari 2 (dua) indikator kinerja yang mendukung sasaran strategis ini, 2 (dua) indikator kinerja sasaran belum mencapai target. secara umum rata-rata pencapaian sasaran **Meningkatnya kualitas infrastruktur jalan dan jembatan** ini telah berhasil memenuhi target yaitu dengan rata – rata capaian **83,59%**. (Lampiran 9)

Sasaran 9

Analisis pencapaian **Sasaran 9: Meningkatkan kapasitas perhubungan**, dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 3.11 Meningkatkan kapasitas perhubungan

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahun 2019	Realisasi Tahun 2019	Capaian (%)
Meningkatnya kapasitas perhubungan	Kualitas pelabuhan Laut dan terminal kondisi baik	Unit	5	5	100
	Rasio jumlah kendaraan dan panjang jalan	%	0,0071	0,0067	94,37
Rata-rata capaian					97,185

Dari indikator kinerja yang mendukung sasaran strategis ini, indikator kinerja sasaran mencapai target. secara umum rata-rata pencapaian sasaran **Meningkatnya kapasitas perhubungan** ini telah berhasil memenuhi target yaitu dengan rata – rata capaian **97,185%**. (Lampiran 10)

Sasaran 10

Analisis pencapaian **Sasaran 10: Meningkatkan cakupan dan efektivitas layanan irigasi**, dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 3.12 Meningkatkan cakupan dan efektivitas layanan irigasi

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahun 2019	Realisasi Tahun 2019	Capaian (%)
Meningkatnya cakupan dan efektivitas layanan irigasi	Cakupan layanan irigasi	%	10	10	100
Rata-rata capaian					100

Dari indikator kinerja yang mendukung sasaran strategis ini, indikator kinerja sasaran mencapai target. secara umum rata-rata pencapaian sasaran **Meningkatnya cakupan dan efektivitas layanan irigasi** ini telah berhasil memenuhi target yaitu dengan rata – rata capaian **100%**. (Lampiran 11)

Sasaran 11

Analisis pencapaian **Sasaran 11: Meningkatkan kualitas perumahan layak huni dan penataan permukiman kumuh**, dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 3.13 Meningkatkan kualitas perumahan layak huni dan penataan permukiman kumuh

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahun 2019	Realisasi Tahun 2019	Capaian (%)
Meningkatnya kualitas perumahan layak huni dan penataan permukiman kumuh	Lingkungan permukiman kumuh	%	5,53	5,40	97,65
	Rumah tangga bersanitasi	%	98	100	102
	Rasio rumah layak huni	%	76,84	95,54	124,17
Rata-rata capaian					107.94

Dari indikator kinerja yang mendukung sasaran strategis ini, indikator kinerja sasaran mencapai target. secara umum rata-rata pencapaian sasaran **Meningkatnya kualitas perumahan layak huni dan penataan permukiman kumuh** ini telah berhasil memenuhi target yaitu dengan rata – rata capaian **107.94%** (Lampiran 12)

Sasaran 12

Analisis pencapaian **Sasaran 12 : Meningkatnya produksi telur ulat sutra dan kokon dengan didukung ketersediaan daun murbei dan tanaman konservasi**, dapat dijelaskan sebagai berikut :

Tabel 3.14 Meningkatnya produksi telur ulat sutra dan kokon dengan didukung ketersediaan daun murbei dan tanaman konservasi

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahun 2019	Realisasi Tahun 2019	Capaian (%)
Meningkatnya produksi telur ulat sutra dan kokon dengan didukung ketersediaan daun murbei dan tanaman konservasi	Persentase jumlah produksi Kain sutera hasil Alat Tenun Bukan Mesin (ATBM)	%	100	100	100
	Jumlah produktifitas kokon	ton	36	2,1	5,83
Rata-rata capaian					52,91

Dari indikator kinerja yang mendukung sasaran strategis ini, indikator kinerja sasaran mencapai target. secara umum rata-rata pencapaian sasaran **Meningkatnya produksi telur ulat sutra dan kokon dengan didukung ketersediaan daun murbei dan tanaman konservasi** ini hanya berhasil memenuhi target yaitu dengan rata – rata capaian **52,91%**. (Lampiran 13)

Sasaran 13

Analisis pencapaian **Sasaran 13: Meningkatnya daya saing ekonomi daerah** , dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 3.15 Meningkatnya daya saing ekonomi daerah

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
Meningkatnya daya saing ekonomi daerah	Nilai Ekspor	Ribu Rupiah	363.027.246,41	573.080.790,86	157,86
	Nilai PDRB (Pendapatan Domestik Regional Bruto)	Juta Rupiah	19.695.225	19.838.810	100,73
	Lama Tinggal Wisatawan	Hari	4	3	75
	Jumlah Kunjungan Wisatawan	Orang	72.782	72.782	100

Rata-rata capaian

115,72

Dari 4 indikator kinerja yang mendukung sasaran strategis ini, indikator kinerja sasaran mencapai target. secara umum rata-rata pencapaian sasaran **Meningkatnya daya saing ekonomi daerah** ini telah berhasil memenuhi target yaitu dengan rata – rata capaian **115,72 %**.(Lampiran 14)

Sasaran 14

Analisis pencapaian **Sasaran 14: Meningkatnya ketahanan pangan daerah**, dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 3.16 Meningkatnya ketahanan pangan daerah

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahun 2019	Realisasi Tahun 2019	Capaian (%)
Meningkatnya ketahanan pangan daerah	Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	%	90,8	90,3	99,44
Rata-rata capaian					99,44

Dari indikator kinerja yang mendukung sasaran strategis ini, indikator kinerja sasaran mencapai target. secara umum rata-rata pencapaian sasaran **Meningkatnya ketahanan pangan daerah** ini telah berhasil memenuhi target yaitu dengan rata – rata capaian **99,44%**. (Lampiran 15)

Sasaran 15

Analisis pencapaian **Sasaran 15: Menurunnya tingkat kemiskinan dan penanganan PMKS**, dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 3.17 Menurunnya tingkat kemiskinan dan penanganan PMKS

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahun 2019	Realisasi Tahun 2019	Capaian (%)
Menurunnya tingkat kemiskinan dan penanganan PMKS	Tingkat kemiskinan	%	7,38	7,50	101,62
	Penanganan PMKS(Penanganan Masalah Kesejahteraan Sosial)	%	100	30	30
Rata-rata capaian					65,81

Dari indikator kinerja yang mendukung sasaran strategis ini, indikator kinerja sasaran mencapai target. secara umum rata-rata pencapaian sasaran **Menurunnya tingkat kemiskinan dan penanganan PMKS** ini telah berhasil memenuhi target yaitu dengan rata – rata capaian **65,81%**. (Lampiran 16)

Sasaran 16

Analisis pencapaian **Sasaran 16 :Terkendalnya laju pertumbuhan penduduk**, dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 3.18 Terkendalnya laju pertumbuhan penduduk

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahun 2019	Realisasi Tahun 2019	Capaian (%)
Terkendalnya laju pertumbuhan penduduk	Rata - rata laju pertumbuhan penduduk	%	0,84	0,24	28,57
	Rasio akseptor KB	%	76,10	73,66	96,79
Rata-rata capaian					62,68

Dari indikator kinerja yang mendukung sasaran strategis ini, indikator kinerja sasaran mencapai target. secara umum rata-rata pencapaian sasaran **Terkendalnya laju pertumbuhan penduduk** ini telah berhasil memenuhi target yaitu dengan rata – rata capaian **62,68%**. (Lampiran 17)

Sasaran 17

Analisis pencapaian **Sasaran 17: Meningkatnya kesesuaian antar dokumen perencanaan**, dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 3.19 Meningkatkan kesesuaian antar dokumen perencanaan

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahun 2019	Realisasi Tahun 2019	Capaian (%)
Meningkatnya kesesuaian antar dokumen perencanaan	Persentase program RPJMD yang terakomodir dalam RKPD	%	100	100	100
Rata-rata capaian					100

Dari indikator kinerja yang mendukung sasaran strategis ini, indikator kinerja sasaran mencapai target. secara umum rata-rata pencapaian sasaran **Meningkatnya kesesuaian antar dokumen perencanaan** ini telah berhasil memenuhi target yaitu dengan rata – rata capaian **100%**. (Lampiran 18)

Sasaran 18

Analisis pencapaian **Sasaran 18: Meningkatkan kualitas lingkungan hidup yang berkelanjutan**, dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 3.20 Meningkatkan kualitas lingkungan hidup yang berkelanjutan

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahun 2019	Realisasi Tahun 2019	Capaian (%)
Meningkatnya kualitas lingkungan hidup yang berkelanjutan	Indeks Lingkungan Hidup	%	80,22	80,88	100,82
	Ruang Terbuka Hijau	%	19,27	20,01	103,84
Rata-rata capaian					102,33

Dari indikator kinerja yang mendukung sasaran strategis ini, indikator kinerja sasaran mencapai target secara umum rata-rata pencapaian sasaran **Meningkatnya kualitas lingkungan hidup yang berkelanjutan** ini telah berhasil memenuhi target yaitu dengan rata – rata capaian **102,33%** (Lampiran 19)

Sasaran 19

Analisis pencapaian **Sasaran 19: Meningkatkan ketertiban, ketenteraman, keamanan dan kenyamanan dalam masyarakat**, dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 3.21 Meningkatkan ketertiban, ketenteraman, keamanan dan kenyamanan dalam masyarakat

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahun 2019	Realisasi Tahun 2019	Capaian (%)
Meningkatnya ketertiban, ketenteraman, keamanan dan kenyamanan dalam masyarakat	Penyelesaian K3 (Keamanan, Kesehatan, dan Keselamatan Kerja)	%	96	96	100
Rata-rata capaian					100

Dari indikator kinerja yang mendukung sasaran strategis ini, indikator kinerja sasaran mencapai target secara umum rata-rata pencapaian sasaran

Meningkatnya keberdayaan desa Meningkatkan ketertiban, ketenteraman, keamanan dan kenyamanan dalam masyarakat ini telah berhasil memenuhi target yaitu dengan rata – rata capaian **100%**. (Lampiran 20)

Sasaran 20

Analisis pencapaian **Sasaran 20: Meningkatkan kerukunan hidup bermasyarakat**, dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 3.22 Meningkatkan kerukunan hidup bermasyarakat

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahun 2019	Realisasi Tahun 2019	Capaian (%)
Meningkatnya kerukunan hidup bermasyarakat	Jumlah konflik SARA (Suku, Agama, Ras, dan Antar Golongan)	Konflik	0	0	100
Rata-rata capaian					100

Dari indikator kinerja yang mendukung sasaran strategis ini, indikator kinerja sasaran mencapai target. secara umum rata-rata pencapaian sasaran **Meningkatnya kerukunan hidup bermasyarakat** ini telah berhasil memenuhi target yaitu dengan rata – rata capaian **100%**. (Lampiran 21)

Sasaran 21

Analisis pencapaian **Sasaran 21: Meningkatkan kompetensi sumber daya aparatur dan kapasitas kelembagaan pemerintah daerah** dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 3.24 Meningkatkan kompetensi sumber daya aparatur dan kapasitas kelembagaan pemerintah daerah

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahun 2019	Realisasi Tahun 2019	Capaian (%)
Meningkatnya kompetensi sumber daya aparatur dan kapasitas kelembagaan pemerintah daerah	Rasio lulusan S1/S2/S3	%	0,05	70,45	140.900
	Kapasitas kelembagaan pemerintah daerah yang baik	OPD	53	53	100
Rata-rata capaian					75,450

Dari indikator kinerja yang mendukung sasaran strategis ini, indikator kinerja sasaran mencapai target. secara umum rata-rata pencapaian sasaran **Meningkatnya kompetensi sumber daya aparatur dan kapasitas kelembagaan pemerintah** ini telah memenuhi target yaitu dengan rata – rata capaian **69,680%**. (Lampiran 22)

Sasaran 22

Analisis pencapaian **Sasaran 22 : Meningkatnya kualitas pelayanan publik**, dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 3.25 Meningkatnya kualitas pelayanan publik

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahun 2019	Realisasi Tahun 2019	Capaian (%)
Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Rata-rata Indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan dasar	Nilai	B	B	100
Rata-rata capaian					100

Dari indikator kinerja yang mendukung sasaran strategis ini, indikator kinerja sasaran mencapai target. secara umum rata-rata pencapaian sasaran **Meningkatnya kualitas pelayanan publik** ini telah berhasil memenuhi target yaitu dengan rata – rata capaian **100%**. (Lampiran 23)

Sasaran 23

Analisis pencapaian **Sasaran 23: Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan daerah**, dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 3.26 Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan daerah

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahun 2019	Realisasi Tahun 2019	Capaian (%)
Meningkatnya akuntabilitas	Opini BPK terhadap laporan keuangan	nilai	WTP	WTP	100

kinerja dan keuangan daerah	daerah				
	Nilai evaluasi AKIP	nilai	CC	CC	100
	Nilai LPPD	nilai	sedang	Sangat Tinggi	100
Rata-rata capaian					100

Dari indikator kinerja yang mendukung sasaran strategis ini, indikator kinerja sasaran mencapai target. secara umum rata-rata pencapaian sasaran **Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan daerah** ini telah berhasil memenuhi target yaitu dengan rata – rata capaian **100% (Lampiran 24)**

3.2.2 Perbandingan Antara Capaian Kinerja Tahun Ini Dengan Tahun Lalu Dan Beberapa Tahun Terakhir.

Sasaran 1

Analisis pencapaian **Sasaran 1: Meningkatnya keterpenuhan sarana ibadah**, dapat dijelaskan sebagai berikut :

Indikator Kinerja	Capaian (%)			
	2016	2017	2018	2019
Tempat Ibadah berkualitas baik	99,84	99,84	99,84	99,84
Rata-rata capaian	99,84	99,84	99,84	99,84

Jika dilihat capaian kinerja tahun ini dengan beberapa tahun terakhir, maka secara umum rata-rata capaian kinerja pada sasaran **Meningkatnya keterpenuhan sarana ibadah** belum mengalami peningkatan. Jika dibandingkan dengan tahun lalu, yaitu dari 99,84 persen pada tahun 2018 dan 99,84 persen pada tahun 2019.

Sasaran 2

Analisis pencapaian **Sasaran 2: Meningkatnya indeks pendidikan**, dapat dijelaskan sebagai berikut :

Indikator Kinerja	Capaian (%)			
	2016	2017	2018	2019
Rata-rata Lama Sekolah	85,07	87,94	99,27	100
Angka Melek Huruf	87	99	97,82	101
Rata – Rata Capaian	92,21	97,19	98,98	100,05

Jika dilihat capaian kinerja tahun ini dengan beberapa tahun terakhir, maka secara umum rata-rata capaian kinerja pada sasaran **Meningkatnya Indeks Pendidikan** mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan tahun lalu, yaitu dari **98,98persen** pada tahun 2018 dan pada tahun 2019 **100,05 %**. Yaitu peningkatan sebesar **1,07%**

Sasaran 3

Analisis pencapaian **Sasaran 3: Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat**, dapat dijelaskan sebagai berikut :

Indikator Kinerja	Capaian (%)			
	2016	2017	2018	2019
Persentase kepesertaan JKN	100	100	104,41	100
Angka Usia Harapan Hidup	93,49	93,04	99,72	99,61
Rata – Rata Capaian	96,74	96,52	102,06	99,805

Jika dilihat capaian kinerja tahun ini dengan beberapa tahun terakhir, maka secara umum rata-rata capaian kinerja pada sasaran **Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat** mengalami penurunan jika dibandingkan dengan tahun lalu, yaitu dari dan 102,06 persen pada tahun 2018 dan pada tahun 2019 **99,805**. Yaitu penurunan sebesar **2,25%**.

Sasaran 4

Analisis pencapaian **Sasaran 4 : Meningkatkan kesempatan kerja**, dapat dijelaskan sebagai berikut :

Indikator Kinerja	Capaian (%)			
	2015	2017	2018	2019
Tingkat pengangguran Terbuka	94,56	56,77	58,06	72,19
Rata – Rata Capaian	94,56	56,77	58,06	72,19

Jika dilihat capaian kinerja tahun ini dengan beberapa tahun terakhir, maka secara umum rata-rata capaian kinerja pada sasaran **Meningkatnya kesempatan kerja** mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan tahun lalu, yaitu dari 58,06 persen pada tahun 2018 dan pada tahun 2019 **72,19 %**. Yaitu peningkatan sebesar **14,13%**.

Sasaran 5

Analisis pencapaian **Sasaran 5: Meningkatnya prestasi keolahragaan**, dapat dijelaskan sebagai berikut :

Indikator Kinerja	Capaian (%)			
	2016	2017	2018	2019
Jumlah cabang olahraga yang mendapatkan prestasi	46	54	63,64	100
Rata – Rata Capaian	46	54	63,64	100

Jika dilihat capaian kinerja tahun ini dengan beberapa tahun terakhir, maka secara umum rata-rata capaian kinerja pada sasaran **Meningkatnya prestasi keolahragaan** mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan tahun lalu, yaitu dari 63,64 persen pada tahun 2018 dan pada tahun 2019 **100 %**. Yaitu peningkatan sebesar **36,36%**.

Sasaran 6

Analisis pencapaian **Sasaran 6: Meningkatnya kesetaraan gender**, dapat dijelaskan sebagai berikut :

Indikator Kinerja	Capaian (%)			
	2015	2017	2018	2019
Indeks Pembangunan Gender (IPG)	97,91	98,79	98,79	97,87
Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	97,90	99,38	99,38	96,50
Rata – Rata Capaian	97,90	99,08	99,08	97,185

Jika dilihat capaian kinerja tahun ini dengan beberapa tahun terakhir, maka secara umum rata-rata capaian kinerja pada sasaran **Meningkatnya kesetaraan gender** belum mengalami penurunan jika dibandingkan dengan tahun lalu, yaitu 99,08 dan pada tahun 2018 **97,185%** persen pada tahun 2019.

Sasaran 7

Analisis pencapaian **Sasaran 7: Meningkatnya tertib administrasi kependudukan dan catatan sipil**, dapat dijelaskan sebagai berikut :

Indikator Kinerja	Capaian (%)
-------------------	-------------

	2016	2017	2018	2019
Penerapan KTP Nasional berbasis NIK	107,04	105,26	116,60	109,95
Persentase Kepemilikan Akta Kelahiran	142,85	120	124,40	125,32
Rata – Rata Capaian	116,63	108,42	142,3	117.635

Jika dilihat capaian kinerja tahun ini dengan beberapa tahun terakhir, maka secara umum rata-rata capaian kinerja pada sasaran **Meningkatnya tertib administrasi kependudukan dan catatan sipil** mengalami penurunan jika dibandingkan dengan tahun lalu, yaitu 142,3 persen pada tahun 2018 dan tahun 2019 **117,635 %**. Yaitu sebesar **24,67%**

Sasaran 8

Analisis pencapaian **Sasaran 8: Meningkatnya kualitas infrastruktur jalan dan jembatan** , dapat dijelaskan sebagai berikut :

Indikator Kinerja	Capaian (%)			
	2016	2017	2018	2019
Proporsi panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik	52,32	52,32	52,32	59,87
Proporsi jumlah jembatan kabupaten dalam kondisi baik	67,35	67,35	67,35	107,31
Rata-rata capaian	59,83	59,83	59,83	83,59

Jika dilihat capaian kinerja tahun ini dengan beberapa tahun terakhir, maka secara umum rata-rata capaian kinerja pada sasaran **Meningkatnya kualitas infrastruktur jalan dan jembatan** ini mengalami peningkatan. Rata-rata capaian kinerja tahun 2019 mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan tahun lalu, yaitu dari 59,83% pada tahun 2018, meningkat menjadi 83,59% pada tahun 2019. Atau mengalami peningkatan sebesar **23,76 %**

Sasaran 9

Analisis pencapaian **Sasaran 9: Meningkatnya kapasitas perhubungan**, dapat dijelaskan sebagai berikut :

Indikator Kinerja	Capaian (%)			
	2016	2017	2018	2019
Kualitas pelabuhan Laut dan terminal kondisi baik	100	100	100	100
Rasio jumlah kendaraan dan panjang jalan	82,6	93,25	94,37	94,37
Rata – Rata Capaian	182,6	96,62	97,18	97,18

Jika dilihat capaian kinerja tahun ini dengan beberapa tahun terakhir, maka secara umum rata-rata capaian kinerja pada sasaran **Meningkatnya kapasitas perhubungan tidak** mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan tahun lalu, yaitu 97,18 persen pada tahun 2018. Dan pada tahun 2019 tetap 97,18 %.

Sasaran 10

Analisis pencapaian **Sasaran 10: Meningkatkan cakupan dan efektivitas layanan irigasi**, dapat dijelaskan sebagai berikut :

Indikator Kinerja	Capaian (%)			
	2016	2017	2018	2019
Cakupan layanan irigasi	109,11	107,03	120,65	100
Rata – Rata Capaian	109,11	107,03	120,65	100

Jika dilihat capaian kinerja tahun ini dengan beberapa tahun terakhir, maka secara umum rata-rata capaian kinerja pada sasaran **Meningkatnya cakupan dan efektivitas layanan irigasi** mengalami penurunan jika dibandingkan dengan tahun lalu, yaitu dari 120,65 persen pada tahun 2018 serta tahun 2019 100 %. sebesar **20,65%**

Sasaran 11

Analisis pencapaian **Sasaran 11: Meningkatkan kualitas perumahan layak huni dan penataan permukiman kumuh**, dapat dijelaskan sebagai berikut :

Indikator Kinerja	Capaian (%)			
	2016	2017	2018	2019
Lingkungan permukiman kumuh	110,87	109,80	98,55	97,65
Rumah tangga bersanitasi	102,20	103,22	104,17	102
Rasio rumah layak huni	99,47	99,47	67,90	124,17
Rata – Rata Capaian	104,18	104,16	90,21	107,94

Jika dilihat capaian kinerja tahun ini dengan beberapa tahun terakhir, maka secara umum rata-rata capaian kinerja pada sasaran **Meningkatnya kualitas perumahan layak huni dan penataan permukiman kumuh** mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan tahun lalu, yaitu dari 90,21persen pada tahun 2018 dan pada tahun 2019 107,94 %, peningkatan sebesar **17,73%**

Sasaran 12

Analisis pencapaian **Sasaran 12: Meningkatkan produksi telur ulat sutra dan kokon dengan didukung ketersediaan daun murbei dan tanaman konservasi**, dapat dijelaskan sebagai berikut :

Indikator Kinerja	Capaian (%)			
	2016	2017	2018	2019
Persentase jumlah produksi Kain sutera hasil Alat Tenun Bukan Mesin (ATBM)	79,96	100	126,65	100
Jumlah produktifitas kokon	120	120	37,50	5,83
Rata – Rata Capaian	99,98	110	82,07	52,91

Jika dilihat capaian kinerja tahun ini dengan beberapa tahun terakhir, maka secara umum rata-rata capaian kinerja pada sasaran **Meningkatnya produksi telur ulat sutra dan kokon dengan didukung ketersediaan daun murbei dan tanaman konservasi** mengalami penurunan jika dibandingkan dengan tahun lalu, yaitu dari 82,07persen pada tahun 2018 sementara pada tahun 2019 capainya hanya 52,91 %. Maka terjadi penurunan sebesar **29,16%**

Sasaran 13

Analisis pencapaian **Sasaran 15 : Meningkatkan daya saing ekonomi daerah**, dapat dijelaskan sebagai berikut :

Indikator Kinerja	Capaian (%)			
	2016	2017	2018	2019
Nilai Ekspor	55,21	78,93	157,86	120,65
Nilai PDRB (Pendapatan Domestik Regional Bruto)	109,43	108,17	98,78	100,73
	100	100	100	

Lama Tinggal Wisatawan				75
Jumlah Kunjungan Wisatawan	114,86	114,86	114,86	100
Rata – Rata Capaian	96,038	102,312	115,72	99,095

Jika dilihat capaian kinerja tahun ini dengan beberapa tahun terakhir, maka secara umum rata-rata capaian kinerja pada sasaran **Meningkatnya daya saing ekonomi daerah** mengalami penurunan jika dibandingkan dengan tahun lalu, yaitu dari 115,72 % pada tahun 2018 dan pada tahun 2019 sebesar 99,095 %.maka terjadi penurunan sebesar **16,625%**

Sasaran 14

Analisis pencapaian **Sasaran 16 :Meningkatnya ketahanan pangan daerah**, dapat dijelaskan sebagai berikut :

Indikator Kinerja	Capaian (%)			
	2016	2017	2018	2019
Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	103,82	101	90,5	99,44
Rata – Rata Capaian	103,82	101	90,5	99,44

Jika dilihat capaian kinerja tahun ini dengan beberapa tahun terakhir, maka secara umum rata-rata capaian kinerja pada sasaran **Meningkatnya ketahanan pangan daerah** mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan tahun lalu, yaitu dari 90,5 % pada tahun 2018 dan pada tahun 2019 99,44.Yaitu peningkatan sebesar **8,94%**

Sasaran 15

Analisis pencapaian **Sasaran 15:Menurunnya tingkat kemiskinan dan penanganan PMKS**, dapat dijelaskan sebagai berikut :

Indikator Kinerja	Capaian (%)			
	2016	2017	2018	2019
Tingkat kemiskinan	97,3	103,94	101,08	101,62
Penanganan PMKS (Penanganan Masalah Kesejahteraan Sosial)	133,3	100	82,11	30
Rata – Rata Capaian	115,3	153,94	91,6	65,81

Jika dilihat capaian kinerja tahun ini dengan beberapa tahun terakhir, maka secara umum rata-rata capaian kinerja pada sasaran **Menurunnya tingkat kemiskinan dan penanganan PMKS** mengalami penurunan jika dibandingkan dengan tahun lalu, yaitu dari 91,6 persen pada tahun 2018 dan pada tahun 2019 65,81 %. Sehingga terjadi penurunan sebesar **25,79%**

Sasaran 16

Analisis pencapaian **Sasaran 16: Terkendalnya laju pertumbuhan penduduk**, dapat dijelaskan sebagai berikut :

Indikator Kinerja	Capaian (%)			
	2016	2017	2018	2019
Terkendalnya laju pertumbuhan penduduk	109,32	104,76	33,33	28,57
Rasio akseptor KB	101,6	101,50	115,64	96,79
Rata – Rata Capaian	105,46	103,31	74,48	62,68

Jika dilihat capaian kinerja tahun ini dengan beberapa tahun terakhir, maka secara umum rata-rata capaian kinerja pada sasaran **Terkendalnya laju pertumbuhan penduduk** mengalami penurunan jika dibandingkan dengan tahun lalu, yaitu dari 74,48 % pada tahun 2018 dan pada tahun 2019 62,68 %. Yaitu penurunan sebesar **11,8%**

Sasaran 17

Analisis pencapaian **Sasaran 17: Meningkatnya kesesuaian antar dokumen perencanaan**, dapat dijelaskan sebagai berikut :

Indikator Kinerja	Capaian (%)			
	2016	2017	2018	2019
Persentase program RPJMD yang terakomodir dalam RKPD	100	100	100	100
Rata – Rata Capaian	100	100	100	100

Jika dilihat capaian kinerja tahun ini dengan beberapa tahun terakhir, maka secara umum rata-rata capaian kinerja pada sasaran **Meningkatnya kesesuaian antar dokumen perencanaan** jika dibandingkan dengan tahun

lalu, yaitu dari 100persen pada tahun 2018 dan 100persen pada tahun 2019 belum mengalami perubahan.

Sasaran 18

Analisis pencapaian **Sasaran 18: Meningkatnya kualitas lingkungan hidup yang berkelanjutan**, dapat dijelaskan sebagai berikut :

Indikator Kinerja	Capaian (%)			
	2016	2017	2018	2019
Indeks Lingkungan Hidup	142,46	105,87	90,50	100,82
Ruang Terbuka Hijau	100	110,42	101,89	103,84
Rata – Rata Capaian	121,23	108,14	96,195	102,33

Jika dilihat capaian kinerja tahun ini dengan beberapa tahun terakhir, maka secara umum rata-rata capaian kinerja pada sasaran **Meningkatnya kualitas lingkungan hidup yang berkelanjutan** jika dibandingkan dengan tahun lalu, yaitu dari 96,195persen pada tahun 2018 dan pada tahun 2019 102,33 % .Yaitu mengalami peningkatan **6,135%**.

Sasaran 19

Analisis pencapaian **Sasaran 19: Meningkatnya ketertiban, ketenteraman, keamanan dan kenyamanan dalam masyarakat**, dapat dijelaskan sebagai berikut :

Indikator Kinerja	Capaian (%)			
	2016	2017	2018	2019
Penyelesaian K3 (Ketenteraman, Ketertiban, dan Keindahan)	95,01	95,01	90,58	100
Rata – Rata Capaian	95,01	95,01	90,58	100

Jika dilihat capaian kinerja tahun ini dengan beberapa tahun terakhir, maka secara umum rata-rata capaian kinerja pada sasaran **Meningkatnya ketertiban, ketenteraman, keamanan dan kenyamanan dalam masyarakat**, jika dibandingkan dengan tahun lalu, yaitu dari 90,58persen pada tahun 2018 dan pada tahun 2019 100 persen. Yaitu mengalami peningkatan **9,42%**.

Sasaran 20

Analisis pencapaian **Sasaran 20: Meningkatnya kerukunan hidup bermasyarakat**, dapat dijelaskan sebagai berikut :

Indikator Kinerja	Capaian (%)			
	2016	2017	2018	2019
Jumlah konflik SARA	100	100	100	100
Rata – Rata Capaian	100	100	100	100

Jika dilihat capaian kinerja tahun ini dengan beberapa tahun terakhir, maka secara umum rata-rata capaian kinerja pada sasaran **Meningkatnya kerukunan hidup bermasyarakat** jika dibandingkan dengan tahun lalu, yaitu dari 100 % pada tahun 2018 dan 100 % pada tahun 2019.

Sasaran 21

Analisis pencapaian **Sasaran 24: Meningkatnya kompetensi sumber daya manusia aparatur dan kapasitas kelembagaan pemerintah daerah**, dapat dijelaskan sebagai berikut :

Indikator Kinerja	Capaian (%)			
	2016	2017	2018	2019
Rasio lulusan S1/S2/S3	100	100	120.400	139,360
Kapasitas kelembagaan pemerintah daerah yang baik	100	100	100	100
Rata – Rata Capaian	100	100	60.700	69,730

Jika dilihat capaian kinerja tahun ini dengan beberapa tahun terakhir, maka secara umum rata-rata capaian kinerja pada sasaran **Meningkatnya kompetensi sumber daya manusia aparatur dan kapasitas kelembagaan pemerintah daerah** jika dibandingkan dengan tahun lalu, yaitu dari 60.700persen pada tahun 2018 lalu pada tahun 2019 69.730 %.

Rasio S1/S2/S3 mengalami kenaikan yang sangat tinggi dikarenakan adanya kesalahan penentuan target tahun 2019, dimana target tahun 2019 adalah 0,05%, sementara realisasi yang diperoleh sebesar 139,260 %. Ini

menyebabkan adanya lonjakan nilai capaian. Untuk kedepannya ini menjadi catatan bagi kami dalam perencanaan penentuan target, agar memperhatikan lebih seksama.

Sasaran 22

Analisis pencapaian **Sasaran 23 :Meningkatnya kualitas pelayanan publik**, dapat dijelaskan sebagai berikut :

Indikator Kinerja	Capaian (%)			
	2016	2017	2018	2019
Rata-rata Indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan dasar	100	100	100	100
Rata – Rata Capaian	100	100	100	100

Jika dilihat capaian kinerja tahun ini dengan beberapa tahun terakhir, maka secara umum rata-rata capaian kinerja pada sasaran **Meningkatnya kualitas pelayanan publik** jika dibandingkan dengan tahun lalu, yaitu dari 100persen pada tahun 2018 dan 100persen pada tahun 2019.

Sasaran 23

Analisis pencapaian **Sasaran 26:Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan daerah**, dapat dijelaskan sebagai berikut :

Indikator Kinerja	Capaian (%)			
	2016	2017	2018	2019
Opini BPK terhadap laporan keuangan daerah	100	100	100	100
Nilai evaluasi AKIP	100	100	100	100
Nilai LPPD	100	100	100	100
Rata – Rata Capaian	100	100	100	100

Jika dilihat capaian kinerja tahun ini dengan beberapa tahun terakhir, maka secara umum rata-rata capaian kinerja pada sasaran **Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan daerah** jika dibandingkan dengan tahun lalu, yaitu dari 100 % pada tahun 2018 dan 100 % pada tahun 2019.

3.2.3 Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan.

Sasaran 1

Keberhasilan/peningkatan pencapaian beberapa indikator pada sasaran **Meningkatnya Keterpenuhan Sarana Ibadah** didukung dengan adanya Program Peningkatan Sarana Ibadah, Program Peningkatan Kesejahteraan Imam Desa / Kelurahan, Imam Dusun / Lingkungan serta Guru Mengaji, dan Program fasilitasi pelaksanaan ibadah dan perayaan keagamaan, serta terpenuhinya alokasi anggaran APBD untuk program dan kegiatan yang mendukung sasaran tersebut diatas.

Sasaran 2

Keberhasilan/peningkatan pencapaian beberapa indikator pada sasaran **Meningkatnya Indeks Pendidikan**, ini didukung dengan adanya program Program Pendidikan Anak Usia Dini, Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun, Program Pendidikan Menengah dan Kejuruan Program, Pendidikan Non Formal dan Informal, Program Peningkatan Pelayanan Perpustakaan, Program Pengembangan Budaya Baca, Program Pengembangan Kelembagaan Perpustakaan manajemen pelayanan pendidikan, program peningkatan peran serta kepemudaan, program pembinaan dan pemasyarakatan olahraga, program pengembangan pemasaran pariwisata dan program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan.

Sasaran 3

Kegagalan/penurunan pencapaian beberapa indikator pada sasaran **Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat**, meskipun telah didukung dengan adanya Program Penanganan 1000 hari Pertama Kehidupan, Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak,

Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan anak Balita, Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia, Program Pengembangan Institusi Pendidikan Kesehatan, Program Upaya Kesehatan Masyarakat, Program Obat dan Perbekalan Kesehatan, Program pencegahan dan Penanggulangan Penyakit menular, Program Pengawasan dan Pengendalian Kesehatan Makanan, Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas /puskesmas pembantu dan jaringannya, Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit / rumah sakit jiwa / rumah sakit paru-paru / rumah sakit mata dan Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit / Rumah Sakit Jiwa / Rumah Sakit Paru-Paru / Rumah Sakit Mata, belum optimal sehingga belum dapat mencapai target.

Sasaran 4

Menurunnya pengangguran merupakan salah satu peningkatan pencapaian indikator pada sasaran **Meningkatnya kesempatan kerja**, yang merupakan program kegiatan dari Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Wajo. Aktivasi Sub Sektor Ekonomi Kreatif merupakan suatu konsep perekonomian di era ekonomi baru yang mengintensifkan informasi dan kreativitas dengan mengedepankan ide dan pengetahuan dari sumber daya manusia sebagai faktor produksi yang paling utama. Dengan kata lain, konsep *creative economy* lebih mengedepankan kreativitas, ide, dan pengetahuan manusia sebagai aset utama dalam menggerakkan ekonomi.

Ekonomi kreatif diharapkan akan membantu perekonomian di Kabupaten Wajo dengan berbagai cara, seperti:

- Membuka lapangan kerja baru
- Menekan angka pengangguran
- Menciptakan masyarakat yang kreatif
- Kompetisi dunia bisnis yang lebih sehat
- Meningkatkan inovasi di berbagai sektor

Inilah yang dilakukan oleh Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah serta Dinas Tenaga kerja dan Transmigrasi Kabupaten Wajo dalam meningkatkan Aktivasi Sub Sektor Ekonomi Kreatif.

Sasaran 5

Peningkatan/keberhasilan pada sasaran **Meningkatnya prestasi keolahragaan** disebabkan prestasi cabang olahraga yang telah menjadi target Dinas Pendidikan Olahraga. Beberapa upaya untuk meningkatkan pencapaian tersebut diantaranya mendukung Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan, Program Pengembangan dan Keserasian Kebijakan Pemuda, Program Pembinaan dan Pemasarakatan Olah Raga dan Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olah Raga.

Sasaran 6

Kegagalan/penurunan pencapaian beberapa indikator pada sasaran **Meningkatnya kesetaraan gender**, meskipun didukung dengan adanya Program Penguatan Kelembagaan PUG dan Anak, Program Peningkatan Peran Serta Kesetaraan Gender Dalam Pembangunan, Program Pemberdayaan Ekonomi Perempuan, Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan dan Anak yang merupakan program kegiatan dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Sasaran 7

Kegagalan/penurunan pencapaian beberapa indikator pada sasaran **Meningkatnya tertib administrasi kependudukan dan catatan sipil** dikarenakan peningkatan jumlah penduduk serta kurangnya sarana dan prasarana meskipun telah diadakan Program Penataan Administrasi Kependudukan dan Program Penataan Administrasi Catatan Sipil, yang merupakan program kegiatan dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Sasaran 8

Peningkatan/keberhasilan pencapaian pada sasaran **Meningkatnya kualitas infrastruktur jalan dan jembatan** disebabkan adanya program pembangunan dan pemeliharaan jalan dan jembatan yang telah terealisasi seluruhnya dari target yang direncanakan oleh Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Jasa Konstruksi dan Penataan Ruang. Upaya untuk menghadapi hal tersebut maka Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Jasa Konstruksi dan Penataan Ruang membuat Program Pembangunan dan pemeliharaan Jalan dan Jembatan, Program Pembangunan, Peningkatan dan Pemeliharaan Konstruksi Jalan, Jembatan dan Keciaptakarya, Program Pembangunan dan Pemeliharaan Bangunan Keciaptakarya, Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan, Program Pembangunan / Pemeliharaan Drainase, Duiker dan Gorong-Gorong, Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan Program Pengembangan Kawasan Perdesaan Program Pengendalian Banjir . Yang disesuaikan dengan alokasi anggaran APBD untuk program dan kegiatan yang mendukung sasaran tersebut.

Sasaran 9

Keberhasilan/peningkatan pencapaian beberapa indikator pada sasaran **Meningkatnya kapasitas perhubungan** yang merupakan program kegiatan dari Dinas Perhubungan Kabupaten Wajo. Didukung dengan Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan di pelabuhan/terminal , Program Peningkatan Pelayanan Angkutan, Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas.

Sasaran 10

Kegagalan/penurunan pencapaian indikator pada sasaran **Meningkatnya cakupan dan efektivitas layanan irigasi** yang dibandingkan dengan tahun lalu walaupun telah dilaksanakan program kegiatan dari Dinas Pengelola Sumber Daya Air didukung adanya Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa, Sungai, Danau,

Jaringan Pengairan Lainnya dan PPIP, Program Pengembangan, Pengelolaan, dan Konservasi Sungai, Danau dan Sumber Air Lainnya.

Sasaran 11

Keberhasilan/peningkatan pencapaian beberapa indikator pada sasaran **Meningkatnya kualitas perumahan layak huni dan penataan permukiman kumuh** yang didukung dengan Program Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong, Program Pemberdayaan Komunitas Perumahan / Pemukiman, Program Pemberdayaan Komunitas Perumahan / Pemukiman, Program Pembangunan Sarana / Prasarana Air Bersih dan Sanitasi, Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Masyarakat, Program Percepatan Sanitasi Permukiman di Daerah, Program Lingkungan Sehat Perumahan, Program Pengembangan Perumahan, Program Perencanaan Tata Ruang, Penyusunan perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang.

Sasaran 12

Kegagalan/penurunan pencapaian beberapa indikator pada sasaran **Meningkatnya produksi telur ulat sutra dan kokon dengan didukung ketersediaan daun murbei dan tanaman konservasi** dipengaruhi oleh pasar dan perubahan iklim walaupun telah diadakan kegiatan yang didukung oleh Program Penguatan Kelembagaan UPTD, Program Pembinaan dan Penertiban Industri Hasil Hutan Rehabilitasi Hutan dan Lahan, Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Hutan, Program Peningkatan Kesejahteraan Petani, Program Peningkatan Ketahanan Pangan, Program Peningkatan Produksi Pertanian / Kehutanan, Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Komoditi Perkebunan, Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan, Program Perencanaan dan Evaluasi Daerah Aliran Sungai, Program Pengembangan Sarana dan Prasarana Kehutanan. Akan tetapi disisi lain adanya jumlah produktivitas kokon yang menurun.

Sasaran 13

Kegagalan/penurunan pencapaian beberapa indikator pada sasaran **Meningkatnya daya saing ekonomi daerah** dipengaruhi oleh beberapa faktor diantaranya perubahan infansi, perubahan iklim serta menurunnya daya beli meskipun telah didukung oleh program pengembangan pemasaran pariwisata dan program pengembangan destinasi pariwisata. maupun peningkatan daya beli masyarakat.

Sasaran 14

Keberhasilan/peningkatan pencapaian beberapa indikator pada sasaran **Meningkatnya ketahanan pangan daerah** didukung oleh program percepatan penganeekaragaman konsumsi pangan (P2KP), program analisis pola pangan konsumsi pangan harapan dengan pendekatan pola pangan harapan (PPH), program lomba cipta menu B2SA, program Hari Pangan Sedunia (HPS), program Expo Gelar Pangan Nusantara, program peningkatan Kapasitas Aparatur dan Pelaku Usaha dalam pengembangan konsumsi dan keamanan pangan.

Sasaran 15

Kegagalan/penurunan pencapaian beberapa indikator pada sasaran **Menurunnya tingkat kemiskinan dan PMKS (Penanganan Masalah Kesejahteraan Sosial)** adanya penambahan jumlah penduduk miskin walaupun telah didukung oleh program pemberdayaan fakir miskin, komoditas adat terpencil, dan PKMS lainnya, program perlindungan dan jaminan sosial, program pelayanan dan rehabilitasi sosial, program pembinaan para penyandang cacat dan ekstrauma, program pembinaan eks penyakit sosial lainnya, program pemberdayaan kelembagaan kesejahteraan sosial dan program pemberdayaan, perorangan keluarga dan masyarakat.

Sasaran 16

Kegagalan/penurunan pencapaian beberapa indikator pada sasaran **Terkendalinya laju pertumbuhan penduduk** disebabkan karena

adanya faktor kurang perhatian masyarakat terhadap program keluarga berencana, program kesehatan reproduksi remaja, program pelayanan kontrasepsi, program pembinaan peran serta masyarakat dalam pelayanan KB/KR mandiri, program penyiapan tenaga pendamping kelompok bina keluarga, dan program pengembangan data/informasi keluarga dan kependudukan.

Kesadaran masyarakat untuk menekan laju pertumbuhan penduduk dalam sebuah daerah, menandakan bahwa sebuah upaya revolusi paradigm dalam membawa daerah untuk berkembang dan maju. Semua upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah tentunya ingin melepaskan daerah kita dari keterpurukan akibat laju pertumbuhan penduduknya. Sebab jika hal ini berhasil maka masyarakat kitapun akan mengalami perubahan yang cukup signifikan yakni menuju masyarakat sejahtera

Sasaran 17

Keberhasilan/peningkatan pencapaian beberapa indikator pada sasaran **Meningkatnya kesesuaian antar dokumen perencanaan** yang merupakan program kegiatan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah didukung oleh Program Perencanaan Pembangunan Daerah, Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi, Program Perencanaan Sosial dan Budaya, Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam, Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah, Program Perencanaan Pengembangan Kota - Kota Menengah dan Besar, dan Program Pengembangan Data dan Informasi

Sasaran 18

Keberhasilan/peningkatan pencapaian beberapa indikator pada sasaran **Meningkatnya kualitas lingkungan hidup yang berkelanjutan** didukung oleh Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan, Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam, Program Pengelolaan dan Rehabilitasi Ekosistem Pesisir dan laut, Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan

Hidup, Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup, Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan, Program pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH).

Sasaran 19

Keberhasilan/peningkatan pencapaian beberapa indikator pada sasaran **Meningkatnya ketertiban, ketenteraman, keamanan dan kenyamanan dalam masyarakat** didukung oleh Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan, Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan, Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (PEKAT), Program Pendidikan Politik Masyarakat, Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah Program Penyelesaian Konflik - Konflik Pertanahan, Program Penataan Perundang-undangan, Program Legislasi Daerah, Program Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan, Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal.

Sasaran 20

Keberhasilan/peningkatan pencapaian beberapa indikator pada sasaran **Meningkatnya kerukunan hidup bermasyarakat** merupakan program kegiatan dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik didukung dengan Program Peningkatan Fungsi dan Peran Lembaga Keagamaan dan Tokoh Agama Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan Bidang Keagamaan.

Sasaran 21

Keberhasilan/peningkatan pencapaian beberapa indikator pada sasaran **Meningkatnya kompetensi sumber daya manusia aparatur dan kapasitas kelembagaan pemerintah daerah** didukung oleh Program Pendidikan Kedinasan, Program Fasilitasi Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informasi, Program Peningkatan Profesionalisme tenaga

Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan, Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur, Program pembinaan dan Pengembangan Aparatur, Program Penataan SOTK Organisasi Perangkat Daerah, Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Daerah, Program Penataan Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian, dan Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah.

Sasaran 22

Keberhasilan/peningkatan pencapaian beberapa indikator pada sasaran **Meningkatnya kualitas pelayanan publik** didukung oleh Program Peningkatan Pelayanan Publik, Program Peningkatan komunikasi dan informatika, Peningkatan sistem administrasi kearsipan, Peningkatan penanganan pengaduan, Peningkatan kerjasama antar pemerintah daerah, Peningkatan pelayanan penanggulangan bencana.

Sasaran 23

Keberhasilan/peningkatan pencapaian beberapa indikator pada sasaran **Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan daerah** didukung oleh Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH, Program Peningkatan Kesejahteraan imam desa/kelurahan, imam dusun/lingkungan serta guru mengaji, Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah, Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Daerah.

3.2.4 Analisis atas efisiensi penggunaan dana.

Sasaran 1

Anggaran yang direncanakan pada penetapan kinerja/perjanjian kinerja Tahun 2019 untuk pencapaian sasaran **Meningkatnya Keterpenuhan Sarana Ibadah** adalah sebesar Rp.966.846.200,00 dan dari anggaran tersebut terealisasi sebesar Rp.949.100.900,00 atau 91,24%. Dibandingkan rata-rata capaian kinerja sebesar 100% berarti tingkat efisiensi sebesar **8,76%**.

Sasaran 2

Anggaran yang direncanakan pada penetapan kinerja/perjanjian kinerja Tahun 2019 untuk pencapaian sasaran **Meningkatnya Indeks Pendidikan** adalah sebesar Rp.101.827.786,00 dan dari anggaran tersebut terealisasi sebesar Rp.96.389.019.163,00 atau 94,66%. Dibandingkan rata-rata capaian kinerja sebesar 100% berarti tingkat efisiensi sebesar **5,34%**.

Sasaran 3

Anggaran yang direncanakan pada penetapan kinerja/perjanjian kinerja Tahun 2019 untuk pencapaian sasaran **Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat** adalah sebesar Rp.89.846.440.727,00 dan dari anggaran tersebut terealisasi sebesar Rp 77.848.175.417.00 atau 86,65%. Dibandingkan rata-rata capaian kinerja sebesar 100% berarti tingkat efisiensi sebesar **13,35%**.

Sasaran 4

Anggaran yang direncanakan pada penetapan kinerja/perjanjian kinerja Tahun 2019 untuk pencapaian sasaran **Meningkatnya kesempatan kerja** adalah sebesar Rp.6.333.999.861,00 dan dari anggaran tersebut terealisasi

sebesar Rp.6.333.999.861,00 atau 100%. Dibandingkan rata-rata capaian kinerja sebesar 100%

Sasaran 5

Anggaran yang direncanakan pada penetapan kinerja/perjanjian kinerja Tahun 2019 untuk pencapaian sasaran **Meningkatnya prestasi keolahragaan** adalah sebesar Rp.2.363.840.000,00 dan dari anggaran tersebut terealisasi sebesar Rp.2.348.882,067,00 atau 99,36%. Dibandingkan rata-rata capaian kinerja sebesar 100% berarti tingkat efisiensi sebesar **0,64%**.

Sasaran 6

Anggaran yang direncanakan pada penetapan kinerja/perjanjian kinerja Tahun 2019 untuk pencapaian sasaran **Meningkatnya kesetaraan gender** adalah sebesar Rp.540.230.000,00 dan dari anggaran tersebut terealisasi sebesar Rp.537.219.827,00 atau 99,44%. Dibandingkan rata-rata capaian kinerja sebesar 100% berarti tingkat efisiensi sebesar **0,56%**.

Sasaran 7

Anggaran yang direncanakan pada penetapan kinerja/perjanjian kinerja Tahun 2019 untuk pencapaian sasaran **Meningkatnya Tertib Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil** adalah sebesar Rp.5.649.806.000,00 dan dari anggaran tersebut terealisasi sebesar Rp.5.590.122.703,00 atau 98,94%. Dibandingkan rata-rata capaian kinerja sebesar 100% berarti tingkat efisiensi sebesar **1,06%**.

Sasaran 8

Anggaran yang direncanakan pada penetapan kinerja/perjanjian kinerja Tahun 2019 untuk pencapaian sasaran **Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Jalan dan Jembatan** adalah sebesar Rp.253.864.156.160,00 dan dari anggaran tersebut terealisasi sebesar Rp.248.210.548.214,00 atau 97,77%. Dibandingkan rata-rata capaian kinerja sebesar 100% berarti tingkat efisiensi sebesar **2,23%**.

Sasaran 9

Anggaran yang direncanakan pada penetapan kinerja/perjanjian kinerja Tahun 2019 untuk pencapaian sasaran **Meningkatnya Kapasitas Perhubungan** adalah sebesar Rp.2.737.999.000,00 dan dari anggaran tersebut terealisasi sebesar Rp.2.596.386.907,00 atau 94,83%. Dibandingkan rata-rata capaian kinerja sebesar 100% berarti tingkat efisiensi sebesar **5,17%**.

Sasaran 10

Anggaran yang direncanakan pada penetapan kinerja/perjanjian kinerja Tahun 2019 untuk pencapaian sasaran **Meningkatnya Cakupan dan Efektifitas Layanan Irigasi** adalah sebesar Rp.22.600.335.603,00 dan dari anggaran tersebut terealisasi sebesar Rp.21.438.455.700,00 atau 94,86%. Dibandingkan rata-rata capaian kinerja sebesar 100% berarti tingkat efisiensi sebesar **5,14%**.

Sasaran 11

Anggaran yang direncanakan pada penetapan kinerja/perjanjian kinerja Tahun 2019 untuk pencapaian sasaran **Meningkatnya Kualitas Perumahan Layak Huni dan Penataan Permukiman Kumuh** adalah sebesar Rp. 16.167.753.338,00 dan dari anggaran tersebut terealisasi sebesar Rp. 13.804.182.802,00 atau 85,40%. Dibandingkan rata-rata capaian kinerja sebesar 100% berarti tingkat efisiensi sebesar **14,60%**.

Sasaran 12

Anggaran yang direncanakan pada penetapan kinerja/perjanjian kinerja Tahun 2019 untuk pencapaian sasaran **Meningkatnya Produksi Telur Ulat Sutra dan Kokon Dengan Didukung Ketersediaan Daun Murbei dan Tanaman Konservasi** adalah sebesar Rp.3.210.312.673,00 dan dari anggaran tersebut terealisasi sebesar Rp.3.047.467.622,00 atau 94,93%. Dibandingkan rata-rata capaian kinerja sebesar 100% berarti tingkat efisiensi sebesar **5,07%**.

Sasaran 13

Anggaran yang direncanakan pada penetapan kinerja/perjanjian kinerja Tahun 2019 untuk pencapaian sasaran **Meningkatnya Daya Saing Ekonomi Daerah** adalah sebesar Rp.13.088.862.475,00 dan dari anggaran tersebut terealisasi sebesar Rp.10.858.438.137,00 atau 82,96%. Dibandingkan rata-rata capaian kinerja sebesar 100% berarti tingkat efisiensi sebesar **11,04%**.

Sasaran 14

Anggaran yang direncanakan pada penetapan kinerja/perjanjian kinerja Tahun 2019 untuk pencapaian sasaran **Meningkatnya Ketahanan Pangan Daerah** adalah sebesar Rp.1.086.658.000,00 dan dari anggaran tersebut terealisasi sebesar Rp.1.069.658.000,- atau 99,67%. Dibandingkan rata-rata capaian kinerja sebesar 100% berarti tingkat efisiensi sebesar **0,33%**.

Sasaran 15

Anggaran yang direncanakan pada penetapan kinerja/perjanjian kinerja Tahun 2019 untuk pencapaian sasaran **Menurunnya Tingkat Kemiskinan dan Penanganan PMKS** adalah sebesar Rp.4.783.460.883,00 dan dari anggaran tersebut terealisasi sebesar Rp.4.564.786.702,00 atau 95,43%. Dibandingkan rata-rata capaian kinerja sebesar 100% berarti tingkat efisiensi sebesar **4,57%**.

Sasaran 16

Anggaran yang direncanakan pada penetapan kinerja/perjanjian kinerja Tahun 2016 untuk pencapaian sasaran **Terkendalnya Laju Pertumbuhan Penduduk** adalah sebesar Rp.9.478.080.129,00 dan dari anggaran tersebut terealisasi sebesar Rp.8.795.455.637,00 atau 92,79%. Dibandingkan rata-rata capaian kinerja sebesar 100% berarti tingkat efisiensi sebesar **1,21%**.

Sasaran 17

Anggaran yang direncanakan pada penetapan kinerja/perjanjian kinerja Tahun 2019 untuk pencapaian sasaran **Meningkatnya Kesesuaian Antar Dokumen Perencanaan** adalah sebesar Rp.5.310.810.000,00 dan dari anggaran tersebut terealisasi sebesar Rp.4.907.451.364,00 atau 92,40%. Dibandingkan rata-rata capaian kinerja sebesar 100% berarti tingkat efisiensi sebesar **7,60%**.

Sasaran 18

Anggaran yang direncanakan pada penetapan kinerja/perjanjian kinerja Tahun 2019 untuk pencapaian sasaran **Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup Yang Berkelanjutan** adalah sebesar Rp.9.447.886.023,00 dan dari anggaran tersebut terealisasi sebesar Rp.9.103.657.574,00 atau 96,36%. Dibandingkan rata-rata capaian kinerja sebesar 100% berarti tingkat efisiensi sebesar **3,24%**.

Sasaran 19

Anggaran yang direncanakan pada penetapan kinerja/perjanjian kinerja Tahun 2019 untuk pencapaian sasaran **Meningkatnya Ketertiban, Ketenteraman, Keamanan dan Kenyamanan Dalam Masyarakat** adalah sebesar Rp.7.159.619.373,00 dan dari anggaran tersebut terealisasi

sebesar Rp.7,038.814.189,00 atau 98,31%. Dibandingkan rata-rata capaian kinerja sebesar 100% berarti tingkat efisiensi sebesar **2,69%**.

Sasaran 20

Anggaran yang direncanakan pada penetapan kinerja/perjanjian kinerja Tahun 2019 untuk pencapaian sasaran **Meningkatnya Kerukunan Hidup Bermasyarakat** adalah sebesar Rp.3.425.783.312,00 dan dari anggaran tersebut terealisasi sebesar Rp.3.295.488,00 atau 96,14%. Dibandingkan rata-rata capaian kinerja sebesar 100% berarti tingkat efisiensi sebesar **3,84%**.

Sasaran 21

Anggaran yang direncanakan pada penetapan kinerja/perjanjian kinerja Tahun 2019 untuk pencapaian sasaran **Meningkatnya Kompetensi Sumber Daya Manusia Aparatur dan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah** adalah sebesar Rp.7.635.559.429,00 dan dari anggaran tersebut terealisasi sebesar Rp.7.524.840.891,00 atau 98,34%. Dibandingkan rata-rata capaian kinerja sebesar 100% berarti tingkat efisiensi sebesar **1,66%**.

Sasaran 22

Anggaran yang direncanakan pada penetapan kinerja/perjanjian kinerja Tahun 2019 untuk pencapaian sasaran **Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik** adalah sebesar Rp. 3.577.434.004,00 dan dari anggaran tersebut terealisasi sebesar Rp.3.344.080.059,00 atau 99,93%. Dibandingkan rata-rata capaian kinerja sebesar 100% berarti tingkat efisiensi sebesar **0,07%**.

Sasaran 23

Anggaran yang direncanakan pada penetapan kinerja/perjanjian kinerja Tahun 2019 untuk pencapaian sasaran **Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Daerah** adalah sebesar Rp.5.088.039.000,00 dan dari anggaran tersebut terealisasi sebesar Rp.4.834.393.228,00 atau ,95,01%. Dibandingkan rata-rata capaian kinerja sebesar 100% berarti tingkat efisiensi sebesar **4,99%**.

3.2.5 Analisis Program yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

Sasaran 1

Program yang menunjang keberhasilan pencapaian sasaran **Meningkatnya Keterpenuhan Sarana Ibadah** adalah sebanyak 3 program, yaitu:

- Program Peningkatan Sarana Ibadah.
- Program Peningkatan Kesejahteraan imam desa / kelurahan, imam dusun / lingkungan serta guru mengaji.
- Program fasilitasi pelaksanaan ibadah dan perayaan keagamaan.

Sasaran 2

Program yang menunjang keberhasilan pencapaian sasaran **Meningkatnya Indeks Pendidikan** adalah sebanyak 10 Program yaitu, yaitu:

- Program Pendidikan Anak Usia Dini.
- Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun.
- Program Pendidikan Menengah dan Kejuruan.
- Program Pendidikan Non Formal dan Informal.
- Program Peningkatan Pelayanan Perpustakaan.

- Program Pengembangan Budaya Baca.
- Program Pengembangan Kelembagaan Perpustakaan.
- Program Pengkajian Perencanaan Pendidikan.
- Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan.
- Program Manajemen Pelayanan Pendidikan.

Sasaran 3

Program yang menunjang keberhasilan pencapaian sasaran **Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat** adalah sebanyak 19 Program, yaitu:

- Program Penanganan 1000 hari Pertama Kehidupan.
- Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak.
- Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan anak Balita.
- Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia.
- Program Pengembangan Institusi Pendidikan Kesehatan.
- Program Upaya Kesehatan Masyarakat.
- Program Obat dan Perbekalan Kesehatan.
- Program Pengawasan Obat dan Makanan.
- Program pencegahan dan Penanggulangan Penyakit menular.
- Program Pengawasan dan Pengendalian Kesehatan Makanan.
- Program Pengadaan, Peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas /puskesmas pembantu dan jaringannya.
- Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit / rumah sakit jiwa / rumah sakit paru-paru / rumah sakit mata.
- Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit / Rumah Sakit Jiwa / Rumah Sakit Paru-Paru / Rumah Sakit Mata.
- Program Standarisasi pelayanan Kesehatan.

- Program Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan BLUD.
- Program Pengembangan Obat Asli Indonesia.
- Program Perbaikan Gizi Masyarakat.
- Program Kemitraan peningkatan pelayanan Kesehatan.
- Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat.

Sasaran 4

Program yang menunjang keberhasilan pencapaian sasaran **Meningkatnya kesempatan kerja** adalah sebanyak 3 program, yaitu:

- Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja.
- Program Peningkatan Kesempatan Kerja.
- Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan.

Sasaran 5

Program yang menunjang keberhasilan pencapaian sasaran **Meningkatnya prestasi keolahragaan** adalah sebanyak 6 program, yaitu:

- Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan.
- Program Pengembangan dan Keserasian Kebijakan Pemuda.
- Program Peningkatan Upaya Penumbuhan Kewirausahaan dan Kecakapan Hidup Remaja.
- Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga.
- Program Pengembangan Kebijakan dan Manajemen Olah Raga.
- Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olah Raga.

Sasaran 6

Program yang menunjang keberhasilan pencapaian sasaran **Meningkatnya kesetaraan gender** adalah sebanyak 4 program, yaitu:

- Program Penguatan Kelembagaan PUG dan Anak.
- Program Peningkatan Peran Serta Kesetaraan Gender Dalam Pembangunan.
- Program Pemberdayaan Ekonomi Perempuan.
- Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan dan Anak.

Sasaran 7

Program yang menunjang keberhasilan pencapaian sasaran **Meningkatnya tertib administrasi kependudukan dan catatan sipil** adalah sebanyak 2 Program, yaitu:

- Program Penataan Administrasi Kependudukan.
- Program Penataan Administrasi Catatan Sipil.

Sasaran 8

Program yang menunjang keberhasilan pencapaian sasaran **Meningkatnya kualitas infrastruktur jalan dan jembatan** adalah sebanyak 10 Program, yaitu:

- Program Pembangunan Jalan dan Jembatan.
- Program Pembangunan/ Pemeliharaan Jalan dan Jembatan.
- Program Pembangunan, Peningkatan dan Pemeliharaan Konstruksi Jalan, Jembatan dan Keciaptakaryaan.
- Program Pembangunan dan Pemeliharaan Bangunan Keciaptakaryaan.
- Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan.
- Program Pembangunan / Pemeliharaan Drainase, Duiker dan Gorong-Gorong.
- Program Pembangunan Turap, Talud & Bronjong.
- Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan.

- Program Pengembangan Kawasan Perdesaan.
- Program Pengendalian Banjir.

Sasaran 9

Program yang menunjang keberhasilan pencapaian sasaran **Meningkatnya Kapasitas Perhubungan** adalah sebanyak 3 program, yaitu:

- Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan.
- Program Peningkatan Pelayanan Angkutan.
- Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas.

Sasaran 10

Program yang menunjang keberhasilan pencapaian sasaran **Meningkatnya cakupan dan efektivitas layanan irigasi** adalah sebanyak 2 program, yaitu:

- Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa, Sungai, Danau, Jaringan Pengairan Lainnya dan PPIP
- Program Pengembangan, Pengelolaan, dan Konservasi Sungai, Danau dan Sumber Air Lainnya.

Sasaran 11

Program yang menunjang keberhasilan pencapaian sasaran **Meningkatnya kualitas perumahan layak huni dan penataan permukiman kumuh** adalah sebanyak 10 program, yaitu:

- Program Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong.
- Program Pemberdayaan Komunitas Perumahan / Pemukiman.
- Program Pembangunan Sarana / Prasarana Air Bersih dan Sanitasi.
- Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Masyarakat.

- Program Percepatan Sanitasi Permukiman di Daerah.
- Program Lingkungan Sehat Perumahan.
- Program Pengembangan Perumahan.
- Program Perencanaan Tata Ruang.
- Program Pemanfaatan Ruang.
- Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang.

Sasaran 12

Program yang menunjang keberhasilan pencapaian sasaran **Meningkatnya produksi telur ulat sutra dan kokon dengan didukung ketersediaan daun murbei dan tanaman konservasi** adalah sebanyak 12 program, yaitu:

- Program Penguatan Kelembagaan UPTD
- Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan.
- Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Hutan.
- Program Perencanaan dan Pengembangan Hutan.
- Program Pembinaan dan Penertiban Industri Hasil Hutan.
- Program Peningkatan Kesejahteraan Petani.
- Program Peningkatan Ketahanan Pangan.
- Program Peningkatan Produksi Pertanian / Kehutanan.
- Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Komoditi Perkebunan.
- Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan.
- Program Pengembangan Sarana dan Prasarana Kehutanan.
- Program Perencanaan dan Evaluasi Daerah Aliran Sungai.

Sasaran 13

Program yang menunjang keberhasilan pencapaian sasaran **Meningkatnya daya saing ekonomi daerah** adalah sebanyak 2 program, yaitu:

- Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata.
- Program Pengembangan Destinasi Pariwisata.

Sasaran 14

Program yang menunjang keberhasilan pencapaian sasaran **Meningkatnya ketahanan pangan daerah** adalah sebanyak 3 program, yaitu:

- Program Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan (P2KP).
- Program Analisis Pola Pangan Konsumsi Pangan Harapan Dengan Pendekatan Pola Pangan Harapan (PPH).
- Program Lomba Cipta Menu B2SA.
- Program Hari Pangan Sedunia (HPS).
- Program Expo Gelar Pangan Nusantara
- Program Peningkatan Kapasitas Aparatur dan Pelaku Usaha Dalam Pengembangan Konsumsi dan Keamanan Pangan.

Sasaran 15

Program yang menunjang keberhasilan pencapaian sasaran **Menurunnya tingkat kemiskinan dan penanganan PMKS** adalah sebanyak 7 program, yaitu:

- Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komoditas Adat Terpencil, Dan PMKS Lainnya.
- Program Perlindungan dan Jaminan Sosial
- Program Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial

- Program Pembinaan Para Penyandang Cacat Dan Ekstrauma
- Program Pembinaan Eks Penyakit Sosial Lainnya
- Program Pemberdayaan Kelembagaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial
- Program Pemberdayaan, Perorangan, Keluarga dan Masyarakat

Sasaran 16

Program yang menunjang keberhasilan pencapaian sasaran **Terkendalnya laju pertumbuhan penduduk** adalah sebanyak 6 program, yaitu:

- Program Keluarga Berencana.
- Program Kesehatan Reproduksi Remaja.
- Program Pelayanan Kontrasepsi.
- Program Pembinaan Peran Serta Masyarakat Dalam Pelayanan KB/KR Mandiri.
- Program Penyiapan Tenaga Pendamping Kelompok Bina Keluarga.
- Program Pengembangan Data/Informasi Keluarga Dan Kependudukan.

Sasaran 17

Program yang menunjang keberhasilan pencapaian sasaran **Meningkatnya kesesuaian antar dokumen perencanaan** adalah sebanyak 8 program, yaitu:

- Program Perencanaan Pembangunan Daerah.
- Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi.
- Program Perencanaan Sosial dan Budaya.
- Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam.

- Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah.
- Program Perencanaan Pengembangan Kota - Kota Menengah dan Besar.
- Program Kerjasama Pembangunan.
- Program Pengembangan Data dan Informasi.

Sasaran 18

Program yang menunjang keberhasilan pencapaian sasaran **Meningkatnya kualitas lingkungan hidup yang berkelanjutan** adalah sebanyak 7 program, yaitu:

- Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan.
- Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam.
- Program Pengelolaan dan Rehabilitasi Ekosistem Pesisir dan laut.
- Program Pengendalian Pencemaran dan Pengrusakan Lingkungan Hidup.
- Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup.
- Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan.
- Program pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH).

Sasaran 19

Program yang menunjang keberhasilan pencapaian sasaran **Meningkatnya ketertiban, ketenteraman, keamanan dan kenyamanan dalam masyarakat** adalah sebanyak 11 program, yaitu:

- Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan.
- Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan.
- Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (PEKAT).

- Program Pendidikan Politik Masyarakat.
- Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah.
- Program Penyelesaian Konflik - Konflik Pertanahan.
- Program Penataan Perundang-undangan.
- Program Legislasi Daerah.
- Program Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah.
- Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan.
- Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal.

Sasaran 20

Program yang menunjang keberhasilan pencapaian sasaran **Meningkatnya kerukunan hidup bermasyarakat** adalah sebanyak 2 program, yaitu:

- Program Peningkatan Fungsi dan Peran Lembaga Keagamaan dan Tokoh Agama.
- Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan Bidang Keagamaan.

Sasaran 21

Program yang menunjang keberhasilan pencapaian sasaran **Meningkatnya kompetensi sumber daya manusia aparatur dan kapasitas kelembagaan pemerintah daerah** adalah sebanyak 9 program, yaitu:

- Program Pendidikan Kedinasan.
- Program Fasilitasi Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informasi.
- Program Peningkatan Profesionalisme tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan.

- Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur.
- Program pembinaan dan Pengembangan Aparatur
- Program Penataan SOTK Organisasi Perangkat Daerah.
- Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Daerah.
- Program Penataan Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian.
- Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah.

Sasaran 22

Program yang menunjang keberhasilan pencapaian sasaran **Meningkatnya kualitas pelayanan publik** adalah sebanyak 16 program, yaitu:

- Program Peningkatan Pelayanan Publik.
- Program Peningkatan Pelayanan Kepala Daerah / Wakil Kepala Daerah.
- Program Peningkatan Kesejahteraan, Bantuan Sosial dan Bantuan Hukum Anggota Korpri.
- Program Pengembangan Komunikasi, informasi dan Media massa.
- Program Kerja sama informasi dengan mas media.
- Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi.
- Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan.
- Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kearsipan.
- Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah.
- Program Menitensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat.
- Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah.
- Program Pencegahan dan Kesiapsiagaan.
- Program Kedaruratan dan Logistik Penanggulangan Bencana.
- Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi Penanggulangan Bencana.

- Program Pelayanan Pemadam Kebakaran.

Sasaran 23

Program yang menunjang keberhasilan pencapaian sasaran **Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan daerah** adalah sebanyak 3 program, yaitu:

- Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH.
- Program Peningkatan Kesejahteraan imam desa/kelurahan, imam dusun/lingkungan serta guru mengaji.
- Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa.
- Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Daerah.

3.3 Realisasi Anggaran

Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Wajo Tahun 2019 yang dibiayai dengan anggaran yang tertuang dalam APBD Tahun 2019 yang disahkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 10 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Kabupaten Wajo Tahun Anggaran 2019, Peraturan Bupati Wajo Nomor 136 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Kabupaten Wajo Tahun Anggaran 2019.

APBD Kabupaten Wajo Tahun 2019, secara garis besar terdiri dari tiga bagian yaitu, Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan. Garis besar APBD Tahun 2019 dan realisasinya berdasarkan data, adalah sebagai berikut:

I. LAPORAN REALISASI ANGGARAN (LRA)



PEMERINTAH KABUPATEN WAJO
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
 UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2019 DAN 2018

(Dalam Rupiah)

NO	URAIAN	Reff CaLK	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN 2019	REALISASI 2019	(%)	REALISASI 2018
1	PENDAPATAN - LRA	7.4.1.1				
2	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - LRA	7.4.1.1.1				
3	Pendapatan Pajak Daerah - LRA	7.4.1.1.1.a	36.553.088.504,00	37.334.127.531,67	102,14%	34.622.288.206,50
4	Pendapatan Retribusi Daerah - LRA	7.4.1.1.1.b	17.478.607.236,00	14.527.673.219,25	83,12%	11.084.758.817,20
5	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan - LRA	7.4.1.1.1.c	16.150.196.376,00	16.150.196.376,00	100,00%	14.144.241.966,00
6	Lain-lain PAD Yang Sah - LRA	7.4.1.1.1.d	75.590.100.039,00	74.145.699.694,13	98,09%	74.149.671.873,63
7	JUMLAH PENDAPATAN ASLI DAERAH - LRA (3 sd 6)		145.771.992.155,00	142.157.696.821,05	97,52%	134.000.960.863,33
8						
9	PENDAPATAN TRANSFER - LRA	7.4.1.1.2				
10	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - LRA					
11	Bagi Hasil Pajak - LRA	7.4.1.1.2.a	29.379.658.000,00	20.353.560.600,00	69,28%	29.327.922.838,00
12	Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam - LRA	7.4.1.1.2.b	67.586.668.000,00	37.767.431.609,00	55,88%	23.349.400.970,00
13	Dana Alokasi Umum (DAU) - LRA	7.4.1.1.2.c	753.977.048.000,00	753.977.048.000,00	100,00%	714.224.148.000,00
14	Dana Alokasi Khusus (DAK) - LRA	7.4.1.1.2.d	264.130.047.429,94	263.776.421.555,00	99,87%	280.429.998.297,00
15	Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - LRA (11 sd 14)		1.115.073.421.429,94	1.075.874.461.764,00	96,48%	1.047.331.470.105,00
16	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya - LRA					
17	Dana Otonomi Khusus - LRA		0,00	0,00	0,00%	0,00
18	Dana Penyesuaian - LRA	7.4.1.1.2.e	151.619.187.000,00	151.619.189.000,00	100,00%	122.163.127.626,00
19	Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya - LRA (17 sd 18)		151.619.187.000,00	151.619.189.000,00	100,00%	122.163.127.626,00
20	Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya - LRA					
21	Pendapatan Bagi Hasil Pajak - LRA	7.4.1.1.2.f	65.850.000.000,00	70.278.743.047,15	106,73%	56.100.926.841,00
22	Pendapatan Bagi Hasil Lainnya - LRA		0,00	0,00	0,00%	0,00
23	Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya - LRA (21 sd 22)		65.850.000.000,00	70.278.743.047,15	106,73%	56.100.926.841,00
24	Bantuan Keuangan - LRA					
25	Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah Provinsi	7.4.1.1.2.g	0,00	0,00	0,00%	0,00
26	Jumlah Bantuan Keuangan - LRA (25)		0,00	0,00	0,00%	0,00
27	JUMLAH PENDAPATAN TRANSFER - LRA (15+19+23+26)		1.332.542.608.429,94	1.297.772.393.811,15	97,39%	1.225.595.524.572,00
28						
29	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH - LRA	7.4.1.1.3				
30	Pendapatan Hibah - LRA		53.532.358.000,00	126.489.200.713,00	236,29%	48.007.130.579,00
31	Pendapatan Dana Darurat - LRA		0,00	0,00	0,00%	0,00
32	Pendapatan Lainnya - LRA		0,00	0,00	0,00%	0,00
33	JUMLAH LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH - LRA (30 sd 32)		53.532.358.000,00	126.489.200.713,00	236,29%	48.007.130.579,00
34	JUMLAH PENDAPATAN - LRA (7+27+33)		1.531.846.958.584,94	1.566.419.291.345,20	102,26%	1.407.603.616.014,33
35						
36	BELANJA	7.4.1.2				
37	BELANJA OPERASI	7.4.1.2.1				
38	Belanja Pegawai	7.4.1.2.1.a	627.139.021.439,59	612.418.860.600,00	97,65%	588.084.977.023,30
39	Belanja Barang dan Jasa	7.4.1.2.1.b	330.007.487.241,00	307.305.377.865,81	93,12%	326.639.488.005,95
40	Belanja Bunga	7.4.1.2.1.c	0,00	0,00	0,00%	0,00
41	Belanja Subsidi		0,00	0,00	0,00%	0,00
42	Belanja Hibah	7.4.1.2.1.d	35.012.964.564,00	33.180.634.494,00	94,77%	61.848.682.374,00
43	Belanja Bantuan Sosial	7.4.1.2.1.e	3.901.666.704,54	3.600.156.080,00	92,27%	6.034.000.000,00
44	Belanja Bantuan Keuangan		0,00	0,00	0,00%	0,00
45	JUMLAH BELANJA OPERASI (38 sd 44)		996.061.139.949,13	956.505.029.039,81	96,03%	983.407.147.403,25
46						
47	BELANJA MODAL	7.4.1.2.2				
48	Belanja Modal Tanah	7.4.1.2.2.a	1.204.000.000,00	1.137.691.750,00	94,49%	2.024.699.450,00
49	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	7.4.1.2.2.b	51.409.356.061,00	50.596.897.619,70	98,42%	41.578.959.140,22
50	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	7.4.1.2.2.c	55.481.641.425,00	52.233.776.991,00	94,15%	49.438.813.425,00
51	Belanja Modal Jalan, Trigras dan Jaringan	7.4.1.2.2.d	204.716.299.514,00	268.021.270.858,99	130,92%	110.854.446.191,00
52	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	7.4.1.2.2.e	13.625.128.941,00	10.496.182.613,00	77,04%	9.473.481.234,00
53	Belanja Modal Aset Lainnya	7.4.1.2.2.f	0,00	0,00	0,00%	0,00
54	JUMLAH BELANJA MODAL (48 sd 53)		326.436.425.941,00	382.485.819.832,69	117,17%	213.370.399.448,22
55						
56	BELANJA TAK TERDUGA	7.4.1.2.3				
57	Belanja Tak Terduga		1.558.951.600,00	1.478.283.048,00	94,83%	1.924.268.244,00
58	JUMLAH BELANJA TAK TERDUGA (57)		1.558.951.600,00	1.478.283.048,00	94,83%	1.924.268.244,00
59	JUMLAH BELANJA (45+54+58)		1.324.056.517.490,13	1.340.469.131.920,50	101,24%	1.198.701.815.095,47

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Wajo 2019

1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN (LRA)



PEMERINTAH KABUPATEN WAJO
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
 UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2019 DAN 2018

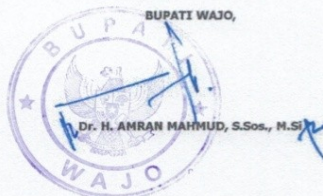
(Dalam Rupiah)

NO	URAIAN	Reff CaLK	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN 2019	REALISASI 2019	(%)	REALISASI 2018
61	TRANSFER	7.4.1.3				
62	TRANSFER BAGI HASIL PENDAPATAN	7.4.1.3.1				
63	Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah	7.4.1.3.1.a	3.880.799.121,48	3.613.036.514,18	93,10%	3.257.557.277,00
64	Transfer Bagi Hasil Retribusi Daerah	7.4.1.3.1.b	1.747.860.723,60	1.081.007.078,87	61,85%	1.007.509.799,44
65	Transfer Bagi Hasil Pendapatan Lainnya		0,00	0,00	0,00%	0,00
66	JUMLAH TRANSFER BAGI HASIL PENDAPATAN (63 sd 64)		5.628.659.845,08	4.694.043.593,05	83,40%	4.265.467.076,44
67	TRANSFER BANTUAN KEUANGAN	7.4.1.3.2				
68	Transfer Bantuan Keuangan ke Pemerintah Daerah Lainnya		0,00	0,00	0,00%	0,00
69	Transfer Bantuan Keuangan ke Desa	7.4.1.3.2.a	84.594.475.000,00	84.589.375.000,00	99,99%	120.563.405.042,65
70	Transfer Bantuan Keuangan Lainnya	7.4.1.3.2.b	913.278.960,00	867.036.027,00	94,99%	913.278.960,00
71	Transfer Dana Otonomi Khusus	7.4.1.3.2.c	119.030.097.000,00	119.030.097.000,00	100,00%	104.142.600.300,00
72	JUMLAH TRANSFER BAGI HASIL PENDAPATAN (68 sd 70)		204.537.850.960,00	204.486.508.027,00	99,97%	225.619.284.302,65
73	JUMLAH TRANSFER (65+71)		210.166.510.805,08	209.180.551.620,05	99,53%	229.884.751.379,09
74	JUMLAH BELANJA DAN TRANSFER (59+72)		1.534.223.028.295,21	1.549.649.683.540,55	101,01%	1.428.586.566.474,56
75	SURPLUS / (DEFISIT) (34-73)		(2.376.069.710,27)	16.769.607.804,65	-705,77%	(20.982.950.460,23)
76	PEMBIAYAAN	7.4.1.4				
77	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	7.4.1.4.1				
78	Penggunaan SILPA		6.376.069.710,27	6.376.069.710,27	100,00%	35.081.020.170,50
79	Penerimaan Kembali Piutang		0,00	0,00	0,00%	0,00
80	Penerimaan Kembali Investasi Non Permanen Lainnya		0,00	0,00	0,00%	0,00
81	JUMLAH PENERIMAAN (79 sd 81)		6.376.069.710,27	6.376.069.710,27	100,00%	35.081.020.170,50
82	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	7.4.1.4.2				
83	Pembentukan Dana Cadangan		0,00	0,00	0,00%	0,00
84	Penyertaan Modal/Investasi Pemerintah Daerah		4.000.000.000,00	4.000.000.000,00	100,00%	7.697.000.000,00
85	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bank		0,00	0,00	0,00%	0,00
86	Pembayaran Utang Pemda	7.4.1.4.2.a	0,00	0,00	0,00%	25.000.000,00
87	JUMLAH PEMBIAYAAN (85 sd 88)		4.000.000.000,00	4.000.000.000,00	100,00%	7.722.000.000,00
88	PEMBIAYAAN NETTO (82-89)		2.376.069.710,27	2.376.069.710,27	100,00%	27.359.020.170,50
89	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA) (75+90)	7.4.1.5	0,00	19.145.677.514,92	0,00%	6.376.069.710,27

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

Sengkang, Maret 2020

BUPATI WAJO,



Sumber: *Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2019*

Dari tabel diatas dapat dijelaskan sebagai berikut:

3.3.1 Pendapatan

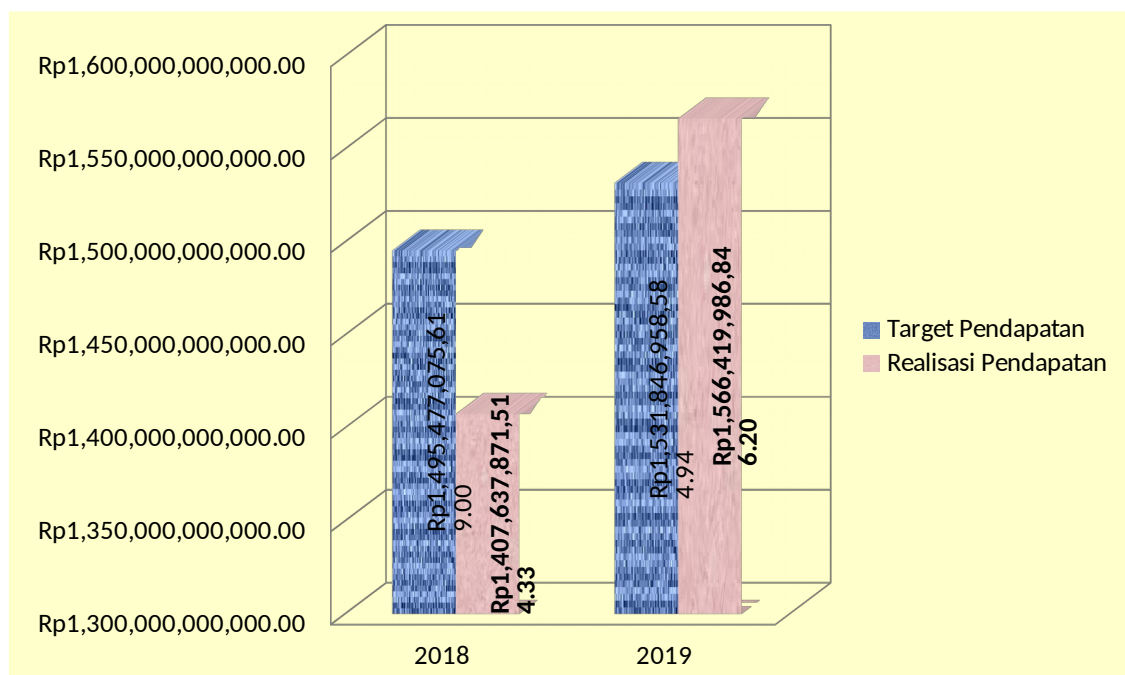
Target dan Realisasi Pendapatan Pemerintah Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2019 mengalami peningkatan dibandingkan dengan Tahun 2018. Target di Tahun 2018 Rp.1.495.477.075.619,00 meningkat pada tahun 2019

Rp.1.566.419.986.846,20 sebesar **1,02%**. Dan Realisasi pengeluaran juga mengalami peningkatan yakni pada tahun 2018 Rp1.407.637.871.514,33 naik menjadi Rp. 1.549.558.683.570,55. atau sebesar **1,10%**

Realisasi pendapatan untuk Tahun anggaran 2019 telah memenuhi target yang direncanakan dalam APBD Kabupaten Wajo yakni dari target sebesar Rp.1,531.846.954.584,94 dan terealisasi sebesar Rp1.566.419.986.846,20 atau **102,25 %**

Diagram 2

Perbandingan Antara Target Pendapatan dan Realisasi Pendapatan Pemerintah Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2018-2019



Sumber : Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2018-2019

Anggaran capaian pendapatan ini bisa dikatakan sangat baik disebabkan karena adanya peningkatan Target dan Realisasi Pendapatan dari Tahun 2018 ke 2019.

Beberapa upaya Pemerintah Daerah Kabupaten Wajo dalam meningkatkan pencapaian target dan realisasi pendapatan dengan beberapa kebijakan sebagai berikut:

- a. Meningkatkan intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan khususnya yang bersumber dari pajak dan retribusi daerah terutama melalui pendayagunaan

aset daerah namun dengan tetap menjaga agar peningkatan penerimaan pajak dan retribusi daerah tidak menambah beban masyarakat dan tidak menimbulkan distorsi ekonomi baik jangka pendek maupun jangka panjang.

- b. Peningkatan kemampuan dan optimalisasi organisasi di bidang pendapatan atau organisasi penghasil, antara lain dengan memberikan kewenangan yang lebih luas dalam mengoptimalkan perolehan pendapatan daerah. Penyederhanaan sistem dan prosedur administrasi pemungutan pajak dan retribusi daerah guna meningkatkan ketaatan wajib pajak dan pembayar retribusi daerah.
- c. Perbaiki sistem dan mekanisme penarikan pajak dan retribusi daerah ditempat-tempat strategis sehingga mengurangi resiko kebocoran PAD.
- d. Meningkatkan koordinasi antara pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten dalam peningkatan pendapatan khususnya yang bersumber dari dana perimbangan.
- e. Peningkatan kualitas pelayanan untuk mendekatkan dan memudahkan masyarakat serta menyederhanakan sistem dan prosedur pelayanan.

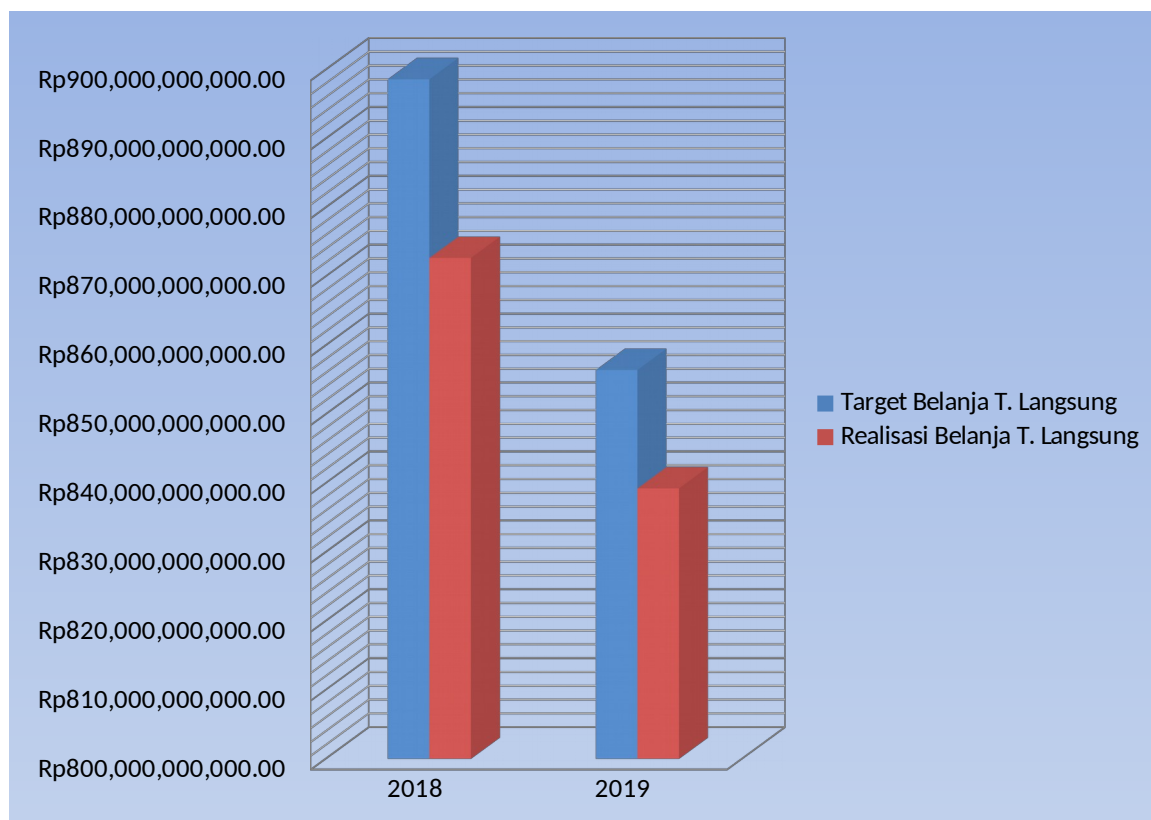
3.3.2 Belanja Tidak Langsung

Target dan Realisasi Belanja Tidak Langsung Pemerintah Kabupaten Wajo Tahun 2019 mengalami penurunan jika dibandingkan dengan Tahun 2018.

- Target Belanja 2018 sebesar Rp.898.642.926.630,50 sedangkan pada tahun 2019 target belanja sebesar Rp.856.456.436.549,21. Anggaran Belanja ini mengalami penurunan sebesar 1.04%;
- Sedangkan Realisasi Belanja pada Tahun 2018 sebesar Rp.872.719.118.646,39 dan pada tahun 2019 sebesar Rp. 839.273.499.348.05 Realisasi Anggaran Belanja mengalami penurunan sebesar 1.03%;

Diagram 3

Perbandingan Antara Target Belanja Tidak Langsung dan Realisasi Belanja Tidak Langsung Pemerintah Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2018-2019



Sumber : Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2018-2019

Realisasi Belanja Tidak Langsung mengalami peningkatan pada beberapa belanja, dapat dijelaskan sebagai berikut:

- Perubahan Anggaran untuk **Belanja Pegawai** yaitu pada 2018 Target Belanja sebesar Rp.604.226.836.600,50 dan Realisasi Belanja sebesar Rp.588.451.824.223,30 atau 97,39% sedangkan pada tahun 2019 target belanja sebesar Rp. 626.871.007.439,21 sementara realisasi belanja pegawai sebesar Rp. 612.161.808.600,00. Sehingga mengalami penurunan pada Target Belanja dengan Realisasi Belanja sebesar 0,97 %
- Perubahan Anggaran untuk **Belanja Hibah** yaitu pada Tahun 2018 Target Belanja sebesar Rp.55.800.081.250,00 dan Realisasi Belanja sebesar

Rp.46.424.274.800,00 atau 83,20% sementara pada tahun 2019 target belanja Rp. 13.958.300.000,00 dan realisasi anggaran sebesar Rp. 12.852.700.000,00 Anggaran ini mengalami penurunan pada Target Belanja dan realisasi belanja sebesar 0,92 %

- Perubahan Anggaran untuk **Belanja Bantuan Sosial** yaitu pada 2018 Target Belanja sebesar Rp.6.160.000.000,00 dan Realisasi Belanja sebesar Rp.6.034.000.000,00 sementara pada tahun 2019 target belanja sebesar Rp. 3.901.666.704,54 sedangkan realisasi anggaran sebesar Rp. 3.600.156.080,00 . Anggaran ini mengalami penurunan pada Target Belanja dan Realisasi sebesar 0.92 %;
- Perubahan Anggaran untuk **Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa** yaitu pada Tahun 2018 Target Belanja sebesar Rp.225.543.207.660,00 dan Realisasi Belanja sebesar Rp.225.552.405.660,00 sedangkan pada Tahun 2019 target belanja sebesar Rp. 204.537.850.960,00 sementara realisasi anggaran sebesar Rp. 204.486.508.027,00 Anggaran ini mengalami penurunan pada Target Belanja dan Realisasi sebesar 0.99%;
- Untuk Anggaran **Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa** hanya adapada Tahun 2018 saja yaitu dengan Target Belanja sebesar Rp.4.654.849,520,00 dan Realisasi Belanja sebesar Rp.4.332.345,719,09 sedangkan pada tahun 2019 target belanja sebesar Rp. 5.628.659.845,08 sementara realisasi belanja sebesar Rp. 4.694.043.593.05 sehingga ada penurunan sebesar 0.83 %
- Perubahan Anggaran untuk **Belanja Tidak Terduga** yaitu Tahun 2018 Target Belanja sebesar Rp.2.257.951.600,00 dan Realisasi Belanja sebesar Rp.1.924.268.244,00. Sehingga mengalami penurunan pada Target Belanja sebesar 19,10% dan kenaikan pada Realisasi Belanja sebesar 31,92% sementara pada tahun 2019 target belanja sebesar Rp. 1.558.951.600.,00 sementara realisasi belanja sebesar Rp. 1.478.283.048,00 sehingga terjadi penurunan sebesar 0.94 %

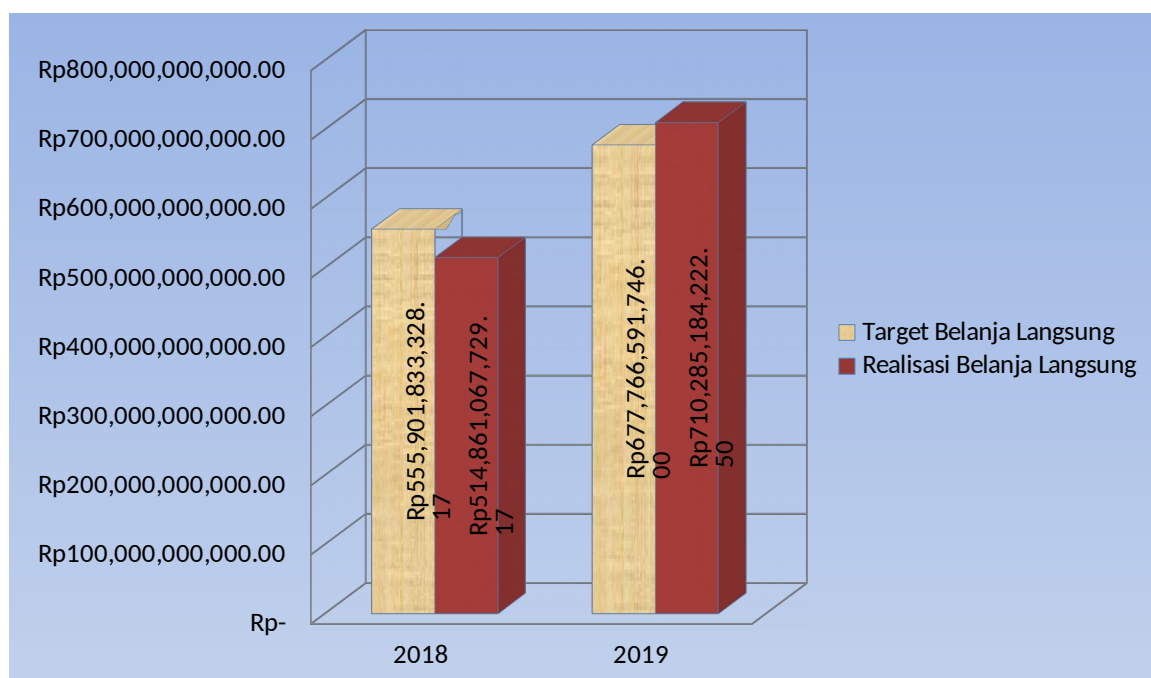
3.3.3 Belanja Langsung

Target dan Realisasi Belanja Langsung Pemerintah Kabupaten Wajo Tahun 2018 mengalami penurunan jika dibandingkan dengan Tahun 2019.

- Target Belanja pada Tahun 2018 sebesar Rp.761.132.924.785,14 dan Realisasi Belanja Tahun 2018 sebesar Rp.514.861.067.729,17. Sehingga mengalami penurunan sebesar 32,26%;
- Sedangkan pada tahun 2019 target belanja sebesar Rp. 677.766.591.746,00 sementara realisasi anggaran sebesar Rp. 710.285.184.222.50 sehingga mengalami kenaikan sebesar 1.04 %

Diagram 4

Perbandingan Antara Target Anggaran dan Realisasi Belanja Pemerintah Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2018-2019



Sumber : Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2018-2019

Realisasi belanja yang tidak maksimal disebabkan karena adanya penurunan pada beberapa belanja, dapat dijelaskan sebagai berikut:

- Perubahan Anggaran untuk **Belanja Pegawai** yaitu pada 2018 Target Anggaran sebesar Rp.40.997.759.355,00 dan Realisasi Belanja sebesar

Rp.32.334.420.594,00 atau sementara pada tahun 2019 target anggaran Rp. 46.594.311.145.00. Anggaran ini mengalami penurunan pada realisasi Anggaran sebesar Rp. 44.708.875.635,00 dengan penurunan Realisasi Belanja sebesar 95 %;

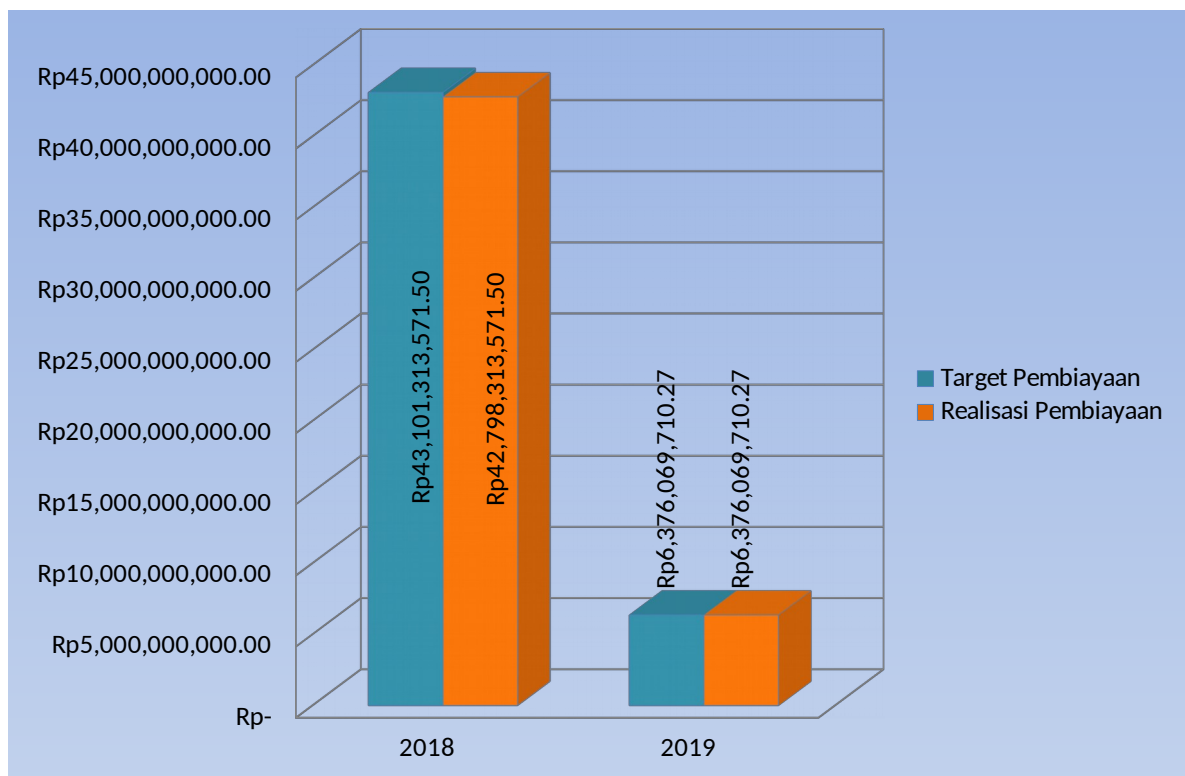
- Perubahan Anggaran untuk **Belanja Barang dan Jasa** yaitu pada Tahun 2018 Target Anggaran sebesar Rp.301.533.674.535,95 dan Realisasi Belanja sebesar Rp.278.287.027.325,95 atau 92,29%, sehingga anggaran mengalami penurunan pada Target Anggaran sebesar 12,83% dengan penurunan Realisasi Belanja sebesar 16,59% sedangkan pada tahun 2019 target anggaran sebesar Rp. 304.735.854.660.00 dan realisasi anggaran sebesar Rp. 283.114.288.754,00 sehingga terjadi penurunan antara target anggaran dan realisasi anggaran sebesar 0,93 %
- Perubahan Anggaran untuk **Belanja Modal** yaitu pada 2018 Target Anggaran sebesar Rp.213.370.399.448,33 dan Realisasi Belanja sebesar Rp.204.239.619.809,22 atau 95,72%, Sehingga anggaran ini mengalami penurunan pada Target Anggaran sebesar 45,12% dengan penurunan Realisasi Belanja sebesar 44,93%; sedangkan pada tahun 2019 target anggaran sebesar Rp. 326.436.425.941,00 sedangkan realisasi anggaran sebesar Rp. 382.462.019.832,69 sehingga antara target anggaran dan realisasi anggaran mengalami kenaikan sebesar 1.17 %

3.3.4 Pembiayaan Daerah

Target dan Realisasi Pembiayaan Daerah Pemerintah Kabupaten Wajo Tahun 2019 mengalami penurunan jika dibandingkan dengan Tahun 2018.

- Target Anggaran Tahun 2018 sebesar Rp.43.101.313.571,50 sedangkan target tahun 2019 sebesar Rp. 6.376.069.710,27. sehingga mengalami penurunan sebesar 139,53%;
- Sedangkan Realisasi Belanja pada Tahun 2018 sebesar Rp.42.798.313.571,50 menurun jika dibandingkan pada tahun 2019 yakni sebesar Rp.6.376.069.710,27 , Sehingga anggaran ini mengalami penurunan sebesar 142,85 %

Diagram 5
Perbandingan Antara Target Pembiayaan dan Realisasi Pembiayaan
Pemerintah Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2018-2019



Sumber : Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2018-2019

Realisasi Pembiayaan Daerah yang tidak maksimal disebabkan karena adanya penurunan pada beberapa belanja, dapat dijelaskan sebagai berikut:

- Perubahan Anggaran untuk **Penerimaan Pembiayaan Daerah** yaitu pada Tahun 2018 Target Pembiayaan sebesar Rp.35.076.313.571,50 sementara pada tahun2019 target pembiayaan hanya sebesar Rp. 6.376.069.710,27 dan Realisasi Pembiayaan 100%.
- Perubahan Anggaran untuk **Pengeluaran Pembiayaan Daerah** yaitu pada Tahun 2018 Target Anggaran Pembiayaan sebesar Rp.8.025.000.000,00 dan Realisasi

Belanja sebesar Rp.7.722.000.000,00 atau 96,22%. Target anggaran mengalami penurunan pada tahun 2019 yang hanya sebesar Rp. 4.000.000.000,00.

Secara umum penurunan persentase capaian belanja dari tahun sebelumnya disebabkan oleh:

1. Adanya efisiensi belanja pada SKPD sedangkan target dan realisasi tetap tercapai.
2. Adanya pendapatan daerah yang diterima pada akhir tahun sehingga belanja tidak dapat dilakukan pada tahun berkenaan.
3. Adanya pekerjaan yang kontrak kerjanya berakhir pada tanggal 30 dan 31 Desember, sehingga pembayarannya dilaksanakan di tahun berikutnya.
4. Adanya beberapa pekerjaan yang terkendala pada mekanisme perizinan dari pemerintah pusat dan syarat/teknis pelaksanaan pekerjaan yang membutuhkan perda untuk pelaksanaan pekerjaannya.

Untuk mengoptimalkan capaian kinerja keuangan untuk tahun selanjutnya maka Pemerintah Kabupaten Wajo melakukan kebijakan sebagai berikut:

1. Sinkronisasi antara perencanaan dan keuangan sehingga dokumen perencanaan betul-betul dapat dipedomani untuk penentuan anggaran.
2. Mengupayakan program dan kegiatan pada SKPD agar direncanakan sesuai dengan indikator kinerja yang dapat diukur.
3. Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Wajo tepat waktu.
4. Melakukan koordinasi yang intensif kepada pemerintah pusat dan pemerintah provinsi terkait dengan penerimaan daerah.
5. Melakukan kerjasama dengan pihak ketiga sesuai dengan waktu yang dibutuhkan.

BAB IV

PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kabupaten Wajo Tahun 2019 ini merupakan pertanggung jawaban tertulis atas penyelenggaraan pemerintah yang baik (*Good Governance*) Instansi Pemerintah Kabupaten Wajo Tahun 2019. Pembuatan LKjIP ini merupakan langkah yang baik dalam memenuhi harapan Inpres No. 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP). Sebagai upaya untuk penyelenggaraan pemerintahan yang baik sebagaimana diharapkan oleh semua pihak.

LAKIP/LKjIP Instansi Pemerintah Kabupaten Wajo Tahun 2019 ini dapat menggambarkan kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Wajo dan Evaluasi terhadap kinerja yang telah dicapai baik berupa kinerja kegiatan, maupun kinerja sasaran, juga dilaporkan analisis kinerja yang mencerminkan keberhasilan dan kegagalan.

Berdasarkan hasil pengukuran pencapaian sasaran yang telah dilakukan dari berbagai kegiatan, yang membandingkan antara rencana, pencapaian kegiatan dengan realisasi sasaran, berdasarkan indikator yang telah ditetapkan dapat disimpulkan bahwa capaian sasaran diukur dari tercapainya kondisi yang ingin diwujudkan pada tingkat skala nilai kinerja tinggi berbagai kegiatan yang telah dilaksanakan pada Instansi Pemerintah Kabupaten Wajo Tahun 2019 dan berdasarkan realisasi anggaran, penggunaan anggaran dalam dokumen pelaksanaan anggaran (DPA) tahun 2019 adalah sebanyak Rp.1.566.419.291.345,20 telah menggunakan anggaran sebesar Rp.1.549.649.683.540,55,- atau sebesar (98,93 %) secara efektif telah mewujudkan capaian kinerja untuk menunjang pencapaian Misi dan Visi Sekretariat Daerah Kabupaten Wajo.

Berdasarkan pagu indikatif Renstra jumlah anggaran tersebut maka realisasi anggaran yang telah digunakan oleh Instansi Pemerintah Kabupaten Wajo adalah 98,93 % dari anggaran indikatif yang direncanakan, hal tersebut menunjukkan bahwa perencanaan Instansi Pemerintah Kabupaten Wajo telah dioptimal dan lebih efektif dan efisien dalam meningkatkan kinerja yang mendukung pencapaian Visi dan Misi Kabupaten Wajo.

Dengan tersusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Wajo ini, diharapkan dapat memberikan gambaran Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Wajo kepada pihak-pihak terkait baik sebagai stakeholders ataupun pihak lain yang telah mengambil bagian dengan berpartisipasi aktif untuk membangun Kabupaten Wajo.

Sengkang, 03 Maret 2020



Lampiran 1

Lampiran 2



DAFTAR PROFIL MASJID DI PROV. SULAWESI SELATAN

NO	KAB./KOTA	KECAMATAN	NAMA MASJID	ID MASJID	TIPOLOGI	ALAMAT	LUAS TANAH	STATUS TANAH	LUAS BANGUNAN	TAHL
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1.	KAB. WAJO	Maniangpajo	Masjid Khulafaurraiydin	01.6.26.13.09.000030	Masjid di Tempat Publik	Desa Kalola	866 m ²	Wakaf	196 m ²	
2.	KAB. WAJO	Tanasitolo	Masjid Baiturrahim	01.6.26.13.08.000054	Masjid di Tempat Publik	Data Orai Desa Mario	300 m ²	Wakaf	100 m ²	
3.	KAB. WAJO	Tanasitolo	Masjid al-fimah	01.6.26.13.08.000053	Masjid di Tempat Publik	al-Fimah Br Tancung	225 m ²	Wakaf	64 m ²	
4.	KAB. WAJO	Tanasitolo	Masjid Al-Munir	01.6.26.13.08.000052	Masjid di Tempat Publik	Jalan Andi Unru	-	Wakaf	90 m ²	
5.	KAB. WAJO	Tempe	Masjid Anas Bin Malik	01.6.26.13.05.000094	Masjid di Tempat Publik	Jl. Rusa Kelurahan Tempe	-	Wakaf	-	
6.	KAB. WAJO	Tanasitolo	Masjid Nurul Ikhlas	01.6.26.13.08.000051	Masjid di Tempat Publik	Desa Pincengpute	875 m ²	Wakaf	252 m ²	
7.	KAB. WAJO	Pammama	Masjid Al-Taqwa	01.6.26.13.02.000070	Masjid di Tempat Publik	Desa Tadangpalle	80 m ²	Wakaf	64 m ²	
8.	KAB. WAJO	Belawa	Masjid Abdul Malik	01.6.26.13.07.000053	Masjid di Tempat Publik	Desa Limprialau	225 m ²	SHM	100 m ²	

Lampiran 3

Tabel 3.2.
Capaian Kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Wajo
Tahun 2019

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Tertaksananya fungsi sekolah sebagai tempat pemberdayaan ilmu pengetahuan dan teknologi.	Angka Rata-Rata Lama Sekolah	8,1 Tahun	7,9 Tahun	98%	Sangat Tinggi
		Angka Harapan Lama Sekolah	13,12 Tahun			
		Angka Partisipasi Kasar (rata-rata seluruh tingkatan)	86,38%	93,25%	108%	Sangat Tinggi
		Angka partisipasi kasar SD/MI	99,77%	98,69%	98%	Sangat Tinggi
		Angka partisipasi kasar SMP/MTs	90,53%	87,82%	97%	Sangat Tinggi
		Angka Partisipasi Murni	91,83%	93,91	102%	Sangat Tinggi
		Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A	99,77%	98,78%	99%	Sangat Tinggi
		Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B	90,98%	89,04%	97%	Sangat Tinggi
2.	Meningkatnya jumlah siswa melanjutkan dan berkurangnya siswa yang <i>drop out</i> /keluar.	Angka Pendidikan yang Ditamatkan	10.457 Siswa	12.509 Siswa	119%	Sangat Tinggi
		Angka Melanjutkan	59,35%	47,19%	79%	Tinggi
3.	Meningkatkan kesamaan memperoleh pendidikan kelompok yang kurang mampu dan rawan putus sekolah	Angka Putus Sekolah	0,94%	1,05%	111%	Sangat Tinggi
		Angka Melek Huruf	99,3%	99,86%	101%	Sangat Tinggi
4.	Terselenggaranya kelompok kesenian masyarakat untuk melestarikan budaya daerah	Jumlah Grup Kesenian	3 Group	3 Group	100%	Sangat Tinggi
		Jumlah Gedung Kesenian	5 Gedung	5 Gedung	100%	Sangat Tinggi

2. Realisasi Kinerja serta Pencapaian Kinerja Tahun 2019 dengan tahun 2018 dan tahun 2017.

Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2019 dengan realisasi dan capaian kinerja tahun 2017 dan 2018 diperlukan untuk mengetahui peningkatan/penurunan capaian setiap tahun, yang disajikan

Lampiran 4

Sasaran Startegis	Indikator Kinerja	Sat.	Target	Realisasi	% Capaian Kinerja	Ket.
	Persentase puskesmas yg menyelenggarakan kesehatan kerja dasar	%	80	100	125	Melebihi target
4. Menurunnya angka kesakitan dan angka kematian penyakit menular dan tidak menular	Cakupan desa/kel. UCI	%	100	100	100	Tercapai
	Cakupan penemuan & penanganan penderita AFP rate <15 th	%	100	100	100	Tercapai
	Persentase penemuan dan penanganan penderita Pneumonia Balita	%	100	100	100	Tercapai
	RFT rate penderita kusta	%	>90	94,74	105,27	Tercapai
	Persentase penderita DBD yang ditangani	%	100	100	100	Tercapai
	Cakupan penemuan dan penanganan penderita Diare	%	100	100	100	Tercapai
	Annual parasite Incidence (API) malaria	permil	< 1/1000	0,08/1000	100	Tercapai
	Persentase pemenuhan pencapaian SPM penyakit menular yg ditangani	%	100	97,53	97,53	Tidak Tercapai
	Persentase pemenuhan pencapaian SPM penyakit tidak menular yg ditangani	%	100	36,69	36,69	Tidak Tercapai
	5. Meningkatnya akses dan mutu pelayanan kesehatan primer dan rujukan	Persentase puskesmas terakreditasi	%	100	100	100
Persentase puskesmas yg mengelola dana JKN dg baik		%	100	100	100	Tercapai
6. Meningkatnya kinerja, akses dan mutu pelayanan kesehatan tradisional	Persentase puskesmas yg melaksanakan pelayanan kesehatan tradisional yang memenuhi standar	%	100	100	100	Tercapai
7. Terwujudnya pembinaan,	Persentase ketersediaan obat	%	100	100	100	Tercapai

Lampiran 5

TENAGA KERJA



TPT

(Tingkat Pengangguran
Terbuka)

3,79%

TPAK

(Tingkat Partisipasi
Angkatan Kerja)

59,12%

Jumlah Pekerja

172.382 orang

Lampiran 6

Tabel 3.3
Capaian Kinerja Utama Tahun 2019
Dinas Pemuda dan Olahraga Kab. Wajo
Berdasarkan RPJMD Kab. Wajo

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Jumlah organisasi kepemudaan yang berprestasi	Organisasi	1	1	100
2	Jumlah cabang olahraga yang mendapatkan prestasi di tingkat provinsi, nasional dan internasional	Cabang/Club	10	10	100

Berdasarkan data tabel 3.1 di atas, maka capaian kinerja instansi pemerintah Kabupaten Wajo yakni Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Wajo Tahun 2019 sebesar 100% dengan kategori kinerjanya adalah tinggi.

Setelah melihat dari Rekapitulasi Capaian Kinerja Organisasi dari Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Wajo diatas, maka dalam rangka menggambarkan evaluasi pencapaian kinerja organisasi secara komprehensif maka dengan ini disajikan analisis capaian kinerja Dinas Pemuda dan Olahraga tahun 2019.

Tabel 3.4
Capaian Kinerja Tahun 2019
Dinas Pemuda dan Olahraga Kab. Wajo
Berdasarkan Perjanjian Kinerja

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Jumlah organisasi kepemudaan yang berprestasi	Organisasi	1	1	100
2	Jumlah cabang olahraga yang mendapatkan prestasi di tingkat provinsi, nasional dan internasional	Cabang/Club	10	10	100
3	Indeks kepuasan pelayanan administrasi	Angka	55	55	100
4	Nilai evaluasi AKIP	Angka	55	55	100
5	Persentase temuan BPK/Inspektorat yang ditindaklanjuti	%	100	100	100
6	Persentase tertib administrasi barang/aset daerah	%	100	100	100



Lampiran 7



PEMBANGUNAN MANUSIA BERBASIS GENDER

2019



KERJASAMA KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
DENGAN
BADAN PUSAT STATISTIK



Provinsi/ Kabupaten/ Kota	Umur Harapan Hidup		Harapan Lama Sekolah		Rata-rata Lama Sekolah		Pengeluaran per Kapita Disesuaikan		IPM		IPG
	(tahun)		(persen)		(tahun)		(ribu rupiah PPP)				
	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
WAJO	64.79	68.69	12.84	13.62	7.13	6.39	19659	9382	73.22	65.93	90.04
SIDENRENG RAPPANG	67.11	71.06	12.50	13.26	8.12	7.49	17934	9882	74.59	68.55	91.90
PINRANG	66.88	70.96	12.32	13.98	8.33	7.50	14988	10290	72.97	69.65	95.45
ENREKANG	68.53	72.46	13.41	14.16	9.00	8.30	11005	10111	72.79	71.33	97.99
LUWU	67.81	71.76	12.82	13.69	8.21	7.76	13875	8019	73.10	67.46	92.28
TANA TORAJA	70.83	74.66	13.23	14.01	8.50	7.78	10461	5135	72.55	63.74	87.86
LUWU UTARA	65.87	69.82	12.52	12.24	7.68	7.08	16039	8115	72.43	64.42	88.94
LUWU TIMUR	68.01	71.93	12.74	13.20	8.87	8.11	18992	8950	76.80	68.64	89.38
TORAJA UTARA	71.14	74.93	12.93	13.65	8.41	7.51	11035	5006	72.81	62.89	86.38
KOTA MAKASSAR	69.70	73.58	15.37	16.05	11.37	10.84	20033	13266	83.94	79.35	94.53
KOTA PARE-PARE	68.86	72.79	14.08	14.64	10.65	9.91	15437	13100	78.93	76.46	96.87
KOTA PALOPO	68.46	72.41	14.09	15.76	10.58	10.48	15409	11777	78.63	76.86	97.75
SULAWESI TENGGARA	68.83	72.71	13.48	13.55	9.13	8.26	13271	7578	75.03	67.71	90.24
BUTON	65.56	69.52	14.08	13.52	9.32	6.44	12025	4453	73.26	57.88	79.01
MUNA	68.00	71.88	13.68	14.08	9.29	7.43	11959	6118	73.99	64.43	87.08
KONAWE	67.70	71.69	12.58	13.32	9.52	8.52	14359	9254	74.78	69.48	92.91
KOLAKA	68.35	72.29	12.37	12.91	8.94	8.33	17764	8437	76.07	68.15	89.59
KONAWE SELATAN	68.21	72.15	12.23	12.80	8.27	7.18	13103	6114	72.20	63.03	87.30
BOMBANA	66.13	70.10	11.70	12.32	8.12	7.02	12342	4839	69.88	58.71	84.02
WAKATOBI	67.82	71.77	13.30	13.12	8.34	7.18	13195	7048	73.31	64.80	88.39
KOLAKA UTARA	67.91	71.85	11.90	12.10	7.93	7.62	10695	9831	69.32	67.82	97.84
BUTON UTARA	68.57	72.47	12.71	12.86	9.22	7.88	9763	6837	71.14	65.33	91.83
KONAWE UTARA	66.97	70.87	12.44	12.31	9.31	8.32	13289	5805	73.28	62.71	85.58
KOLAKA TIMUR	70.00	73.86	12.37	11.78	7.32	6.51	7594	8307	66.42	65.20	98.16
KONAWE KEPULAUAN	66.12	69.98	11.80	11.08	9.77	8.67	10189	4628	70.18	58.78	83.76
MUNA BARAT	67.98	71.86	12.34	12.04	7.35	5.96	10202	5988	68.61	60.41	88.05
BUTON TENGAH	65.40	69.23	12.93	12.34	7.67	5.05	11428	4485	69.54	55.14	79.29
BUTON SELATAN	65.40	69.23	12.56	12.93	7.53	6.20	13190	2922	70.30	50.96	72.49
KOTA KENDARI	71.30	75.16	16.26	16.20	12.13	11.23	16794	12668	84.77	80.24	94.66
KOTA BAU-BAU	68.70	72.63	14.48	15.20	10.74	9.74	14989	8148	79.05	71.66	90.65
GORONTALO	65.51	69.53	12.77	13.51	7.14	7.76	13860	5126	70.52	61.09	86.63
BOALEMO	66.20	70.17	11.86	12.87	6.05	6.56	13117	3609	67.83	54.82	80.82
GORONTALO	65.07	68.88	12.50	13.34	6.32	7.07	13858	3786	68.90	55.93	81.18

Provinsi/ Kabupaten/Kota	Keterlibatan Perempuan di Palemen (%)	Perempuan Sebagai Tenaga Profesional (%)	Sumbangan Pendapatan Perempuan (%)	IDG
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
MOROWALI UTARA	16,00	50,09	20,88	57,68
KOTA PALU	14,29	53,86	34,24	67,83
SULAWESI SELATAN	19,05	52,91	31,83	69,14
KEPULAUAN SELAYAR	16,00	56,49	31,54	64,69
BULUKUMBA	17,50	59,46	33,46	66,78
BANTAENG	33,33	54,97	36,73	80,53
JENEPONTO	25,00	51,85	31,39	72,37
TAKALAR	30,00	62,00	27,96	70,55
GOWA	8,89	53,14	33,38	61,06
SINJAI	23,33	59,15	32,95	70,24
MAROS	20,00	50,57	26,22	65,48
PANGKAJENE DAN KEPULAUAN	8,57	61,72	31,54	56,30
BARRU	28,00	52,20	25,70	69,24
BONE	13,33	55,40	31,92	63,16
SOPPENG	26,67	57,89	33,36	73,75
WAJO	17,50	62,91	26,73	61,07
SIDENRENG RAPPANG	5,71	54,95	28,96	52,71
PINRANG	10,00	58,46	34,48	61,73
ENREKANG	6,67	55,56	36,23	59,36
LUWU	11,43	59,95	36,41	63,58
TANA TORAJA	20,00	56,64	41,07	74,14
LUWU UTARA	5,71	48,60	20,12	46,24
LUWU TIMUR	3,33	47,22	22,78	46,06
TORAJA UTARA	5,71	57,60	34,26	56,15
KOTA MAKASSAR	14,00	45,17	34,86	67,89
KOTA PARE-PARE	16,00	53,51	31,74	66,62
KOTA PALOPO	24,00	52,52	34,20	74,87
SULAWESI TENGGARA	18,18	48,79	36,04	71,54
BUTON	28,00	61,37	39,58	74,56
MUNA	10,00	47,46	35,54	61,33
KONAWA	23,33	45,95	36,42	75,90
KOLAKA	13,33	51,94	25,85	61,12
KONAWA SELATAN	40,00	52,11	30,80	80,27
BOMBANA	8,33	54,89	27,04	54,04

Lampiran 8



Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wajo. Upaya untuk meningkatkan akuntabilitas, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wajo juga melakukan reviu terhadap Indikator Kinerja Utama, dalam melakukan reviu dengan memperhatikan capaian kinerja, permasalahan dan isu-isu strategis yang sangat mempengaruhi keberhasilan suatu organisasi. Hasil pengukuran atas indikator kinerja utama Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wajo tahun 2018 menunjukkan hasil sebagai berikut:

Tabel 3.1
Capaian Indikator Kinerja Utama
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Wajo Tahun 2019

No.	Indikator Sasaran	Satuan	Realisasi Akumulasi s/d. Tahun 2019	Rencana sesuai dengan Renstra Tahun 2019	Persentase Capaian Kinerja
					(%)
1	2	3	4	5	6
1	Persentase kepemilikan KTP	%	98,69	100	99,11
2	Persentase kepemilikan akta kelahiran usia 0-18 tahun	%	93,99	100	93,99
Capaian kinerja					97,26

Dari tabel tersebut terlihat bahwa tingkat pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang tertuang dalam **Misi**: Mewujudkan Tertib Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang Berbasis *Information, Communication and Technology*

Lampiran 9

Capaian Kinerja Tahun 2019 sebesar 347,210 Km Jalan dalam kondisi Baik dari target 360,220 Km atau **95,03%**.

Target pada tahun 2019 sesuai Revisi Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2014 – 2019 yaitu 360,220 Km atau mencapai 95.03% di akhir periode renstra tahun 2019 sesuai dengan Revisi

Bila dilihat realisasi pencapaian sasaran Terpenuhiya kualitas jalan dan jembatan dalam kondisi baik sebagaimana telah direncanakan dalam renstra Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Jasa Konstruksi dan Penataan Ruang Kab. Wajo adalah sebagai berikut :

No.	Indikator Sasaran	Satuan	Tahun 2019			Tahun 2019	
			Target	Realisasi	Capaian Kinerja	Target	Capaian Kinerja
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Terpenuhiya kualitas jalan dan jembatan dalam kondisi baik	Persentase	36.22%	34.42%	95.03%	36.22%	95.03%
Rata - Rata Capaian Kinerja					95.03%		95.03%

Berdasarkan table diatas dapat diketahui bahwa realisasi terhadap target Tahun 2019 menunjukkan capaian kinerja **34.42%** yang berarti capaian belum sesuai target renstra, dan realisasi terhadap target Renstra tahun 2019 menunjukkan capaian kinerja **34.42%**



Lampiran 10

No	Indikator Kinerja Utama	Target		Realisasi		Capaian Kinerja (%)	
		2018	2019	2018	2019	2018	2019
1	Jumlah arus penumpang angkutan umum	1.576.488 Orang	1.633.523 Orang	1.842.424 Orang	1.978.888 Orang	117%	121%
2	Jumlah Uji Kir angkutan umum	49,93%	52,89%	43,91%	87,48%	87,94%	165,40%
3	Jumlah Pelabuhan Laut	2 Unit	2 Unit	2 Unit	2 Unit	100%	100%
4	Jumlah Terminal	3 Unit	3 Unit	3 Unit	3 Unit	100%	100%
5	Persentase Layanan Angkutan Darat	0,042%	0,043%	0,034%	0,034%	79,07%	79,07%
6	Persentase Kepemilikan KIR Angkutan Umum	5,80%	5,70%	59,18%	45,62%	100%	100%
7	Pemasangan Rambu-Rambu	150 Unit	150 Unit	190 Unit	-	126,67%	-
8	Jumlah Orang/barang Yang Terangkut Angkutan Umum	1.420.441 Orang	1.440.200 Orang	1.105.310 Orang	1.102.310 Orang	77,81%	76,54%
9	Jumlah Orang/barang Melalui Dermaga Pertahun	4.410 Orang	4.550 Orang	67.924 Orang	51.508 Orang	100%	100%
		49 Ton	53 Ton	44 Ton	11 Ton	89,80%	20,75%
10	Jumlah Orang Melalui Terminal Pertahun	472.100 Orang	472.900 Orang	636.240 Orang	635.520 Orang	134,76%	134,54%
		481.950 Kg	482.500 Kg	636.520 Kg	636.520 Kg	132,07%	131,92%

Untuk lebih jelas melihat perbandingan realisasi Indikator Kinerja Utama (IKU) tahun 2018 dan 2019 pada Dinas Perhubungan Kabupaten Wajo dapat tergambar pada diagram dibawah ini :

Lampiran 11

PENGUKURAN KINERJA SASARAN TAHUN 2019

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TAHUN 2014			TAHUN 2015			TAHUN 2016			TAHUN 2017			TAHUN 2018			CAPAIAN TAHUN 2019
		TARGET	REALISASI	CAPAIAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Meningkatnya sarana dan prasarana potensi sumber daya air	Persentase Kecukupan Air dalam jaringan irigasi Rasio Jaringan Irigasi	27,86	29,63	106,35	28,5	31,76	111,44	32	34,91	109,11	35	37,46	107,03	38	41,02	107,96	50,00
Meningkatnya cakupan layanan pengelolaan irigasi	Persentase daerah irigasi kewenangan kabupaten dalam kondisi baik	8,78	9,33	106,26	8,8	9,39	106,74	9,4	9,50	101,09	9,5	10,45	110,00	9,5	10,38	109,26	10,00
Meningkatnya perbaikan dan pengendalian potensi sumber daya air	Persentase perbaikan kerusakan potensi sumber daya air	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100	100,00	100,00	100	100,00	100,00	100,00
Meningkatnya pelayanan administrasi umum	Persentase keterperubahan sarana dan prasarana penunjang, peralatan kerja Persentase tertib administrasi barang dan aset sipid Jumlah sumber daya aparatur yang ditingkatkan kompetensinya	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100
		35	35	100,00	30	35	116,67	35	42	120,00	30	42,00	140,00	30	28,00	93,33	30

Lampiran 12

(3) Hasil Rendah dan Sangat Rendah

Gradasi ini menunjukkan pencapaian/realisasi kinerja capaian belum memenuhi/masih dibawah persyaratan minimal pencapaian kinerja yang diharapkan.

3.1. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Berdasarkan Pejanjian Kinerja tahun 2019 Dinas Perumahan , Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Wajo telah menetapkan target kinerja pencapaian sasaran strategis dengan upaya untuk pencapaian sasaran strategis tersebut diwujudkan dengan melaksanakan berbagai program dan kegiatan strategis.

Sedangkan Gambaran keberhasilan ketercapaian Sasaran dan Tujuan sebagai penjabaran Visi dan Misi direpresentasikan oleh capaian Indikator Kinerja Utama Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Wajo sebagai berikut :

Tabel 3.2.

Rekapitulasi Evaluasi Pencapaian Sasaran Strategis
Penetapan Kinerja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
Kabupaten Wajo Tahun 2019

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Thn 2019	Realisasi Thn 2019	Capain
1	Meningkatnya ketersediaan prasarana ,sarana dan utilitas permukiman perumahan Kumuh	Prosentase Luas Permukiman Kumuh	5.53%	5.40 %	97,65%
		Prosentase Luas Permukiman Kumuh Perkotaan	100%	59,82 %	59,82%
2	Meningkatkan cakupan ketersediaan rumah layak huni bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR)	Persentase Rumah Layak huni	95,54	95,68%	100,14%
No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Thn 2019	Realisasi Thn 2019	Capain
3	Meningkatkan Lahan Pemda yang bersertifikat	Jumlah ketersediaan biaya Penataan, Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah	92 Sertifikat	66 Sertifikat	71,74%
4	Meningkatnya penyelesaian kasus tanah Negara	Persentase penyelesaian konflik-konflik pertanahan	4 Kasus	9 kasus	225 %
5	Meningkatnya ketersediaan prasarana dan utilitas permukiman	Persentase ketersediaan sarana dan prasarana PJU bagi masyarakat	100 Titik	1.273 Titik	1.273%

Lampiran 13

LAPORAN PRODUKSI KELOMPOK

TAHUN 2019

NO	KELOMPOK	Jumlah telur yang dipelihara (box)	Jenis Bibit			Produksi Kokon (Kg)			Produksi benang (kg)			Keterangan	
			Perum	Cina	BPA	Perum	Cina	BPA	Perum	Cina	BPA		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	JANUARI	10.0	10.0	-	-	299.9	-	-	37.47	-	-	-	
2	FEBRUARI	14.0	12.0	-	2.0	250.6	-	81.7	50.28	-	10.2		
3	MARET	26.0	10.0	-	16.0	318.4	-	263.85	39.72	-	22.35		
4	APRIL	17.0	17.0	-	-	225.8	-	-	25.93	-	-		
5	MEI	11.0	11.0	-	-	118.6	-	-	13.61	-	-		
6	JUNI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
7	JULI	2.0	2.0	-	-	48.5	-	-	5.46	-	-		
8	AGUSTUS	22.75	14.5	8.25	-	173.9	75.0	-	19.87	7.0	-		
9	SEPTEMBER	7.75	-	7.75	-	-	-	-	-	-	-		
10	OKTOBER	3.5	2.0	1.5	-	82.0	-	-	10.25	-	-		
11	NOVEMBER	12.5	1.5	11.0	-	12.8	223.0	-	1.6	24.0	-		
12	DESEMBER	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Jumlah	127	80	28.5	18	1,530.5	298.0	345.6	204.2	31.00	32.55		

Catatan :

- 1. Jumlah Bibit Ulat = 127 Box
- 2. Produksi Kokon = 2.174,1 Kg
- 3. Produksi Benang = 267,75 Kg

Lampiran 14

3.1 PERKEMBANGAN PDRB PENGELUARAN

Mulai tahun 2015 PDRB diestimasi dengan menggunakan tahun dasar baru, tahun 2010 (2010=100) menggantikan tahun dasar lama, tahun 2000 (2000=100). Penyusunan PDRB dengan tahun dasar baru juga disertai dengan upaya untuk mengimplementasikan *System of National Accounts (SNA)* yang baru, SNA 2008. Kedua hal tersebut tentu berdampak pada besaran maupun struktur PDRB serta indikator ekonomi yang diturunkan dari data PDRB tersebut.

Perekonomian Kabupaten Wajo periode 2014-2018 tumbuh positif dengan trend perlambatan yakni sebesar 9,67 persen pada tahun 2014 melambat hingga 4,96 persen pada tahun 2017; dan semakin melambat hingga 1,07 persen pada tahun 2018. Dari sisi produksi, pertumbuhan ekonomi tertinggi terjadi pada kategori Jasa Lainnya yang tumbuh hingga 12,95 persen pada tahun 2018. Dari sisi permintaan akhir, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Wajo didominasi pertumbuhan komponen Pengeluaran Konsumsi Rumah tangga (PK-RT), yang menyumbang sebesar 62 persen dari total PDRB kabupaten Wajo.

Tabel 1. PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Pengeluaran Kabupaten Wajo, 2014-2018

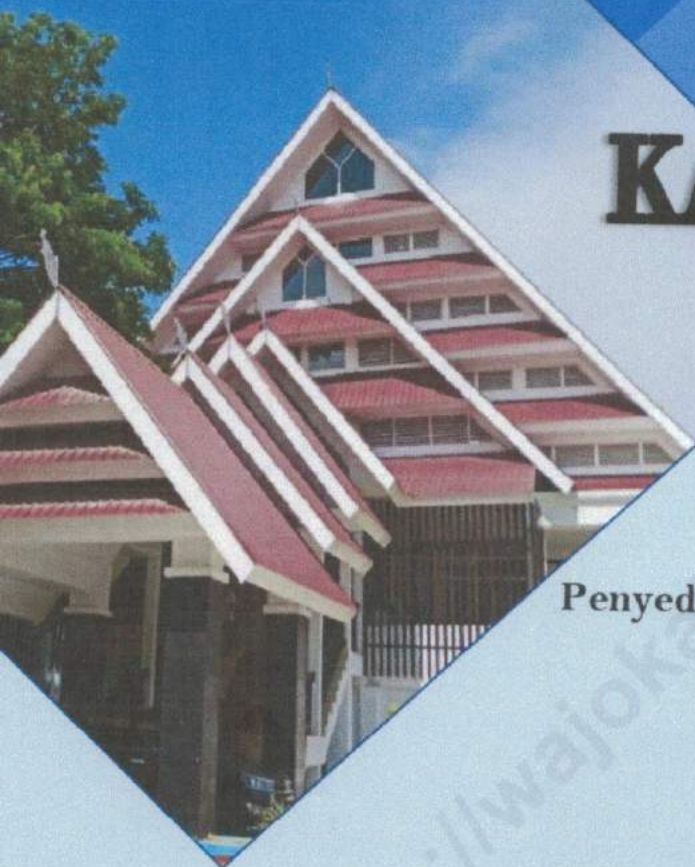
Komponen Pengeluaran (1)	(Miliar Rp)				
	2014 (2)	2015 (3)	2016 (4)	2017* (5)	2018** (6)
1. Konsumsi Rumah Tangga	8 142,18	9 282,62	10 193,57	10 949,55	11 864,14
2. Konsumsi LNPRT	141,14	158,75	175,37	193,30	225,50
3. Konsumsi Pemerintah	1 091,02	1 214,06	1 234,24	1 277,88	1 397,24
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto	4 067,84	4 588,62	5 021,33	5 372,93	5 797,59
5. Perubahan Inventori	295,64	322,03	333,17	259,52	139,97
6. Ekspor Barang dan Jasa	5 038,40	5 263,28	6 131,08	6 923,39	6 914,60
7. Dikurangi Impor Barang dan Jasa	5 120,84	5 710,35	6 544,02	7 144,46	7 630,00
PDRB	13 655,38	15 119,01	16 544,74	17 832,11	18 709,04

*Angka sementara

** Angka sangat sementara

Pada periode tahun 2014-2018 PDRB Kabupaten Wajo atas dasar harga Berlaku meningkat cukup signifikan, yakni sebesar 13.655,38 miliar Rupiah (2014); 16.544,74 miliar rupiah (2016) dan 18.709,04 miliar rupiah (2018). Peningkatan ini dipengaruhi baik oleh perubahan harga maupun perubahan volume. Peningkatan PDRB sisi produksi diikuti oleh peningkatan PDRB dari sisi permintaan akhir (pengeluaran).

Katalog/ Catalog : 1102002.7313



KABUPATEN WAJO DALAM ANGKA

WAJO REGENCY IN FIGURES

Penyediaan Data untuk Perencanaan Pembangunan

Delivering Data to Inform Development Planning

<https://wajokab.go.id>

2020



**BADAN PUSAT STATISTIK
KABUPATEN WAJO**

Lanjutan Tabel/Continued Table 8.1

	Lapangan Usaha/ <i>Industry</i>	2015	2016	2017	2018	2019
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
K	Jasa Keuangan dan Asuransi/ <i>Financial and Insurance Activities</i>	353,01	417,21	445,73	471,16	485,68
L	Real Estat/ <i>Real Estate Activities</i>	500,08	563,75	609,69	661,88	711,94
M,N	Jasa Perusahaan/ <i>Business Activities</i>	16,41	18,71	20,65	23,24	26,09
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib/ <i>Public Administration and Defence; Compulsory Social Security</i>	625,37	639,58	685,55	748,99	879,25
P	Jasa Pendidikan/ <i>Education</i>	501,26	562,74	637,29	721,61	778,25
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial/ <i>Human Health and Social Work Activities</i>	207,78	235,91	264,77	298,74	331,26
R,S,T,U	Jasa Lainnya/ <i>Other Services Activities</i>	60,34	67,98	77,84	90,38	99,42
	Produk Domestik Bruto/ Gross Domestic Product	15 119,01	16 544,74	17 832,11	18 709,89	19 838,81

Sumber/Source: Badan Pusat Statistik Kabupaten Wajo/BPS - Statistics of Wajo Regency

Lampiran 15

realisasi kinerja. Melihat pada skala nilai peringkat kinerja sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII Tabel VII.C Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, maka secara umum Pemerintah Kabupaten Wajo melalui Dinas Pariwisata untuk tahun 2018 telah melaksanakan tugas dalam pencapaian kinerja sesuai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui Penetapan Kinerja Dinas Pariwisata Kabupaten Wajo Tahun 2019.

Tabel 3.2
Capaian Kinerja Tahun 2019
Dinas Pariwisata Kab. Wajo Berdasarkan Renstra 2014-2019

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Jumlah objek wisata yang memiliki daya Tarik	Objek	3	3	100
2	Jumlah kunjungan wisatawan	Orang	72.782	72.782	100
3	Lama tinggal wisatawan	Hari	3	3	100
4	Jumlah personil pengelola kepariwisataan terlatih	Orang	20	0	0
5	Jumlah jenis jasa dan laporan dalam system pelayanan administrasi perkantoran.	Jasa dan Laporan	9	9	100
6	Jumlah sarana prasarana dan SDM aparatur yang ditingkatkan kualitasnya	Jenis Sarana Prasarana dan Orang	4 sarana dan 15 orang	0 sarana dan 1 orang	0
7	Jumlah dokumen perencanaan, dokumen evaluasi dan laporan kinerja SKPD	Dokumen	5	4	80

Tabel 3.3
Capaian Kinerja Utama Tahun 2019
Dinas Pariwisata Kab. Wajo Berdasarkan RPJMD Kab. Wajo

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Jumlah kunjungan wisatawan	Orang	72.782	72.782	100
2	Lama tinggal wisatawan	Hari	3	3	100

Berdasarkan data tabel 3.1. di atas, maka capaian kinerja instansi pemerintah Kabupaten Wajo yakni Dinas Pariwisata Kabupaten Wajo Tahun 2019 lebih besar 100% dengan kategori kinerjanya adalah melebihi target.

Setelah melihat dari Rekapitulasi Capaian Kinerja Organisasi dari Dinas Pariwisata Kabupaten Wajo diatas, maka dalam rangka menggambarkan evaluasi pencapaian kinerja organisasi secara komprehensif maka dengan



Lampiran 16

DINAS KETAHANAN PANGAN
KABUPATEN WAJU
JL. RUSA NO. 17 SENGGANG

SKOR POLA PANGAN HARAPAN AKTUAL
BERDASARKAN SURVEI KONSUMSI PANGAN TAHUN 2011
KABUPATEN WAJU

TOTAL WILAYAH

No	Kelompok Pangan	Kalori	%	% AKE ¹⁾	Bobot	Perhitungan Skor Pola Pangan Harapan (PPH)					
						Skor Aktual	Skor AKE	Skor Maks	Gap Skor AKE dari Skor Maksimal	Skor PPH	
1.	Padi-padian	975,1	67,9	48,8	0,5	28,9	24,4	25,0	-0,6	24,4	
2.	Umbi-umbian	27,3	1,6	1,4	0,5	0,8	0,7	2,5	-1,8	0,7	
3.	Pangan Hewani	228,6	13,6	14,4	2,0	27,1	22,9	24,0	-1,1	22,9	
4.	Minyak dan Lemak	177,8	10,5	8,9	0,5	5,3	4,4	5,0	-0,6	4,4	
5.	Buah/Biji Berminyak	9,6	0,6	0,6	0,5	0,3	0,2	1,0	-0,8	0,2	
6.	Kacang-kacangan	66,0	3,9	3,3	2,0	7,8	6,6	10,0	-3,4	6,6	
7.	Gula	43,3	2,6	2,2	0,5	1,3	1,1	2,5	-1,4	1,1	
8.	Sayur dan Buah	123,5	7,3	6,2	5,0	36,6	30,9	30,0	0,9	30,0	
9.	Lain-lain	33,9	2,0	1,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Total		1436,2	100,0	84,3	11,5	109,2	91,2	100,0		90,3	

Keterangan *
1) Angka Kecukupan Energi (AKE) Kkal/Kap/Hari

Lampiran 17

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas/pemberi amanah.

Dinas Sosial Kabupaten Wajo selaku pengembang amanah masyarakat Kabupaten Wajo melaksanakan kewajiban berakuntabilitas melalui penyajian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Wajo yang dibuat sesuai dengan ketentuan yang terkandung dalam Perpres Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

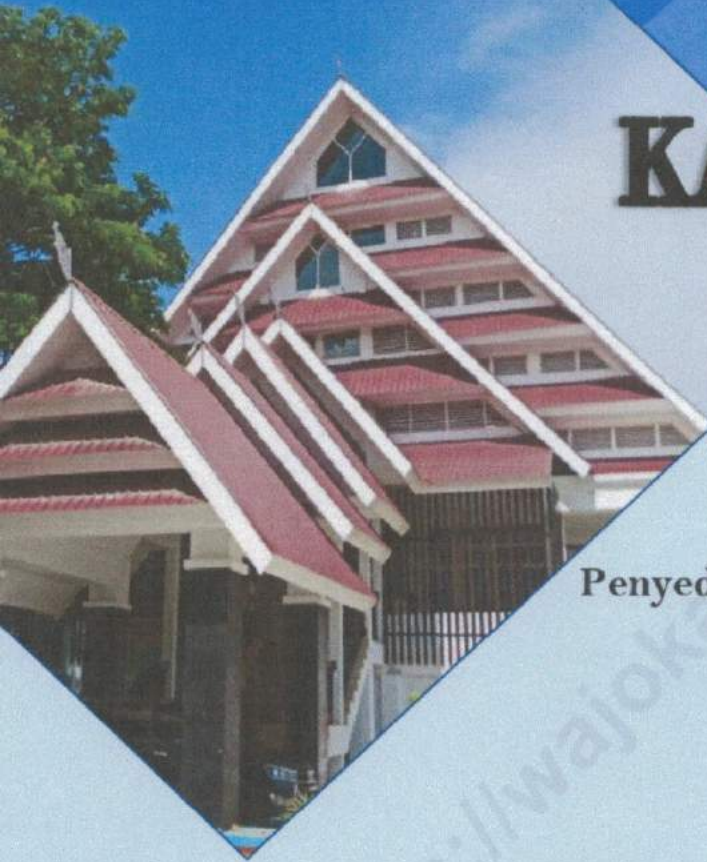
Laporan tersebut diatas memberikan gambaran mengenai tingkat pencapaian Sasaran dan Program/Kegiatan, baik keberhasilan-keberhasilan kinerja yang telah dicapai maupun kegagalan pada tahun 2018.

Untuk mengukur keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang akan digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja, maka dalam laporan kinerja Dinas Sosial Kabupaten Wajo Tahun 2019 ini akan dijelaskan capain indikator kinerja utama (IKU), Indikator Kinerja Kunci (IKK), dan Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang mendukung pencapaian kinerja sasaran dalam RPJMD Kabupaten Wajo. Pencapaian kinerja IKU, IKK, dan SPM Dinas Sosial Kabupaten Wajo secara ringkas digambarkan sebagai berikut:

No.	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
A	Indikator Kinerja Utama (IKU)				
1.	Persentase Penduduk Miskin	%	6,68	7,50	89,07
2.	Persentase PMKS yang tertangani	%	28,65	30	104,71
B.	Indikator Kinerja Kunci (IKK)				
3.	Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial.	%	45,92	44,90	97,78
4.	persentase PMKS yang tertangani	%	28,69	30	104,71
5.	persentase PMKS skala yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar.	%	38,99	38,99	100
6.	Persentase PMKS yang menerima program pemberdayaan sosial melalui kelompok usaha bersama (KUBE) atau kelompok sosial ekonomi sejenis	%	45	45	100,00

Lampiran 18

Katalog/ Catalog : 1102002.7313



KABUPATEN WAJO DALAM ANGKA

WAJO REGENCY IN FIGURES

Penyediaan Data untuk Perencanaan Pembangunan

Delivering Data to Inform Development Planning



**BADAN PUSAT STATISTIK
KABUPATEN WAJO**

2020

3.1 PENDUDUK POPULATION

Tabel 3.1 **Penduduk, Laju Pertumbuhan Penduduk per Tahun, Distribusi Persentase Penduduk, Kepadatan Penduduk, Rasio Jenis Kelamin Penduduk Menurut Kecamatan, 2019**
Population, Annual Population Growth Rate, Percentage Distribution of Population, Population Density, and Population Sex Ratio by Subdistrict, 2019

Kecamatan Subdistrict	Penduduk (ribu) Population (thousand)	Laju Pertumbuhan Penduduk per Tahun 2018–2019 Annual Population Growth Rate (%) 2018–2019
(1)	(2)	(3)
Sabbangparu	26 326	0,20
Tempe	66 461	0,91
Pammana	31 860	0,20
Bola	19 792	0,20
Takkalalla	21 044	0,20
Sajoanging	19 070	0,20
Penrang	15 856	0,20
Majauleng	31 862	0,20
Tanasitolo	40 081	0,19
Belawa	32 594	0,20
Maniangpajo	16 348	0,20
Gilireng	11 444	0,37
Keera	22 529	0,37
Pitumpanua	42 547	0,20
Wajo	397 814	0,24
Hasil Registrasi/Registration Result		
Hasil Proyeksi /Projection Result	397 814	0,24

Tabel 2.1.
Perjanjian Kinerja
Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Wajo
Tahun 2019

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Meningkatnya akses, cakupan, dan kualitas pelayanan Keluarga Berencana	Cakupan Peserta KB Aktif	76,10%
		Cakupan Peserta KB Baru	81,83%
		Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (<i>unmeet need</i>)	10%
2.	Meningkatnya pemahaman remaja dalam kesehatan reproduksi	Jumlah kelompok PIK Remaja yang aktif	70 kelompok
3.	Meningkatnya kelompok bina keluarga yang menggerakkan partisipasi masyarakat.	Persentase PUS peserta KB anggota BKB yang ber-KB	77,95%
		Persentase PUS peserta KB anggota BKR yang ber-KB	77,15%
		Persentase PUS peserta KB anggota BKL yang ber-KB	74,69%
		Persentase PUS anggota UPPKS yang ber-KB	76,85%
4.	Meningkatnya Pelayanan dan Akuntabilitas Kinerja	Persentase temuan BPK/Inspektorat yang ditindaklanjuti	100%
		Persentase dokumen perencanaan dan pelaporan kinerja dan keuangan yang disusun	100%
		Persentase anggaran yang terserap	100%

Sumber : Perjanjian Kinerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kab.Wajo, Tahun 2019

Lampiran 19

pengukuran kinerja beserta evaluasi setiap tujuan dan sasaran Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Wajo tahun 2019 sebagai berikut :

Sasaran : Meningkatnya Kondisi Kualitas Lingkungan Hidup

Sasaran tersebut di atas terdiri atas 3 (tiga) indikator sasaran, dengan hasil sebagai berikut :

No.	sasaran	Indikator Sasaran	Target Tahun 2019	Realisasi Tahun 2019	Prosentase Capaian Tahun 2019
1	Meningkatnya Kondisi Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Air (IKA)	60	40	66
		Indeks Kualitas Tanah	-	-	-
		Indeks Kualitas Udara	84	80,44	95,76
Rata-rata sasaran / Indikator Sasaran					80,88 %

Dari tabel di atas menunjukkan bahwa pencapaian sasaran 1 dengan 3 indikator sasaran pada tahun 2019 dengan kategori capaian 99% disimpulkan BAIK. Berikut evaluasi dan analisis atas capaian indikator - indikator kinerja sasaran tersebut :

1.1 Indeks Kualitas Air (IKA) Indikator tersebut dilaksanakan melalui Program Pengendalian Pencemaran dan perusakan lingkungan Hidup dengan kegiatan utamanya adalah Pemantauan Kualitas Lingkungan. Indikator sasaran tidak dapat dibandingkan dengan capaian tahun 2019 (periode RENSTRA Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2015 - 2019) karena Indeks Kualitas Air (IKA) merupakan indikator sasaran baru yang merupakan penyempurnaan dari indikator sebelumnya yaitu data kondisi lingkungan Kabupaten Wajo meliputi kualitas air, tanah dan udara (tanah dan udara belum dapat dipantau). Pada indikator sebelumnya belum dilakukan perhitungan kondisi kualitas air, udara dan lingkungan hidup dalam bentuk

Lampiran 20

Persentase Penyelesaian Pelanggaran Perda/Perkada	Jumlah Penyelesaian Pelanggaran Perda/Perkada	X 100%
	Jumlah Pelanggaran Perda/Perkada	

Hasil pengukuran atas indikator kinerja utama Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Wajo Tahun 2019 menunjukkan hasil sebagai berikut :

Tabel 3.3
Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2019
Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Wajo

NO.	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TAHUN 2019		
		TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Rasio Jumlah Polisi Pamong Praja per 10.000 Penduduk.	6,33	5,53	87,36%
2.	Cakupan Patroli Petugas Satpol PP per hari	1.080 Kali/Tahun (3 Kali/Hari)	1.080 Kali/Tahun (3 Kali/Hari)	100%
3.	Rasio Pos Siskamling per jumlah Desa / Kelurahan	2,89%	3,63%	125,61%
4.	Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketenteraman dan Keindahan) Kabupaten/Kota	96%	96%	100%

Lampiran 21



No.	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
3	Persentase hasil evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Perangkat Daerah dengan kategori "B"	%	12,2	20,75	170%
4	Persentase Perangkat Daerah yang Diusulkan Penilaian Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) /Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM)	%	0	0	0%
5	Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	55,54	57,54	104%
6	Level Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Level	Level 3	Level 3	100%
7	Level kapabilitas Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP)	Level	Level 3	Level 3	100%
8	Persentase Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil (PPKPNS) dengan kategori "baik" dengan nilai skala "85.28-90.00"	%	80	100	125%
9	Nilai/Kategori Akuntabilitas Kinerja Inspektorat Daerah	Nilai	71,00-73,00	-	-
10	Rata-rata Capaian Kinerja Perangkat Daerah (Evaluasi Dokumen Perencanaan)	%	80	97,25	122%
11	Persentase rekomendasi temuan Inspektorat Daerah yang ditindaklanjuti sesuai rekomendasi	%	80	100	100%

Tabel 3-4. Realisasi Target Kinerja IKU Tahun 2019

Target Indikator 4; Persentase Perangkat Daerah yang Diusulkan Penilaian Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) /Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) adalah 0 (nol) dikarenakan Pembangunan Zona Integritas yang dilaksanakan pada Tahun 2019 masih pada tahap pencanangan. Pembangunan dan pengusulan penetapan Zona Integritas akan dilaksanakan pada Tahun 2020. Sedangkan realisasi Indikator 9; Nilai/Kategori Akuntabilitas Kinerja Inspektorat Daerah tidak terisi dikarenakan pelaksanaan reviu atas AKIP Inspektorat Daerah Kabupaten Wajo belum dilaksanakan dan akan dilaksanakan pada Maret Tahun 2020.

3. Capaian Kinerja Sasaran Strategis pada Perjanjian Kinerja

Secara umum Inspektorat Daerah Kabupaten Wajo telah dapat melaksanakan tugas dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra 2019-2020.

Lampiran 22

(2) Hasil Sedang

Gradasi cukup menunjukkan pencapaian/realisasi kinerja capaian telah memenuhi persyaratan minimal.

(3) Hasil Rendah dan Sangat Rendah

Gradasi ini menunjukkan pencapaian/realisasi kinerja capaian belum memenuhi/masih dibawah persyaratan minimal pencapaian kinerja yang diharapkan.

3.1. Capaian Kinerja Organisasi

Tabel 3.2
Rekapitulasi Evaluasi Pencapaian Sasaran Strategis
Penetapan Kinerja RSUD Lamaddukkeileng Kabupaten Wajo Tahun
2019

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA	SKALA NILAI KINERJA
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Meningkatnya efisiensi dan mutu pelayanan Rumah Sakit	Persentase realisasi layanan yang sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Rumah Sakit	%	80	94,6	118,25	Sangat Tinggi
		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	%	80	77,63	97,04	Sangat Tinggi
		Bed Occupancy Ratio (BOR)	%	75	52,64	70,19	Sedang
		Average Length of Stay (AvLOS)	hari	6	3	50,00	Sangat Rendah
		Bed Turn Over (BTO)	kali	50	57	114,00	Sangat Tinggi
		Turn Over Interval (TOI)	han	3	3	100,00	Sangat Tinggi
		Net Death Rate (NDR)	%	13	17	76,47	Tinggi
		Gross Death Rate (GDR)	%	22	39	56,41	Rendah
		RATA-RATA CAPAIAN KINERJA SASARAN 1					

Tabel 3.10
Evaluasi Pencapaian Kinerja Per-Kegiatan pada Program
Pengkajian dan Penelitian Bidang Informasi dan Komunikasi

No.	Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja	Skala Nilai Kinerja
1.	Survei Indeks Kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik daerah	1 Keg.	1 Keg.	99,50 %	Tinggi

9. Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi

Pada Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi Terdapat 3 (Tiga) kegiatan tapi hanya 1 (Satu) yang terlaksana karena adanya rasionalisasi anggaran sehingga tidak dianggarkan lagi yaitu

1. Peningkatan kegiatan pemantuan Penanaman Modal kegiatan ini dilaksanakan untuk memantau perusahaan Penanaman Modal Dalam Negeri dan Perusahaan Modal Asing, Tingkat capaian kegiatan ini 97,60 %
2. Peningkatan kegiatan pembinaan Penanaman Modal kegiatan ini tidak dilaksanakan karena adanya rasionalisasi anggaran sehingga tidak dianggarkan lagi
3. Peningkatan kegiatan pengawasan Penanaman Modal kegiatan ini tidak dilaksanakan karena adanya rasionalisasi anggaran sehingga tidak dianggarkan lagi

Tabel 3.12
Evaluasi Pencapaian Kinerja Per-Kegiatan pada Program
Peningkatan Iklim Investasi

No.	Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja	Skala Nilai Kinerja
1.	Peningkatan kegiatan pemantuan, Penanaman Modal	1 Keg.	1 Keg.	97,60 %	Tinggi
2.	Peningkatan kegiatan pembinaan Penanaman Modal	1 Keg.	-	-	-
3.	Peningkatan kegiatan pengawasan Penanaman Modal	1 Keg.	-	-	-

Lampiran 23

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
PERANGKAT DAERAH : BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN WAJO

NO	INDIKATOR	TARGET TAHUN 2019	REALISASI TAHUN 2019	%CAPAIAN	KETERANGAN
1.	Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	WTP	-		Sementara Proses Pemeriksaan BPK
2.	Persentase Tertib Penatausahaan dan Administrasi Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	100	100	100%	
3.	Nilai Sakip	CC	CC	100%	
4.	Rata-Rata Capaian Kinerja Perangkat Daerah	100	100	100%	

Sengkang, 13 Februari 2020

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah
Kabupaten Wajo



Lampiran 24



**KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI
REPUBLIK INDONESIA**

JALAN JENDERAL SUDIRMAN KAV. 69, JAKARTA 12190, TELEPON (021) 7398381 - 7398382, FAKSIMILE (021) 7398323
SITUS <http://www.menpan.go.id>

Nomor : B/ 610 /AA.05/2019
Sifat : Segera
Lampiran : -
Perihal : **Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah Tahun 2019**

30 Desember 2019

Yth. Bupati Wajo
di
Sengkang

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan atas nama Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi telah melaksanakan evaluasi terhadap akuntabilitas kinerja Pemerintah Kabupaten Wajo Tahun 2019. Pelaksanaan evaluasi tersebut berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Evaluasi ditujukan untuk **menilai tingkat akuntabilitas atau pertanggungjawaban atas hasil (outcome) terhadap penggunaan anggaran dalam rangka terwujudnya pemerintahan yang berorientasi kepada hasil (result oriented government) serta memberikan saran perbaikan yang diperlukan.**

Hasil evaluasi Pemerintah Kabupaten Wajo mendapat nilai **52,95** atau dengan predikat penilaian "CC". Hasil evaluasi secara rinci dapat dilihat pada Laporan Hasil Evaluasi yang disampaikan BPKP Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan. Agar terjadi peningkatan akuntabilitas kinerja yang lebih baik pada tingkat pemerintah daerah dan perangkat daerah, rekomendasi hasil evaluasi yang diberikan agar menjadi perhatian dan harus segera ditindaklanjuti.

Demikian disampaikan hasil evaluasi atas implementasi SAKIP Kabupaten Wajo. Kami menghargai upaya Saudara beserta seluruh jajaran dalam menerapkan SAKIP di lingkungan Pemerintah Kabupaten Wajo. Terima kasih atas perhatian dan kerja sama Saudara.

Deputi Bidang Reformasi Birokrasi,
Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan,

Muhammad Yusuf Ateh

Tembusan:

1. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
2. Menteri Dalam Negeri;
3. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;
4. Gubernur Sulawesi Selatan.